

PROSIDING

RAPAT KOORDINASI NASIONAL Strategi Pencapaian Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi



PROSIDING

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

Strategi Pencapaian Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi

**Hotel Novotel Tangerang & Zoom Meeting
Tangerang, 15 - 17 Desember 2020**

Dipublikasikan Oleh:
Sekretariat POKJA PPAS Nasional

**Jika ada pertanyaan lebih lanjut,
Anda dapat menghubungi:**

Sekretariat Pokja PPAS Nasional

Jalan Ki Mangunsarkoro No.41, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Website : www.nawasis.org

Youtube : Pokja PPAS Nasional

Instagram : @rumahairminumsanitasi

E-mail : ccmu.indonesia@gmail.com

Telp. 021 - 21231162

Sektor Perumahan

Telp. 021 - 21231162

E-mail : ccmu.indonesia@gmail.com

Sektor Air Minum & Sanitasi

Telp. 021 - 31903909

E-mail : sekretariatpmu@yahoo.com

DESEMBER 2020



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
GLOSARIUM
EXECUTIVE SUMMARY
LAMPIRAN

iv
vi
viii
81



2

BAB 1. **Gambaran Umum**

Latar Belakang; Tujuan; Keluaran Kegiatan; Waktu dan Tempat; Metodolog; Agenda



9

BAB 2. **Sambutan Pembuka**

Keynote Speech Oleh Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/ BAPPENAS



11

BAB 3. **Sesi-1: Talk Show: Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi**



20

BAB 4. **Sesi-2: Presentasi Panel: Praktik Baik Daerah**

Provinsi Sumatera Selatan; Provinsi Sulawesi Selatan; Provinsi Jawa Tengah



BAB 5.
Sesi-3: FGD Strategi Pencapaian Target Daerah Dalam Mendukung RPJMN Tahun 2020-2024

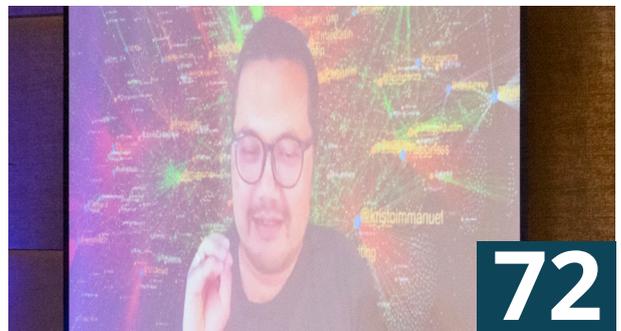
Desk Perumahan; Desk Air Minum dan Sanitasi



BAB 6.
Exercise Perencanaan Program Kegiatan Tahun 2022 dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Tahun 2021



BAB 7.
Sesi-5: Pengembangan Strategi Advokasi dan Komunikasi dalam Pencapaian Target dan Mendukung Kegiatan Tahun 2021



BAB 8.
Sesi-5: Pengembangan Strategi Advokasi dan Komunikasi dalam Pencapaian Target dan Mendukung Kegiatan Tahun 2021



BAB 9.
Sesi-1: Talk Show: Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi



BAB 10.
Rencana Tindak Lanjut dan Penutupan

GLOSARIUM

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AMPL	: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BMD	: Barang Milik Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BMN	: Barang Milik Negara
BP2BT	: Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
BSPS	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
EHRA	: <i>Environmental Health Risk Assessment</i>
FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
FORKALIM	: Forum Komunikasi Operator Air Limbah
GERMAS	: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT	: Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
IUWASH PLUS	: <i>Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene</i> , Penyehatan Lingkungan Untuk Semua
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPR	: Kredit Kepemilikan Rumah
KOTAKU	: Kota Tanpa Kumuh
KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KT	: Konsolidasi Tanah
K/L	: Kementerian/Lembaga
LKNB	: Lembaga Keuangan Non Bank
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PDT	: Pembangunan Daerah Tertinggal

PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEMPROV	: Pemerintah Provinsi
PJKA	: Perusahaan Pajawatan Kereta Api
PKP	: Perumahan dan Kawasan Permukiman
POKJA	: Kelompok Kerja
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAS	: Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi
PPDPP	: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
PPSP	: Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
PSU	: Prasarana Sarana Umum
RAB	: Rancangan Anggaran Biaya
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RKP	: Rencana Kawasan Permukiman
RP3KP	: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
SIMANIS CIKA	: Sistem Informasi Manajemen Air Minum dan Sanitasi Bidang Keciptakaryaan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SNV	: <i>Stichting Nederlandse Vrijwilligers</i> (mitra kedutaan Belanda)
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SSK	: Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SPALD	: Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
UU	: Undang-Undang

EXECUTIVE SUMMARY



Tri Dewi Virgiyanti
Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman
Kementerian PPN/BAPPENAS

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Strategi Pencapaian Target Daerah Bidang Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum Dan Sanitasi 2020-2024 diselenggarakan pada tanggal 17-20 November di Hotel Novotel, Tangerang sebagai tindak lanjut dari distribusi target RPJMN 2020-2024 Provinsi pada *Kick Off Meeting* Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (Pokja PPAS) Nasional. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid meeting dimana pengisi acara dan peserta dapat mengikuti kegiatan secara *offline* dan *online* dihadiri ± 270 orang yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, mitra, serta unsur Pokja daerah (OPD di 34 provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya, Dinas PKP/Tata Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat).

Dalam sambutan pembukaan, Josaphat Rizal Pramana sebagai Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/BAPPENAS menjelaskan arahan Bapak Presiden dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 adalah menjadikan RPJMN bukan sebagai dokumen formalitas, namun menjadi panduan perencanaan yang tegak lurus dari pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu menjadi penting untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah mensinergikan mulai dari konsep, definisi, indikator, target hingga program

dan kegiatan untuk mencapai satu *outcome* yang sama, yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yaitu mewujudkan permukiman inklusif dan layak huni. Acara Rakornas ini menjadi salah satu tindak lanjutnya agar target yang telah ditetapkan dapat dilanjutkan dengan perumusan program dan kegiatan percepatan yang harus dilakukan ke depan. Hingga saat ini sudah 24 provinsi yang melakukan *Kick off Meeting* daerah untuk menyepakati target daerah. Sebagai hasilnya, 17 provinsi telah mengirimkan targetnya secara resmi ke Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah awal komitmen daerah untuk mendukung terwujudnya target RPJMN 2020-2024.

Mengawalirangkaiankegiatan,sesitalkshowmengundangdelapanarasumber dari unsur pemerintah pusat dan yang bertindak sebagai moderator sesi adalah **Tri Dewi Virgiyanti ST, MEM**, Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/ Bappenas, bersama dengan Wiwit Heris dan Sogi Indra Dhuaja sebagai host ja;annya diskusi. Virgi menekankan urgensi keterpaduan perencanaan dan pembangunan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan bidang perumahan, air minum dan sanitasi, khususnya dari sudut pandang keterpaduan perencanaan di pemerintah.

Menurut **Dendy Kurniadi ST, MT** – Subkoo Pelgas Perencanaan, Program, dan Anggaran, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PUPR, yang menjadi akar permasalahan yaitu pemahaman secara bersama-sama konteks regulasi yang sudah tersedia, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), beserta peraturan turunannya hingga ke standar teknis penyelenggaraan infrastruktur kawasan. Selain itu, aspek basis data perumahan dan kawasan permukiman yang penting dalam mendasari pengambilan keputusan sektoral, serta pentingnya pengembangan dan implementasi skema kelembagaan, pemanfaatan dan pengelolaan dibidang PKP.

Sementara itu, **Ir. Prasetyo, MEng** - Direktur Sanitasi, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PUPR, menyatakan bahwa akar masalah keterpaduan perencanaan dan pembangunan PPAS yaitu diperlukan komitmen dari semua pihak dalam penanganan kumuh yang bersifat lintas kelembagaan.

Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE, MT - Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, berpendapat bahwa diperlukan adanya rencana aksi yang komprehensif, baik di pusat maupun daerah. Ke depan, pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan harus mengambil peran lebih, termasuk dalam mencari sumber pembiayaan program, serta mengawal secara bersama-sama proyek percontohan yang diharapkan untuk dapat direplikasi.

Menurut **Iwan Kurniawan ST, MM** - Direktur SUPD II, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, urgensi **data** dalam sinkronisasi antara pusat

dan daerah yang dimulai dari perencanaan secara terpadu di pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dokumen formal, RPJMN dan RPJMD. Kelembagaan Pokja PKP/PPAS berperan penting untuk mengawal sinkronisasi strategi, program/ kegiatan dan target ini.

Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP - Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen. Perumahan, Kementerian PUPR berpesan bahwa kolaborasi merupakan kunci dalam mencapai target RPJMN dibidang PPAS. Virgi mengangkat dua kasus penanganan yaitu di Kampung Akuarium Jakarta dan Kawasan Semanggi Surakarta. **Kolaborasi** seluruh pihak dan peran sentral pemerintah daerah menjadi kunci sukses program penanganan kawasan kumuh.

Meike Kencanawulan Martawidjaja ST, MDM - Kasubdit Perencanaan Teknis SPAM, mewakili Direktur Air Minum, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PUPR, menyampaikan pentingnya perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi, serta penyediaan air minum yang berkelanjutan di daerah dengan pendekatan basis ketersediaan air baku, sinkronisasi lokus dengan kegiatan pengembangan kawasan permukiman, dan kolaborasi pembangunan dalam menjamin penyelenggaraan tingkat hulu hingga ke hilir.

Drs. Budi Santosa, Msi - Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Ditjen. Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, berpesan untuk mendorong Pemda dalam melakukan pelatihan khusus dalam rangka peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan kelembagaan di daerah dan didukung dengan mencukupi penyertaan modal. Virgi mengutarakan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai cara program yang sudah ada dapat disinergiskan dan peran apa yang dapat dilakukan dalam keterpaduan perencanaan dan pembangunan PPAS.

Ely Setyawati, SKM, MKM - Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, mewakili Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, menyampaikan bahwa strategi dan peran dalam mencapai keterpaduan perencanaan dan pembangunan ini perlu diawali dengan **komitmen** dalam mencapai target RPJMN dan TPB/SDGs. Eduard sebagai perwakilan daerah ikut mendukung kolaborasi dan **inovasi** dalam penyelenggaraan PPAS, yang juga sesuai dengan visi gubernur Jawa Barat. Dan Virgi menyampaikan pesan penutupnya dengan kata kunci: **data, komitmen, kolaborasi, rencana aksi, dan inovasi.**

Pada sesi berbagi (*Sharing session*), 3 (tiga) provinsi menceritakan pengalamannya yang memiliki program/kegiatannya di bidang PPAS dinilai sejalan dengan target RPJMN Tahun 2020-2024 yang dapat dijadikan lesson learned bagi provinsi atau kabupaten/kota lainnya. Menurut Basyar, Provinsi Sumatera Selatan, telah berhasil menyediakan perumahan skala besar untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) melalui 2 (dua) pendekatan yaitu: (1) Perumahan untuk ASN, TNI dan POLRI dengan skema program FLPP; serta (2) Perumahan untuk pekerja sektor informal yang sulit mengakses kredit dengan pola BP2BT dan menggunakan koperasi sebagai lembaga *intermediary* penjamin.

Perwakilan **Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan** menjelaskan telah menyusun pengembangan *roadmap* bidang air minum dan sanitasi sebagai bentuk dukungan pencapaian target nasional. Selain itu, pemerintah provinsi juga menyelenggarakan Saoraja Awards sebagai wadah pembelajaran horizontal serta strategi dalam mendorong akselerasi capaian bidang air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan, **Kepala Bappeda Jawa Tengah** menceritakan pengalamannya telah mengembangkan sistem informasi khusus yang terintegrasi, terstruktur dan terhubung dengan *single data system* daerah yaitu Simanis Cika. Sistem tersebut dimanfaatkan oleh provinsi untuk memudahkan proses monitoring capaian dan target layanan air minum dan sanitasi di seluruh kabupaten/kota.

Kemudian di hari kedua dibagi menjadi dua desk dengan pembahasan yang sama yaitu sesi FGD Strategi Pencapaian Target Bidang PPAS. Untuk perumahan pemateri nya adalah **Nurul Mujahid Kasubdit Perumahan**, Direktorat Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, pemateri air minum adalah **Tirta Sutedjo Kasubdit Air Minum**, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas dan pemateri Sanitasi adalah **Wahanudin, Kasubdit Sanitasi**, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

Desk perumahan bertujuan untuk memperoleh persepsi pemerintah daerah mengenai program/kegiatan perumahan yang dibutuhkan serta sebagai sarana *horizontal learning*. Mengawali paparannya, Nurul Mujahid menyampaikan mengenai adanya target nasional 70% rumah layak huni tahun 2020-2024 yang harus dipenuhi bersama, baik oleh pemerintah pusat, daerah, dan *stakeholder* pembangunan lainnya. Dalam rangka mencapai hal tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai strategi, kegiatan, *output*, hingga indikator yang perlu dipenuhi.

Diskusi dalam sesi ini dibagi ke dalam dua segmen. Segmen pertama dipandu oleh **Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP** dan fokus pada pembahasan aspek penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Sedangkan segmen kedua dipandu oleh **Ir. H. Encep R. Marsadi** membahas aspek pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan serta pembangunan baru serta peningkatan kualitas rumah.

Dari hasil diskusi dengan pemerintah daerah, terdapat sejumlah isu dalam proses pencapaian target bidang PPAS di daerah yang berhasil teridentifikasi yaitu:

- ⊙ Masih adanya diskontinuitas antara regulasi sektoral dengan regulasi yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, misal pada penanganan rumah layak huni untuk MBR, dimana kewenangan ini sepenuhnya masih ditangani Pemerintah Pusat. Namun demikian, ada beberapa provinsi yang dapat melakukan dengan ‘menitipkan’ perbaikan kualitas rumah di program penanganan kemiskinan di perdesaan;
- ⊙ Adanya *gap* kapasitas dan pengetahuan yang cukup signifikan bagi sebagian pemerintah daerah terhadap beberapa skema implementasi program/kegiatan bidang PPAS. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemerintah daerah yang berhasil mengimplementasi skema program dengan baik, namun pengetahuan tentang hal tersebut belum dipahami pemerintah daerah lain yang memiliki masalah identik; serta
- ⊙ Masih adanya dokumen perencanaan yang belum selaras dengan target pembangunan nasional bidang PPAS dalam RPJMN 2020-2024.

Di desk lain yaitu *Desk Air Minum* membahas konfirmasi Distribusi Target Provinsi. Tirta Sutedjo menyampaikan bagian tindak lanjut setelah perhitungan *baseline* dan distribusi target, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat melakukan pengawalan implementasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, mengevaluasi kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan, menentukan dukungan yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan advokasi dan peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota, mendorong replikasi praktik baik program perumahan dan permukiman antar Kabupaten/Kota, mendorong kerjasama antar Kabupaten/Kota dan menyusun strategi pencapaian target provinsi.

Kemudian untuk *Desk Sanitasi* membahas pelaksanaan pendampingan di daerah dan penguatan peran provinsi. Wahanudin menyampaikan bahwa pencapaian target nasional harus didukung oleh Pemerintah Pusat melalui penyusunan skenario atau strategi pendampingan daerah. Jika Pemerintah Pusat tidak segera melakukan pendampingan ketika daerah mengalami kendala dalam pergerakan, maka target nasional akan sulit dicapai.

Rencana Aksi Daerah merupakan instrumen Pemerintah Daerah untuk mencapai target dan mandat pembangunan air minum dan sanitasi. Rencana aksi menjabarkan kebutuhan operasionalisasi strategi daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan. Selain itu, Rencana Aksi Daerah juga merupakan pelaksanaan kewajiban daerah dalam menyediakan air minum dan sanitasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam implementasi pembangunan air minum dan sanitasi, provinsi dapat berperan dalam koordinasi, advokasi, advisori, fasilitasi, supervisi dan sinkronisasi.

Pada hari ketiga difokuskan pada sesi peningkatan kapasitas pemerintah daerah terkait strategi dalam bidang advokasi dan komunikasi. Pemerintah provinsi diberikan pelatihan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam mencapai target bidang PPAS. Terdapat sejumlah poin penting yang disampaikan pada sesi tersebut yaitu:

- ⦿ Besarnya potensi penyebaran informasi melalui media sosial khususnya untuk *platform* yang jumlah penggunanya paling banyak di Indonesia, seperti youtube, facebook, instagram dan twitter.
- ⦿ Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia masih belum mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk berkomunikasi dengan publik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat *engagement* media sosial yang tinggi namun masih memiliki tingkat interaksi yang rendah.
- ⦿ Topik terkait perumahan masih lebih sering dibicarakan di media sosial daripada air minum dan sanitasi. Akan tetapi, tingkat keaktifan pembahasan sektor perumahan di Indonesia masih lebih rendah daripada Malaysia. Hal ini berbeda dengan topik air minum yang lebih aktif dibicarakan di Indonesia karena peran lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan terkait.

Rencana tindak lanjut kegiatan yang diharapkan dari Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

- ⦿ Memastikan indikator *baseline* dan target PPAS dapat terinternalisasi kedalam dokumen RPJMD masing-masing, terutama daerah yang baru melaksanakan Pilkada serentak.
- ⦿ Memastikan Pokja Provinsi melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kabupaten/kota di masing-masing provinsi.
- ⦿ Memastikan Pokja Provinsi dapat melakukan advokasi dan peningkatan kapasitas terkait program-program PPAS di kabupaten/kota di masing-masing provinsi.
- ⦿ Menuangkan poin-poin tersebut diatas kedalam Rencana Kerja Pokja Provinsi Tahun 2021 yang akan difinalisasi dalam forum *Kick-Off Meeting* Tahunan di bulan Februari 2021.

Adapun rencana tindak lanjut oleh Pokja PPAS Nasional dalam rangka memperkuat implementasi strategi PPAS, akan dilaksanakan melalui sejumlah rangkaian kegiatan yaitu: (1) *Kick-Off Meeting* Pokja PPAS Nasional; (2) *Horizontal Learning Event*; (3) Lokakarya Sinkronisasi Sumber Pendanaan PPAS; (4) *Coaching Clinic* terkait fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan baru serta penyusunan strategi dan program/kegiatan dalam mendukung pencapaian target nasional; serta (5) Pelatihan tematik.

Di sesi terakhir atau penutup Tri Dewi Virgiyanti menyampaikan bahwa ada 4 (empat) kata kunci yang menjadi hal penting dalam mencapai keterpaduan perencanaan dan pembangunan perumahan, air minum dan sanitasi, yaitu: a) komitmen untuk mencapai RPJMN 2020-2024 akan terjadi jika ada kolaborasi; b) kolaborasi antar *stakeholder* mensyaratkan kerendahan hati dari masing-masing pihak; c) sistem pendataan terpadu yang kredibel sebagai basis perencanaan program pembangunan; d) rencana aksi dengan target yang jelas dalam implementasi perencanaan program beserta pendanaannya.

BAB 1

GAMBARAN UMUM KEGIATAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas melalui Pokja PPAS Nasional bersama pemerintah daerah menyusun distribusi target bidang perumahan dan permukiman, air minum, serta sanitasi. Hingga saat ini, 17 provinsi yang terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Riau, Jawa Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah telah berkomitmen dengan mengirimkan target bidang perumahan, air minum, dan sanitasi provinsi ke Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Dalam Negeri.

Target tersebut merupakan langkah awal bagi daerah untuk selanjutnya memetakan dan menentukan strategi serta program yang sesuai. Mengacu kepada RPJMN 2020-2024, terdapat indikator-indikator pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi yang perlu didukung oleh program/kegiatan, baik di pemerintah pusat atau daerah. Adapun program/kegiatan daerah tersebut mengacu pada nomenklatur program dan belanja pembangunan daerah terintegrasi yang saat ini tertuang pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019 yang berisikan penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase. Telah disadari bersama bahwa pembangunan bidang perumahan, air minum, dan sanitasi memiliki berbagai regulasi sektoral dan kewenangan sehingga perlu diintegrasikan.

Oleh karena itu, Direktorat Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas sebagai Ketua Pokja PPAS Nasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Strategi Pencapaian Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum Dan Sanitasi. Pelaksanaan kegiatan dinilai cukup strategis mengingat terdapat 270 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah sehingga dapat menjadi momentum penyusunan RPJMD yang tegak lurus dengan Indikator RPJMN 2020-2024, sekaligus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2030.



1.2 Tujuan

Tujuan dari Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- ⦿ Mengkonfirmasi komitmen baseline dan target daerah dalam mendukung tercapainya target RPJMN 2020-2024
- ⦿ Merumuskan strategi dan kegiatan dalam mencapai target daerah sesuai indikator RPJMN 2020-2024
- ⦿ Internalisasi baseline dan target bidang perumahan, air minum dan sanitasi dalam dokumen perencanaan daerah

1.3 Keluaran Kegiatan

Target keluaran yang diharapkan dari Rapat Koordinasi ini adalah:

- ⦿ Peserta daerah mampu menyusun strategi implementasi bidang perumahan, air minum dan saniasi sesuai dengan arah kebijakan dan target RPJMN 2020-2024;
- ⦿ Peserta daerah mampu menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan indikator pembangunan RPJMN 2020-2024;
- ⦿ Peserta daerah mampu menyusun rencana kerja tahunan provinsi untuk memfasilitasi pembangunan perumahan, air minur dan sanitasi kabupaten/ kota di wilayahnya;
- ⦿ Peserta daerah mampu melakukan internalisasi target bidang perumahan, air minum dan sanitasi dalam dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan indikator pembangunan RPJMN 2020-2024.

1.4 Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu virtual dan offline.

Offline:

⦿ Waktu : Selasa-Kamis, 15-17 Desember 2020

⦿ Tempat : Hotel Novotel Tangerang

Online:

⦿ Waktu : Selasa-Kamis, 15-17 Desember 2020

⦿ Tempat : Zoom Video Conference

1.5 Metode Kegiatan

Kegiatan ini akan dilakukan secara hybrid yang menggabungkan antara virtual dan offline. Untuk kegiatan yang dilakukan secara virtual dilakukan melalui platform zoom meeting dan live streaming youtube Pokja PPAS Nasional. Peserta dapat berinteraksi langsung dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan.



1.6 Agenda

Waktu	Agenda	Narasumber
Selasa, 15 Desember 2020		
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
	Pembukaan	MC
	Pembacaan Doa	Panitia
09.00 – 09.30	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
	Sabutan Pembuka	Bapak Deputi Sarana Prasarana Bappenas
	<p>Sesi 1: <i>Talkshow</i> Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi</p>	<p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⦿ Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR ⦿ Direktur Air Minum, Kementerian PUPR ⦿ Direktur Sanitasi, Kementerian PUPR ⦿ Direktur SSPP, Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR ⦿ Direktur PSSPP, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR ⦿ Direktur SUPD II, Kementerian Dalam Negeri ⦿ Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Kemendagri ⦿ Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan <p>Moderator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⦿ Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas ⦿ Sekretariat Pokja PPAS Nasional
09.30 – 11.30 10.40-11.45		
	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia

13.00 – 15.00

Sesi 2:
Presentasi Panel
Praktik Baik Penyelenggaraan
Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi

Narasumber:

- ⊙ Provinsi Sumatera Selatan
- ⊙ Provinsi Sulawesi Selatan
- ⊙ Provinsi Jawa Tengah

Pembahas:

- ⊙ Kasubdit Perumahan,
Kementerian PPN/
Bappenas
- ⊙ Kasubdit Air Minum,
Kementerian PPN/
Bappenas
- ⊙ Kasubdit Sanitasi,
Kementerian PPN/
Bappenas

Moderator:

- ⊙ Kasubdit Kemitraan dan
Kelembagaan, Kementerian
PUPR
 - ⊙ Sekretariat Pokja PPAS
Nasional
-

Rabu, 16 Desember 2020

08.30 – 09.00 Registrasi Peserta

Panitia

09.00 – 12.00

Sesi 3:
FGD Strategi Pencapaian Target Daerah
Dalam Mendukung RPJMN Tahun 2020-
2024

Narasumber:

Kasubdit Perumahan,
Kementerian PPN/Bappenas

Penanggap:

- ⊙ Direktorat SSPP,
Kementerian PUPR
 - ⊙ Direktorat PSSPP,
Kementerian PUPR
 - ⊙ Direktorat PKP, Kementerian
PUPR
 - ⊙ Direktorat KT dan
Pengembangan
Pertanahan, Kementerian
ATR/BPN
 - ⊙ Direktorat SUPD II,
Kementerian Dalam Negeri
 - ⊙ Bapak Oswar Mungkasa,
Kementerian PPN/
Bappenas
-

08.30-12.00 Desk 1. Perumahan

08.30-12.00	Desk 1. Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ ⦿ Peserta: ⦿ Kepala Dinas Provinsi
		<p>Moderator: Sekretariat Pokja PPAS Nasiona</p>
		<p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⦿ Kasubdit Air Minum, Kementerian PPN/ Bappenas ⦿ Kasubdit Sanitasi, Kementerian PPN/ Bappenas
09.00-12.00	Desk 2. Air Minum dan Sanitasi	<p>Penanggung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⦿ Direktorat Air Minum, Kementerian PUPR ⦿ Direktorat Sanitasi, Kementerian PUPR ⦿ Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan ⦿ Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian LHK ⦿ Direktorat SUPD II, Kementerian Dalam Negeri ⦿ Provinsi NTB
		<p>Peserta: Kepala Dinas Provinsi</p>
		<p>Moderator: Maraita Listyasari</p>
12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia
13.00 – 14.00	<p>Sesi 3: FGD Lanjutan FGD Strategi Pencapaian Target Daerah Dalam Mendukung RPJMN Tahun 2020-2024 Desk 1. Perumahan Desk 2. Air Minum dan Sanitasi</p>	
14.00 – 15.00	<p>Sesi 4: Exercise Perencanaan Program Kegiatan Tahun 2022 dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Tahun 2021</p>	Tim Fasilitator

Kamis, 17 Desember 2020

08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 – 10.30	Sesi 5: Pengembangan Strategi Advokasi dan Komunikasi dalam Pencapaian Target dan Mendukung Kegiatan Tahun 2021	Narasumber: 1. Wiwit Heris (Communication Specialist – Pokja PPAS Nasional) 2. Hony Irawan
10.30 – 11.30	Sesi 6: Pengembangan Material, Kanal dan Media Advokasi serta Komunikasi, Peran Media Sosial dan Influencer	Narasumber : 🕒 Ismail Fahmi (Ahli Sosial Media) 🕒 Ikke Nurjanah) (Duta PPAS /Influencer) Moderator: Wiwit Heris
11.30 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 14.30	Sesi 7: Exercise Penyusunan Strategi Advokasi dan Promosi serta Plenary Hasil Penyusunan Strategi	Peserta: Pokja Provinsi (2 provinsi) Moderator: Cahyadi Ramdhan (Specialist Capacity Building) Narasumber: Wiwit Heris dan Hony Irawan
	Narasumber: Ikke Nurjanah (Influencer / public figure)	Narasumber: Ikke Nurjanah (Influencer / public figure)
14.30-15.00 selesai	Rencana Tindak Lanjut dan Penutupan	Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas

BAB 2

SAMBUTAN PEMBUKA



2.1 *Keynote Speech*

Josaphat Rizal Pramana

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Kementerian PPN/BAPPENAS

Dalam sambutan pembukaan, Josaphat Rizal Pramana sebagai Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/BAPPENAS menjelaskan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Strategi Pencapaian Target Daerah Bidang Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum Dan Sanitasi 2020-2024 menjelaskan beberapa poin-poin penting untuk diperhatikan.

Poin pertama adalah terkait sumber daya manusia (SDM). Kapasitas SDM dalam suatu organisasi perlu ditingkatkan sehingga dapat menjalankan organisasi dengan baik dan menghasilkan sesuatu secara optimal. Poin selanjutnya adalah terkait keterlibatan masyarakat yang menjadi sangat penting dalam pembangunan. Semua pihak harus terus mengajak masyarakat untuk bekerjasama, karena sebaik apapun pembangunan yang dilakukan baik di daerah maupun di pusat akan menjadi sia-sia tanpa keterlibatan masyarakat untuk menjaga dan rasa memiliki. Poin terakhir adalah terkait pendanaan. Diperlukan inovasi sumber pendanaan dan peningkatan kualitas pendanaan untuk pembangunan yang dilakukan. Banyak instrumen atau cara yang bisa dilakukan untuk mendanai suatu kegiatan selama kegiatan yang dilakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terdapat adagium bahwa ketika kegiatan tersebut sangat bermanfaat, keterlibatkan swasta untuk berperan di dalam pelaksanaan menjadi sangat penting. Penggunaan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dapat sangat menguntungkan. Ketika tidak menguntungkan, pusat akan meminta dan mengajak BUMN untuk berperan. Sedangkan ketika sifatnya berupa investasi murni yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pembangunan jalan kabupaten dan jalan provinsi, maka pemerintah yang akan mengambil peran.

Demikian poin-poin penting yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan rapat koordinasi ke depan. Terakhir, kata koordinasi sering kali diucapkan tapi seringkali masalah timbul justru dari sisi koordinasi. Satu hal yang penting dalam koordinasi agar bisa berjalan dengan baik bukan karena sering berdiskusi atau bertemu tapi adanya kerendahan hati karena koordinasi adalah upaya untuk berbagi informasi. Diharapkan dengan adanya kerendahan hati, koordinasi ini mendapat hasil yang maksimal dan memberi manfaat untuk masyarakat.

BAB 3

BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM, DAN SANITASI

NOVOTEL HOTEL, TANGERANG | 📅 15 - 17 DESEMBER 2020



3.1 *Talkshow Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Perumahan, Air Minum Dan Sanitasi*

Rangkaian kegiatan Rakornas Pokja PPAS Nasional dipenghujung tahun 2020 ini, diawali dengan sesi talkshow dengan mengundang delapan narasumber dari unsur pemerintah pusat yaitu:

1. Direktur SUPD II, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
2. Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Ditjen. Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
3. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya,

Kementerian PUPR

4. Direktur Sanitasi, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PUPR
5. Direktur Air Minum, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PUPR
6. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR
7. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen. Perumahan, Kementerian PUPR
8. Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

Sesi ini membahas tema keterpaduan perencanaan dan pembangunan bidang perumahan, air minum, dan sanitasi. Adapun peserta sesi meliputi unsur pemerintah daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya, Dinas PKP/Tata Ruang, Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), perwakilan kementerian/lembaga, hingga mitra pembangunan. Kegiatan ini bernilai strategis mengingat terdapat 270 daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, sehingga dapat menjadi momentum penyusunan RPJMD yang tegak lurus dengan Indikator RPJMN 2020-2024 sekaligus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2030.

Sesi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong keterpaduan perencanaan dan pembangunan melalui perumusan strategi dan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target daerah dibidang perumahan, air minum, dan sanitasi, sesuai indikator RPJMN 2020-2024, sekaligus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) nomor 6 dan 11. Selain itu sesi ini diharapkan dapat menysasar beberapa poin utama, mulai dari pemahaman bersama mengenai arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan nasional di bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, serta mengidentifikasi bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk mendorong kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan di daerah. Kemudian mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pembangunan program/kegiatan sektoral melalui pembelajaran studi kasus daerah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Terakhir, untuk mendorong skema internalisasi baseline-target dalam dokumen perencanaan daerah.

Bertindak sebagai moderator sesi yaitu Tri Dewi Virgiyanti ST, MEM, Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, bersama dengan Wiwit Heris dan Sogi Indra Dhuaja sebagai host. Sebagai pemantik diskusi, host menyampaikan beberapa data dan fakta bidang PPAS di Indonesia, seperti capaian rumah layak huni nasional yang baru sebesar 56,5% (SUSENAS, 2020). Kemudian contoh kasus di DKI,

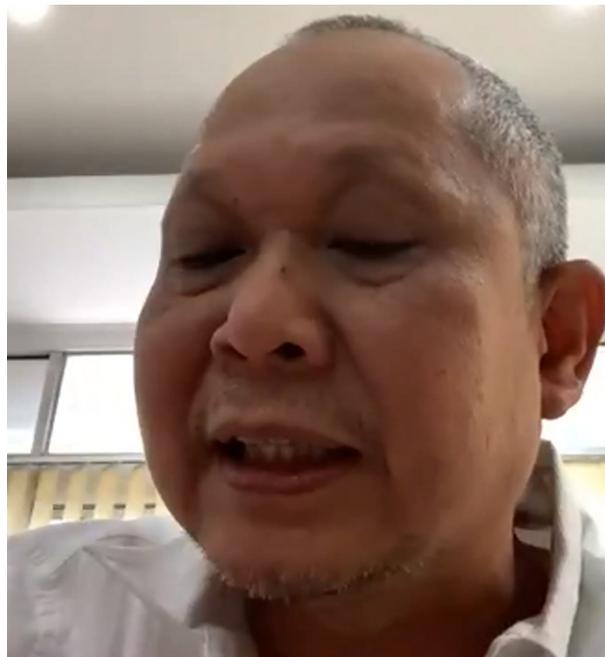
sebagai barometer perekonomian dan perkotaan nasional, yang masih memiliki 16% kawasan kumuh (445 RW) dan mayoritas dihuni oleh masyarakat sektor ekonomi informal. Sektor informal ini menyumbang 40% PAD Nasional, namun masih banyak penduduknya tinggal dipermukiman yang tidak memenuhi standar kelayakan. Virgi menekankan urgensi keterpaduan perencanaan dan pembangunan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan bidang PPAS, khususnya dari sudut pandang keterpaduan perencanan di pemerintah.



Moderator mengajukan pertanyaan pertama kepada narasumber mengenai akar masalah dibidang perumahan, air minum dan sanitasi. Menurut Dendy Kurniadi ST, MT – Subkoo Plt Perencanaan, Program, dan Anggaran, mewakili Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PUPR, beberapa poin yang menjadi akar permasalahan yaitu pertama bagaimana memahami secara bersama-sama UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, beserta peraturan turunannya hingga ke standar teknis penyelenggaraan infrastruktur kawasan. Kedua yaitu aspek data perumahan dan kawasan permukiman yang penting dalam mendasari pengambilan keputusan sektoral, serta pentingnya pengembangan dan implementasi skema kelembagaan, pemanfaatan dan pengelolaan dibidang PKP. Sementara itu, Ir. Prasetyo, MEng - Direktur Sanitasi, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PUPR, menyatakan bahwa akar masalah keterpaduan perencanaan dan pembangunan PPAS adalah perlunya komitmen dari semua pihak dalam penanganan kumuh yang bersifat lintas kelembagaan. Salah satu pembentuk kumuh adalah sanitasi, maka dari itu diperlukan irama yang sama untuk penanganan kawasan kumuh. selain itu fokus dan prioritas pembangunan di masing-masing daerah harus menjadi perhatian bersama.



Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE, MT - Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, berpendapat bahwa diperlukan adanya rencana aksi yang komprehensif, baik di pusat maupun daerah. Ke depan, pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan harus mengambil peran lebih, termasuk dalam mencari sumber pembiayaan program, serta mengawal secara bersama-sama proyek percontohan yang diharapkan untuk dapat direplikasi.



Menurut Iwan Kurniawan ST, MM - Direktur SUPD II, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, banyak poin yang berkontribusi pada masalah keterpaduan perencanaan dan pembangunan PPAS ini. Upaya sinkronisasi perencanaan di pemerintah pusat dan daerah sudah banyak dilakukan namun masih terkendala pada implementasi, termasuk ditahap evaluasi, dan monitoring. Kelembagaan Pokja PKP/PPAS berperan penting untuk mengawal sinkronisasi strategi, program/kegiatan dan target ini. Kemudian diperlukan perencanaan terpadu dari nasional hingga daerah dalam bentuk dokumen formal, sehingga pencapaian target nasional mendapatkan dukungan seluruh pihak. RPJMN turun ke daerah menjadi RPJMD, serta RKP diinternalisasi dalam RKPD, menghasilkan perencanaan yang tegak lurus. Dan menjadi catatan penting bahwa perencanaan tersebut harus berbasiskan data yang akurat dan kredibel.

Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM menggarisbawahi dua poin penting akar permasalahan bidang PPAS ini. Pertama tantangan dalam sinkronisasi perencanaan dengan menyelaraskan keseluruhan aspek yang ingin dicapai sejak tahap perencanaan yang berbasiskan data dan target, serta dilengkapi skema yang jelas terkait pendanaan dan kelembagaan. Setelah itu diperlukan pengawalan pada tahap implementasi, monitoring, dan evaluasi.

Pertanyaan kedua dari moderator adalah mengenai cara program yang sudah ada dapat disinergiskan dan peran apa yang dapat dilakukan dalam keterpaduan perencanaan dan pembangunan PPAS. Ely Setyawati, SKM, MKM – Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, mewakili Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen. Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, menyampaikan bahwa strategi dan peran dalam mencapai keterpaduan perencanaan dan pembangunan ini perlu diawali dengan komitmen dalam mencapai target RPJMN dan TPB/SDGs. Sektor kesehatan memiliki target ODF (Open Defecation Free) 2024 harus 0% tidak ada BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Dalam lingkup program/kegiatan, diperlukan pengembangan sarana akses sanitasi aman yang tersambung dengan SPAL-DT dan tersinkronisasi sampai tingkat daerah, yang diiringi perubahan perilaku hidup sehat di rumah tangga. Di sektor air minum, salah satu upaya yaitu melalui survey kualitas air minum dengan Tim Litbangkes Kemenkes untuk kemudian digunakan dalam penguatan basis perencanaan atau kelembagaan terkait.



Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP - Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen. Perumahan, Kementerian PUPR, mengungkapkan strategi sektor perumahan dalam menghadapi tantangan pemenuhan *backlog* perumahan sebesar 11 juta rumah tangga, termasuk pencapaian rumah layak huni. Skema pembagian target yaitu lima juta unit untuk dilaksanakan secara langsung melalui program pemerintah, dan enam juta unit melalui bentuk dukungan lainnya. Kebijakan yang didorong dalam Renstra yaitu meningkatkan akses terhadap Rumah Layak Huni (RLH) melalui kolaborasi dalam lingkup kerangka strategi Program 1 Juta Rumah yang didukung sistem regulasi yang harmonis untuk pelaksanaan Program 1 Juta Rumah. Serta program inovatif dalam mencapai target lima juta hunian melalui pengembangan hunian skala besar dengan prinsip hunian berimbang, dan sinkronisasi hunian vertikal dengan simpul-simpul transportasi.



Terkait dengan penanganan permukiman, Virgi mengangkat dua kasus penanganan yaitu di Kampung Akuarium Jakarta dan Kawasan Semanggi Surakarta. Kolaborasi seluruh pihak dan peran sentral pemerintah daerah menjadi kunci sukses program penanganan kawasan. Dendy dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, membagikan strategi program/kegiatan yang dicanangkan pemerintah dalam mendukung keterpaduan bidang PKP, antara lain peningkatan kualitas kawasan eksisting, pembangunan permukiman baru (seperti kota baru Maja), serta pembangunan kembali (seperti kasus di Palu). Khusus mengenai permukiman kumuh, pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali, salah satunya yang dijalankan dalam program NSUP/KOTAKU.

Meike Kencanawulan Martawidjaja ST, MDM – Kasubdit Perencanaan Teknis SPAM, mewakili Direktur Air Minum, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PUPR, menyampaikan program/kegiatan yang mendukung aspek keterpaduan terkait sektor Air Minum. Urusan pemerintahan konkuren dalam penyelenggaraan penyediaan air minum yang meliputi perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi, serta penyediaan air minum yang berkelanjutan di daerah dengan pendekatan basis ketersediaan air baku, sinkronisasi lokus dengan kegiatan pengembangan kawasan permukiman, dan kolaborasi pembangunan dalam menjamin penyelenggaraan tingkat hulu hingga ke hilir. Pilihan program yang dapat diakses oleh daerah antara lain Pamsimas, Program Padat Karya, SPAM Kawasan Kumuh, Hibah Air Minum, dan DAK Air Minum. Pemerintah daerah diharapkan dapat menghimpun berbagai sumber pembiayaan dan pendanaan yang berkelanjutan melalui berbagai skema, seperti KPBU, fasilitas pinjaman perbankan bersubsidi dan terjangkau untuk PDAM Sehat, dan hibah air minum. Berbagai program tersebut tentunya melalui koordinasi dengan Kemendagri dalam hal sinkronisasi dan pengelolaan program.



Terkait strategi program/kegiatan yang mendukung keterpaduan bidang PPAS, Drs. Budi Santosa, Msi - Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Ditjen. Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, mendorong Pemda yang memiliki PDAM, beserta pimpinan dan anggota legislatif di daerah untuk melakukan pelatihan khusus dalam rangka peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan kelembagaan di daerah dan didukung dengan mencukupi penyertaan modal. Menanggapi hal tersebut,

Virgi menekankan adanya tantangan keterlibatan legislasi anggaran daerah dari APBD sebagai penyertaan modal.



Diskusi dilanjutkan dengan pertanyaan dari peserta daerah. Bapak Edo dari Bappeda Provinsi Jawa Barat menyatakan adanya permasalahan terkait data, dimana banyak data sektoral ditingkat kabupaten/kota yang belum selaras dan terkoneksi dengan data program nasional. Hal ini perlu mendapat perhatian karena mempengaruhi lokus dan ketepatan intervensi program pemerintah. Pertanyaan lain juga muncul mengenai strategi mewujudkan sinkronisasi basis data, perencanaan, dan kelembagaan bidang PKP/PPAS, khususnya terkait kelembagaan dalam rangka integrasi berbagai jenis Pokja yang aktif di daerah (AMPL, PPAS, dan lainnya), yaitu dari Bapak Zainul dan Bapak Darma Widi dari program KOTAKU. Menjawab pertanyaan tersebut, Iwan dari Dit. SUPD II Kemendagri, mengatakan bahwa sinkronisasi sudah dimulai dari aspek dokumen perencanaan yang mengamankan prioritas kegiatan nasional. Dukungan regulasi yang sudah ada harus disertai komitmen dari pemerintah daerah dalam implementasinya. Terkait basis data, diperlukan upaya lebih mencapai sinkronisasi melalui forum koordinasi teknis di daerah membahas target pembangunan beserta data sektoral PPAS yang diperoleh bekerjasama dengan walidata Badan Statistik dan Kominfo. Adapun mengenai kelembagaan Pokja, diserahkan kepada masing-masing daerah bagaimana pengaturannya, dengan catatan harus ada nomenklatur, program, dan anggaran yang jelas dalam perencanaannya.

Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Via, Dinas PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut Via, di ibukota provinsi saat ini terjadi *urban sprawl* dan menjamurnya permukiman kumuh. Upaya pemda untuk melaksanakan konsolidasi membutuhkan dukungan berupa panduan operasional dari Kementerian terkait dari

tahap perencanaan hingga monitoring pelaksanaan konsolidasi tanah di permukiman kumuh. Dendy dari Direktorat Jendral Cipta Karya menanggapi bahwa lokasi di NTB dapat dicalonkan dalam program pencapaian target peremajaan 10 kawasan kumuh dalam RPJMN. Dari aspek regulasi dan panduan, dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan Kualitas Kumuh sudah disusun langkah-langkah peremajaan permukiman kumuh melalui konsolidasi tanah. Selain itu perlu juga bekerja sama dengan Direktorat Konsolidasi Tanah, Kementerian ATR/BPN. Dwityo dari Direktorat Jendral Perumahan mengemukakan hal serupa mengenai tantangan besar akses tanah yang terjangkau ditengah tren urbanisasi saat ini, khususnya bagi MBR. Strategi yang diperlukan mencakup integrasi sistem basis data perumahan dan infrastruktur, peningkatan peran Pokja di daerah, serta pemanfaatan instrumen RP3KP sebagai *grand design* perencanaan perumahan dan permukiman. Skema inovatif seperti penyediaan perumahan dengan pembiayaan non-APBN atau APBD melalui pengembangan BLUD dan BUMD, serta mendorong kemudahan perizinan untuk menciptakan iklim usaha perumahan yang lebih kondusif.

Herry dari Direktorat Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menekankan pentingnya membangun ekosistem bidang PPAS dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sebagai contoh dalam kerangka proyek KPBU. Dan untuk bidang PKP dalam integrasi sistem hulu-hilir dapat dibuat skema pembiayaan antara pusat, daerah, dan pihak lainnya. Menurut Virgi dari Bappenas, model intergrasi ini tercermin dalam program DAK Terintegrasi yang menggabungkan berbagai program dan pembiayaan dengan menyeleksi daerah yang memiliki kesiapan dari berbagai aspek. Adapun terkait konsolidasi tanah, pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan sebagai bagian dari program program pembangunan dan pengelolaannya, baik skala kecil yang didukung anggaran pemerintah maupun skala besar yang memerlukan skema kerja sama pembiayaan.

Pertanyaan lain datang dari peserta mengenai penanganan kumuh di atas tanah BUMN/BUMD, serta restrukturisasi kelembagaan Pokja PKP sesuai amanat Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020. Terkait tanah, Dendy dari Direktorat Jendral Cipta Karya menggarisbawahi pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mencari keputusan terbaik, apakah misalnya mealui pembebasan tanah atau penyerahan aset, guna mencapai harapan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pernyataan tersebut ditanggapi Virgi dari Bappenas mengenai peluang skema HGB di atas HP/HPL sebagai solusi penyediaan tanah. Sedangkan Dwityo dari Direktorat Jendral Perumahan merespon isu kelembagaan Pokja bahwa arah pengembangan ke depan pada pembentukan Forum Pokja sehingga melibatkan bukan hanya elemen pemerintah daerah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan yang ada, termasuk badan usaha. Forum ini akan terlibat dalam setiap tahapan perencanaan dan pembangunan bidang PKP/PPAS.

“Talkshow sesi pertama ini diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing narasumber. Dwityo berpesan bahwa kolaborasi merupakan kunci dalam mencapai target RPJMN dibidang PPAS.”

Sementara itu Iwan mengingatkan mengenai urgensi data dalam sinkronisasi antara pusat dan daerah yang dimulai dari perencanaan secara terpadu. Kemudian Herry mendorong penyiapan rencana aksi dengan kolaborasi pelaksanaan dan pembiayaan sebagai tindaklanjut dari penetapan dan internalisasi target bidang PPAS. Ely menyampaikan komitmen bidang kesehatan dalam menyiapkan data STBM dan kualitas air minum sebagai bagian dari upaya percepatan target nasional. Eduard sebagai perwakilan daerah ikut mendukung kolaborasi dan inovasi dalam penyelenggaraan PPAS, yang juga sesuai dengan visi gubernur Jawa Barat. Dan Virgi menyampaikan pesan penutupnya dengan kata kunci: data, kolaborasi, rencana aksi, dan inovasi.

BAB 4

PRAKTIK BAIK DAERAH



4.1 Provinsi Sumatera Selatan

Menurut basyar permasalahan dalam bidang perumahan di Provinsi Sumatera Selatan ada 2 yaitu *backlog* perumahan sebesar ± 485.000 unit dan rumah tidak layak huni sebesar ± 179.000 unit. Di Kota Prabumulih ada inovasi dimana Pemerintah Daerah melakukan Program Bedah Rumah (Peningkatan Kualitas) dengan menggunakan sumber dana tidak hanya melalui APBN tetapi juga melalui kolaborasi dengan Badan Zakat Nasional (Baznas), CSR dari Pertamina, potongan gaji karyawan Rp 10.000 – Rp 30.000 secara sukarela per bulan yang kemudian dikumpulkan untuk membantu memperbaiki rumah yang membutuhkan.

Lebih lanjut Basyar berpendapat bahwa terkadang Pemerintah hanya fokus dalam membangun atau meningkatkan sebuah rumah menjadi layak huni namun tidak dengan lingkungannya. Padahal sebuah rumah membutuhkan air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan infrastruktur lainnya sebagai sarana dan prasarana pendukung (multisektor), diperlukan kolaborasi dan integrasi antar sektor dalam penanganannya. Program Bedah Rumah harus benar-benar terintegrasi dan jangan dipindah per sektor agar komponen-komponen rumah layak huni dapat tercapai baik atap, lantai, dinding, luas bangunan maupun air minum dan sanitasinya.



Di Kota Prabumulih terdapat kelompok atau komunitas masyarakat pembersih jalan. Dengan sistem dan administrasi komunitas yang baik, mereka dapat mengkredit lahan dengan mengajukan ke koperasi. Lahan yang sudah siap pendataan *by name by address* akan difasilitasi untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Pemerintah daerah Sumatera Selatan juga berkolaborasi dengan meminta bantuan ke Pemerintah Pusat dan mendapat bantuan pembangunan sebesar 223 unit rumah. Setiap Dinas Teknis membantu untuk membangun infrastruktur lingkungannya seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan lainnya sesuai tupoksinya masing-masing.

Setelah sukses di prabumulih selanjutnya Sumatera Selatan juga melakukan inovasi di Kota Lubuklinggau. Ada sebesar 172 KK yang sudah mempunyai tanah dan kemudian Pemda bantu pembangunan rumahnya. Kemudian dilanjutkan untuk daerah lainnya yaitu di Musi Rawas sebesar 65 unit untuk Komunitas Pekerja Pariwisata dan di Banyuasin sebesar 71 unit untuk Komunitas Perawat Kerbau Rawa. Namun tidak semua daerah dapat berjalan dengan lancar, ada juga daerah yang belum berhasil ditangani seperti Kota Palembang. Di Palembang tercatat ada 1173 orang yang juga menginginkan punya rumah sendiri antara lain ada kelompok masyarakat pembersih jalan, pembersih sungai, dan peternak lele. Akhirnya Pemda menggunakan solusi lain yaitu dengan melalui konsep BP2BT.

Berdasarkan data riset yang dilakukan, *backlog* perumahan sebagian besar diisi oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang *non fixed income*. Sedangkan masyarakat yang berhak mendapat rumah di Indonesia tidak hanya PNS,

TNI dan Polri. namun selama ini Program FLPP hanya melayani masyarakat yang memperoleh *fix income*. Artinya ada tantangan terkait bagaimana menciptakan peluang agar masyarakat *non fix income* khususnya MBR bisa mendapatkan akses rumah. Ada 2 isu permasalahan dasar yang harus dicari inovasinya, yaitu terkait *Affordability* (kemampuan untuk kredit bank) dan *Access* (akses ke bank dimana harus berpenghasilan tetap).

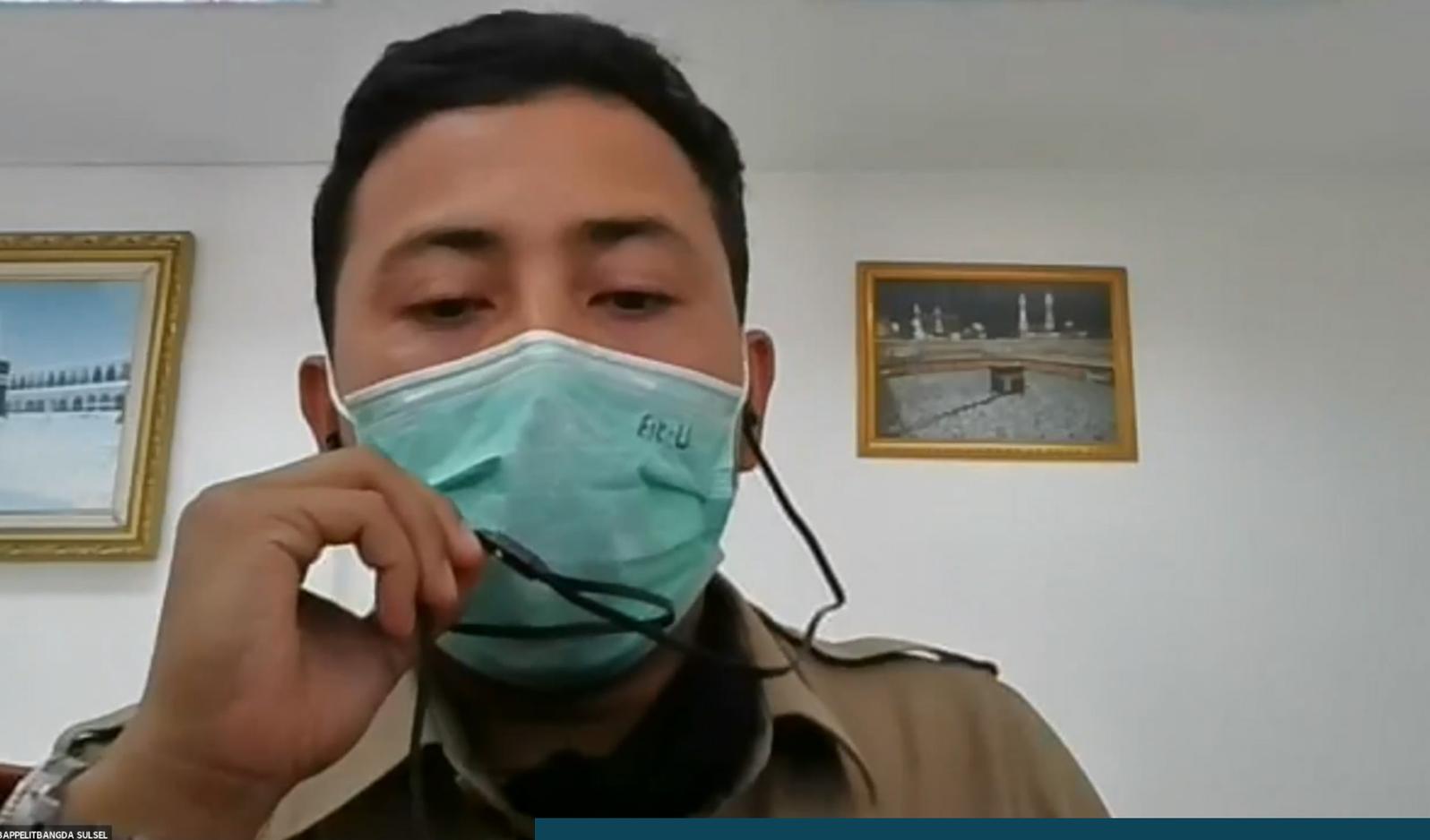
“Pemda Sumatera Selatan juga mengembangkan Program Penyediaan Rumah Berbasis Komunitas dengan menggunakan skema BCGS (Business + Community + Government + Social)”

Business artinya terjadinya atau terciptanya transaksi bisnis dari mulai membentuk Tabungan Anggota Komunitas, KPR Mikro Fasilitas dari BTN untuk pembiayaan pembelian lahan anggota komunitas, Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Koperasi Indoman atau LPDB (lembaga penyalur dana bergulir).

Community yaitu melalui sosialisasi rumah komunitas agar terbentuknya komunitas yang kuat, solid, terkordinir, memahami, mematuhi, siap bekerjasama, siap tanggung renteng dan siap berkomitmen. Untuk saat ini sudah terbentuk 11 Komunitas.

Government atau peran Pemerintah adalah a) memberikan dan mendapatkan kuota Rumah Komunitas melalui alokasi dana BSPS PB dari Pemerintah Pusat; b) memfasilitasi PSU bagi Jalan, drainase, Air dan Listrik; c) Bantuan Pasar, Rumah Ibadah, Bangunan Pendidikan dan lainnya; c) memberikan kemudahan dalam hal perizinan pembangunan perumahan komunitas; d) mengawasi pembangunan perumahan komunitas; e) melakukan seleksi dan verifikasi data yang masuk terkait usulan rumah komunitas.

Sekema yang terakhir adalah **Social**, yaitu berupa dukungan dan kerjasama Perusahaan BUMN/BUMD/Swasta dalam penciptaan kawasan dan lingkungan yang tertata, rapi, sehat, terpenuhi FASUM dan FASOS, Pasar, PAUD, Masjid, Business Center, Bank Sampah, Tanaman Hijau, serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan UMKM dan bantuan serta Program CSR/PKBL perusahaan.



4.2 Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam pemateri selanjutnya dari Perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Bapak Asdar menceritakan bahwa permasalahan yang dihadapi dan dijumpai Pemerintah Provinsi adalah adanya *backlog* perumahan, kurang minatnya masyarakat untuk pembangunan rumah susun yang telah dibangun, kebutuhan air bersih maupun air minum kurang memadai, dan masih ditemukannya kawasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu/RTLH).

Solusi yang ditawarkan dalam permasalahan tersebut terintegrasi melalui visi dan misi Provinsi yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Contoh dalam bidang PPAS sudah sesuai dengan salah satu misinya yaitu mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi untuk membenah permasalahan bidang PPAS dengan harapan penataan layanan kebutuhan dasar terpenuhi secara maksimal.

Capaian akses Provinsi Sulawesi Selatan untuk bidang PPAS cukup baik

angka capaiannya. Terhimpun data yang diperoleh untuk capaian akses bidang PPAS, sebagai berikut:

- ⊙ Akses rumah layak huni sebesar 51,37%;
- ⊙ Akses sanitasi layak sebesar 77,97% (termasuk akses sanitasi aman sebesar 2,50%);
- ⊙ Angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka sebesar 5,77%;
- ⊙ Akses persampahan yang terkelola sebesar 68,27%; dan
- ⊙ Capaian akses air minum layak sebesar 86.86% (dengan proporsi jaringan perpipaan sebesar 44,53% dan jaringan non perpipaan sebesar 29,55%).

Kolaborasi internal dan eksternal telah dilaksanakan Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu bentuk kolaborasi eksternal, diantaranya melibatkan mitra pembangunan atau jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), seperti: *twinning program* inisiasi FORKALIM, USAID IUWASH PLUS, SNV, UNICEF. Berbicara mengenai sanitasi, hal ini tak luput dari air limbah domestik. Berdasarkan data Pemprov Sulawesi Selatan, rata-rata pembangunan infrastruktur air limbah domestik yang terbangun berupa Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) belum termanfaatkan.

Provinsi Sulawesi Selatan telah menjadi peserta pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) pada tahun 2020 melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Berdasarkan arahan surat Kemendagri, Provinsi menetapkan 2 kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pendampingan, diantaranya: 1) Kabupaten Sinkai, 2) Kabupaten Wajo.

Adapun praktik baik dari pembelajaran yang didapatkan melalui Program PPSP yakni mengusulkan paket kebijakan. Paket kebijakan yang diusung oleh Kabupaten Sinjai memprioritaskan air limbah domestik dan persampahan yang dinamakan dengan **“SITINAJA”** (Sinjai Tertib Penanganan Tinja dan Sampah). Sedangkan paket kebijakan Kabupaten Wajo berfokus terhadap penanganan persampahan yang dinamakan **“Gerakan Masyarakat (Germas) Wajo Mapaccing Terintegrasi Stbm”**.

Sebagai bentuk rasa terima kasih atas partisipasi masyarakat atau Pemerintah Desa/Kabupaten/Kota, Pemprov Sulawesi Selatan memiliki wadah berbentuk penghargaan pembangunan bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang disematkan oleh pegiat sanitasi yang dinamakan dengan *Saoraja Awards*. Tujuan dari *Saoraja Awards*, diantaranya: (i) untuk mengapresiasi capaian-capaian kabupaten/kota dalam pembangunan layanan AMPL; (ii) wadah bagi kabupaten/kota untuk dapat melihat praktik baik dalam pembangunan AMPL.



4.2 Provinsi Jawa Tengah

Pemateri berikutnya dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, yakni Bapak Agung Tedjo Prabowo. Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan data informasi umum yang didapatkan melalui BPS Provinsi (2019), didapatkan bahwa jumlah penduduk yang berada di Provinsi Jawa Tengah sebesar 34.718.204 jiwa dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha.

Penanganan bidang PPAS di tingkat nasional, telah diturunkan melalui Perda No. 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Isu strategis yang dihadapi oleh Pemprov Jawa Tengah, diantaranya:

- ① Penanggulangan kemiskinan;
- ① Penguatan daya saing ekonomi daerah;
- ① Kualitas hidup dan daya saing S;
- ① Pengelolaan SDA-LH dan penanggulangan bencana.

Kolaborasi yang telah dilakukan Pemprov Jawa Tengah baik dari internal maupun eksternal. Pendampingan implementasi juga telah didapatkan melalui mitra pembangunan yang setia terhadap pembangunan layanan sanitasi aman dan berkelanjutan untuk semua. Implementasi Pusat, diantaranya: KOTAKU, Program PPSP, PAMSIMAS, dan mitra pembangunan, seperti: *World Bank*, IUWASH PLUS, KIAT), dan implementasi daerah, seperti: (SIMANIS CIKA, EHRA, Koordinasi, adanya bantuan keuangan).

“Provinsi Jawa Tengah telah memiliki sistem informasi berbasis web bidang air minum dan sanitasi yang dinamakan SIMANIS CIKA (Sistem Informasi Manajemen Air Minum dan Sanitasi Bidang Keciptakarya)”

Tujuan dari pengembangan sistem informasi SIMANIS CIKA, salah satunya adalah mempunyai sistem informasi berbasis SIG yang terintegrasi, terstruktur, dan terhubung dengan *Single Data System* untuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Dukungan Provinsi Jawa Tengah kepada kabupaten/kota dalam pencapaian target air minum dan sanitasi telah dilakukan dalam bentuk insentif (*reward*/penghargaan). Dukungan untuk air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya:

- ⊙ Pembangunan 3 spam regional (Bregas, Keburejo, dan Petanglong telah beroperasi untuk mendukung air minum curah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di perkotaan
- ⊙ Pembentukan 4.526 Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang telah diberikan peningkatan kapasitas berupa bimbingan teknis dan bantuan teknis kepada pengelola SPAM.
- ⊙ Fasilitasi implementasi SSK berupa paket kebijakan sanitasi yang telah disusun peserta pendampingan implementasi SSK tahun 2020, diantaranya: (i) Kabupaten Jepara (Jepara GASPOL/ Jepara Gegas Milah Sampah Ian Ngolah Limbah, dan (ii) Kabupaten Banyumas (BERLIMPAH BERKAH/Bersama Pilah Sampah dan Bersihkan Air Limbah)

Sebagai penutup Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan upaya pencapaian akses seperti merealisasikan sistem informasi SIMANIS CIKA untuk mendukung keprograman Pusat, menjalin kerja sama kemitraan, dan menjaga keaktifan Pokja PPAS dalam mendukung program-program bidang PPAS. Sinkronisasi dan penguatan

pembiayaan kreatif dapat dijadikan suatu fondasi mulai dari kebijakan pusat yang diturunkan ke Daerah (Provinsi-Kabupaten/Kota) untuk bersinergi dalam upaya pencapaian akses PPAS bagi masyarakat/permukiman.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, perlu juga untuk diperhatikan sebagai penindaklanjutan awal sesi panel praktik baik penyelenggaraan PPAS, diantaranya:

- ⦿ Optimalisasi pendampingan implementasi program sektoral Pusat dalam pemenuhan target PPAS di RPJMN 2020-2024;
- ⦿ Penyepakatan data terkait metodologi dan sumber data yang digunakan Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota dalam pemenuhan target bidang PPAS di RPJMN 2020-2024;
- ⦿ Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota dapat merekrut fasilitator secara mandiri (jika mampu pendanaannya);
- ⦿ Perlu adanya pengembangan sistem informasi pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi antara Pusat (K/L) dan Daerah (OPD) agar dapat terpantaunya capaian bidang PPAS yang aman dan berkelanjutan;
- ⦿ Optimalisasi skema dan inovasi alternatif sumber pendanaan non pemerintah dalam pembangunan PPAS yang berkelanjutan;
- ⦿ Optimalisasi skema pemberian penghargaan/insentif berbasis capaian kinerja kepada kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa dalam pembangunan PPAS di daerah.

BAB 5



5.1 Paparan Pengantar Diskusi

Nurul Wajah Mujahid

Kasubdit Perumahan
Kementerian PPN/Bappenas

Mengawali paparannya, Bapak Nurul Wajah menyampaikan mengenai adanya target nasional 70 persen rumah layak huni tahun 2020-2024 yang harus dipenuhi bersama, baik oleh pemerintah pusat, daerah, dan *stakeholder* pembangunan lainnya. Dalam rangka mencapai hal tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai strategi, kegiatan, *output*, hingga indikator yang perlu dipenuhi. Khusus untuk pemerintah daerah, Kementerian PPN/Bappenas melalui Pokja PPAS Nasional telah melaksanakan *kick off meeting* penetapan target pembangunan perumahan kepada seluruh provinsi di bulan Februari yang kemudian diikuti oleh *coaching clinic* serta *kick off meeting* regional selama hampir sepanjang tahun 2020. Hasilnya, 11 provinsi sudah menetapkan targetnya untuk bidang perumahan tahun 2020-2024.

Bapak Nurul Wajah menegaskan bahwa upaya sinergitas pusat-daerah tentunya tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya diperlukan langkah-langkah strategi untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan dengan memastikan adanya sinergisitas program/kegiatan antara pusat-daerah. Hal tersebut menjadi tujuan dari adanya Rakor Pokja PPAS Nasional yang diselenggarakan kali ini. Sesi diskusi kali ini diharapkan dapat menjadi ajang *sharing knowledge* dan *horizontal learning* antara pemerintah daerah sekaligus juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan dukungan yang diperlukan bagi daerah dalam melaksanakan program/kegiatannya.

“Dalam paparannya, Bapak Nurul Wajah juga menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat 10 (sepuluh) indikator pembangunan perumahan yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024. Seluruh indikator tersebut perlu didukung oleh program/kegiatan baik di pusat maupun di daerah”

Oleh karena itu, seluruh indikator tersebut dijadikan pegangan pemerintah pusat dan daerah dalam setiap pelaksanaan Rakortek Kemendagri setiap tahunnya. “Perlu dipastikan bahwa program/kegiatan yang ada di pusat dan daerah dapat mendukung secara langsung pencapaian indikator-indikator tersebut”, ujarnya.

Lingkup program perumahan dan permukiman dalam RPJMN 2020-2024 mencakup Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas. Bapak Nurul Wajah menjelaskan bahwa dalam lingkup pembangunan baru, pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan baru baik yang sifatnya berupa dukungan terhadap program pemerintah pusat (seperti rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus, dll), maupun menciptakan *enabling environment* bagi pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh badan usaha atau masyarakat. “Dalam kasus ini, bisa mencontoh Provinsi Jawa Barat yang menghubungkan penghuni Rusunawa pemerintah dengan akses kepemilikan rumah. Lalu juga ada Kabupaten Pohuwato yang memanfaatkan dana desa untuk penyediaan rumah layak baru, atau Provinsi Sumatera Selatan yang dengan segala jaringannya, dapat bekerjasama dengan pengembang, perbankan, dan LKNB untuk membangun perumahan skala besar bagi masyarakat pekerja informal”, jelasnya.

Terkait dengan program peningkatan kualitas, Bapak Nurul Wajah berpendapat bahwa fokus penanganan belum cukup komprehensif. “Hal yang menjadi tantangan di

sini adalah kita masih fokus dalam memperbaiki unit rumah, belum fokus pada upaya memperbaiki kawasan. Jadi kita masih fokus pada aladin itu (atap, lantai, dinding. Red), tapi lingkungan dan layanan infrastruktur dasarnya belum memadai dan teratur”.

Nurul menjelaskan bahwa untuk mendorong adanya upaya peningkatan kualitas permukiman yang komprehensif, Pemerintah mendorong melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi Tahun 2021 yang terdiri dari komponen lahan, infrastruktur dasar, dan bangunan rumahnya. “Semua komponen harus dilaksanakan secara terintegrasi, baik dalam rangka penanganan *in situ* atau pembangunan perumahan baru dalam rangka relokasi”, jelasnya. Nurul juga menekankan bahwa untuk memperoleh DAK Terintegrasi, seluruh pemerintah daerah yang berminat harus melalui proses penjangkaran atau kompetisi terlebih dahulu sehingga penting kiranya Pemerintah Provinsi dapat mendampingi kabupaten/kota di dalam wilayahnya untuk ikut serta. “Kami harapkan nantinya di masing-masing provinsi ada *pilot* untuk DAK ini. Bagaimana kawasan yang selama ini ‘mati gaya’ karena dana APBD tidak bisa masuk dapat ditangani melalui dana ini”, pesan Nurul. Salah satu Kota terpilih adalah Kota Surakarta yang melakukan peremajaan kawasan skala komunitas di HP 16 bagi 500 keluarga.

Hasil Pemetaan Awal Persepsi Pemerintah Daerah terhadap Program/Kegiatan

Dalam sesi pengantar, Bapak Nurul Wajah juga menyampaikan hasil kuesioner yang sudah disebarakan kepada seluruh peserta dan diisi sebelum acara berlangsung. Dalam kuesioner tersebut, peserta harus memilih pandangan mereka mengenai banyak program/kegiatan di bidang perumahan, apakah hal tersebut sangat sulit dilakukan, mungkin dilaksanakan, atau sangat dapat dilakukan. Kuesioner tersebut telah diisi oleh 18 provinsi dan 26 responden dengan hasil sebagai berikut:

1. Aspek Penyediaan Lahan.

- ⊙ Dalam aspek ini, responden pemerintah daerah menilai bahwa pola *land banking* dan pendayagunaan tanah wakaf merupakan pola penyediaan lahan yang paling sulit dilaksanakan. Sedangkan pola penyediaan lahan berupa pengadaan tanah, pemanfaatan tanah BMN/BMD, dan pendayagunaan tanah terlantar dinilai responden paling dapat dilaksanakan.
- ⊙ Provinsi Banten, Kalimantan Timur, Lampung, dan Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak memilih jawaban sangat sulit-sulit dilaksanakan untuk seluruh pertanyaan dalam aspek ini.
- ⊙ Provinsi yang paling banyak memberikan jawaban kategori “Sangat Dapat Dilaksanakan” adalah provinsi Sulawesi Barat.

2. Aspek Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh

- ⊙ Penegakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) permukiman kumuh, dan pembangunan drainase dinilai merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan.
- ⊙ Pembangunan jalan lingkungan merupakan program/kegiatan yang dinilai paling mudah dilaksanakan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh.
- ⊙ Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling banyak memberikan jawaban kategori “Sangat Sulit-Sulit” dalam setiap pertanyaan. Sedangkan Kalimantan Selatan, Lampung, dan Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak memilih kategori jawaban “Dapat-Dapat Dilaksanakan” dalam seluruh pertanyaan di aspek ini.

3. Aspek Pengembangan Perencanaan dan Sistem Pembiayaan

- ⊙ Kredit mikro perumahan merupakan program yang dianggap paling dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan program dana bergulir perbaikan rumah skala komunitas dan pemberian subsidi (baik kepemilikan rumah atau bahan bangunan) merupakan program yang dianggap paling sulit dilaksanakan.
- ⊙ Provinsi Riau, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan provinsi yang menjawab pengembangan pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan merupakan program yang dapat dilaksanakan. Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Maluku Utara merupakan pemerintah provinsi yang paling banyak menilai bahwa aspek ini merupakan hal yang sulit dilakukan.

4. Aspek Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah

- ⊙ Pendampingan teknis perumahan swadaya, peningkatan kualitas RTLH, dan pengawasan konstruksi merupakan program yang dinilai paling dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- ⊙ Penerapan teknologi bahan bangunan alternatif, insentif pajak, dan fasilitas kredit konstruksi merupakan program yang dinilai paling sulit dilaksanakan.
- ⊙ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Riau, Maluku, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan mayoritas jawaban “Dapat-Sangat Dapat Dilaksanakan” dalam setiap pertanyaan di aspek ini. Sedangkan Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku adalah provinsi yang paling banyak menjawab kategori “Sulit-Sangat Sulit Dilaksanakan” dalam setiap pertanyaan.



5.2 Pelaksanaan FGD Strategi Pencapaian Target Daerah Bidang Perumahan

Diskusi dalam sesi ini dibagi ke dalam dua segmen. Segmen pertama fokus pada pembahasan aspek penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Sedangkan segmen kedua membahas aspek pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan serta pembangunan baru serta peningkatan kualitas rumah. Sesi ini ditujukan sebagai ajang *horizontal learning* antara pemerintah provinsi yang belum dan telah memiliki program. Selain itu, hasil diskusi juga akan bermanfaat dalam memetakan isu, tantangan, potensi, serta dukungan yang diperlukan dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah.

Segmen pertama dipandu oleh Bapak Oswar Mungkasa selaku pejabat fungsional di Kementerian PPN/Bappenas. Pengalaman beliau yang sangat mumpuni

dalam bidang perumahan dan permukiman, pertanahan, dan tata ruang, baik di tingkat pusat ataupun daerah menjadi latar belakang terpilihnya beliau untuk memoderatori segmen pertama. Sedangkan segmen kedua dipandu oleh Bapak Encep Marsadi, seorang ahli di bidang perumahan dan permukiman dan juga mengetuai berbagai asosiasi perumahan dan permukiman, baik di tingkat pusat maupun daerah.

5.2.1 Aspek Penyediaan Lahan

Dalam memulai diskusi terkait aspek penyediaan lahan, Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan tantangan penanganan permukiman kumuh di daerah pesisir, khususnya di wilayah pasang surut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kesulitan untuk melakukan relokasi karena penduduk setempat tergolong sebagai masyarakat adat yang secara turun temurun tinggal di perairan. Selain itu, Pemprov Sulawesi Tenggara juga mempertanyakan mengenai payung regulasi dan tata cara untuk pemanfaatan tanah adat bagi kepentingan relokasi program pemerintah provinsi.

Menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Ruminah selaku Kasubdit Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah I, Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa pengelolaan tanah di kawasan pesisir/ sempadan pantai sudah diatur oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 dimana salah satunya mengatur tentang masyarakat adat yang memiliki budaya tinggal di pesisir. Berdasarkan Permen tersebut, masyarakat adat dapat dianggap sah tinggal di badan air hanya jika memenuhi syarat tertentu.

“Masyarakat adat dapat diberikan hak jika memang budayanya secara turun temurun tinggal di badan air serta tiang pancang bangunan dipastikan berada di dasar air atau menyentuh tanah di dasar air. Ini dimungkinkan diberikan hak berjangka, yaitu berupa hak pakai”, jelas Ruminah.

Namun, Ruminah juga menekankan mengenai perlunya mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti apakah kondisi permukiman berbahaya atau membahayakan masyarakat, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam apakah masyarakat perlu direlokasi atau tetap diizinkan tinggal di wilayah semula.

Selanjutnya mengenai pemanfaatan tanah adat untuk keperluan relokasi, Ruminah menerangkan bahwa tanah adat atau komunal sejatinya adalah milik masyarakat sehingga pemanfaatan untuk relokasi permukiman diperbolehkan asalkan masyarakat selaku pemilik lahan setuju untuk menghibahkan lahan tersebut kepada pemerintah.

Selain Sulawesi Tenggara, Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Utara juga berbagi pengalaman mengenai kegiatan *land banking* dan konsolidasi lahan. Berdasarkan pengalaman kedua provinsi tersebut, proses *land banking* hanya bisa dilakukan jika masyarakat sendiri yang secara berkelompok melaksanakan pengadaan tanah. Pihak pemerintah provinsi kesulitan dalam menyediakan lahan karena terhalang oleh kewenangan yang ada di dalam regulasi pemerintah daerah seperti UU 23/2014 dan Permendagri 90/2019, yaitu hanya terbatas untuk pengadaan lahan bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah. Pengadaan lahan juga selalu membingungkan bagi pemerintah daerah untuk lokasi permukiman kumuh yang terletak di tepi sungai, dimana sungai tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Menanggapi isu yang disampaikan terkait *land banking* dan konsolidasi lahan, Ruminah menjelaskan bahwa konsolidasi tanah di lahan yang dimiliki oleh masyarakat, maka selama masyarakat setuju untuk dikonsolidasi maka KT dapat dilaksanakan. Namun, tentunya untuk mencapai kesepakatan tersebut, perlu ada komitmen daerah yang kuat. Untuk *land banking*, Ruminah juga sangat berharap agar RPP Bank Tanah segera disahkan, "Karena salah satu tugas bank tanah yaitu menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum dan sosial", ujarnya.

Dalam hal kewenangan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penyediaan lahan berupa *land banking*, Bapak Ali Irmanda, Kepala Seksi Wilayah II Subdit PKP Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa pihaknya belum terlalu mendalami mengenai payung regulasi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut di luar peruntukan relokasi bencana. Namun, untuk kegiatan relokasi Ia menjelaskan dapat dilakukan jika kegiatan tersebut dilakukan untuk menghindari permukiman dari bencana. Ia juga menambahkan bahwa jika relokasi permukiman di tepian sungai dilakukan atas dasar inisiatif provinsi, maka hal tersebut termasuk ke dalam program provinsi walaupun area permukiman berada di wilayah sungai yang menjadi kewenangan nasional.

Sebagai alternatif penyediaan lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan banyak alternatif yang bisa dilakukan selain mengandalkan pola-pola konvensional yang bergantung kepada pemerintah. Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemprov Sumut adalah dengan mendorong pembentukan komunitas-komunitas agar masyarakat dapat melakukan pengembangan perumahan berbasis komunitas

dengan menyediakan lahan sendiri. Selain itu, untuk mendorong *security of tenure* berupa sertifikasi Hak Atas Tanah, pemerintah provinsi juga dapat menghubungkan program pembangunan baru atau peningkatan kualitas dengan program sertifikasi yang ada di BPN. “Di tahun 2019, kami melakukan rehabilitasi RTLH di sebuah desa Kabupaten Asahan. Dari sana kami koordinasi ke Kanwil Sumut bahwa rumah tersebut belum memiliki sertifikat dan kemudian dibantu sertifikasinya”, ujar Bapak Marianto, dari Dinas PKP Sumatera Utara.

Menutup sesi diskusi dalam aspek penyediaan lahan, Oswar Mungkasa menyimpulkan bahwa dalam hal penyediaan lahan, komitmen kepala daerah menjadi sangat penting. Selain itu, tidak ada satu kegiatan tanpa adanya kolaborasi. Komunikasi juga menjadi penting terutama dalam mengelola komitmen pemerintah daerah. Dalam hal ini peran Pokja sangat dibutuhkan untuk menjamin kolaborasi dan komunikasi berlangsung.

5.2.2 Aspek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Dalam diskusi mengenai aspek ini, beberapa isu yang mengemuka adalah terkait kolaborasi, persoalan lahan, dan sinergisitas data. Terkait dengan kolaborasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa masih banyak hal-hal yang belum sinkron, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, “Sebagai contoh, kita di Sumut untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman, kemudian Cipta Karya ada di Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang. Karena di Sumut mengikuti UU 23/2014 yaitu dipisah antara PKP dan Cipta Karya. Sering terbenturnya di situ dalam UU 23/2014 terpisah tapi ketika mau dikerjakan PSU dengan Cipta Karya kegiatannya mirip”, ujar Bapak Marianto dari Dinas PKP Sumatera Utara. Di satu sisi, ujar Marianto, kolaborasi antar OPD di Provinsi Sumatera Utara juga sangat minim, Pokja PKP pun belum berperan secara signifikan dalam menyelesaikan isu kolaborasi tersebut.

Isu mengenai kolaborasi juga disampaikan oleh perwakilan dari Dinas PKP Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau menyatakan bahwa kolaborasi di pemerintah pusat dalam penanganan permukiman kumuh sendiri masih sangat minim, “Penanganan kumuh di Sulteng itu harus tuntas dari segi PSU dan rumahnya. Setiap Konreg Cipta karya selalu ditekankan mengenai keharusan integrasi lokasi antara program BSPS dari Ditjen Perumahan dan penyediaan PSU dari Cipta Karya, tanpa disadari bahwa konsep penanganan antara keduanya berbeda”, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa segala persoalan yang disampaikan di Konreg Kementerian PUPR tidak pernah diselesaikan

di lapangan karena masing-masing Ditjen juga memiliki balai yang berbeda di daerah.

Menanggapi persoalan yang disampaikan oleh Pemprov Sumatera Utara, Bapak Dendy Kurniadi, Subkoor Plt. Perencanaan, Program, dan Anggaran Kementerian PUPR menjelaskan bahwa isu *overlap* PSU antara Dinas Cipta Karya dan Dinas PKP merupakan isu yang sudah lama bergulir sejak diterbitkannya UU 23/2014. Dendy menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, pada saat penyusunan UU tersebut, Kementerian PU (sebelum bergabung dengan perumahan rakyat. Red) menolak gagasan bahwa penanganan permukiman kumuh seakan dijadikan bagian yang terpisah dari penanganan perumahan dan permukiman karena mempertimbangkan sifat penanganan kumuh yang sangat multisektor, “Tetapi rekan kami dalam Kementerian Perumahan Rakyat menghendaki adanya perbedaan dalam penanganan permukiman kumuh”, ujarnya. Oleh karena itu, dalam menanggapi persoalan *overlap* PSU tadi, Dendy mengatakan bahwa pihaknya perlu melakukan *review* lebih lanjut. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa pada dasarnya saat ini di tingkat pemerintah pusat, kolaborasi antar sektor untuk penanganan kumuh sedang terus ditingkatkan dan diharapkan hal tersebut juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa melihat batasan kewenangan. “*Spirit*-nya penanganan kumuh adalah persoalan bersama dan kolaborasi bersama, berapapun luasnya itu adalah persoalan kita bersama baik pusat, provinsi, dan kab/kota”, tegasnya. Hal senada juga diucapkan oleh Bapak Ali Irmada dari Kementerian Dalam Negeri., “harusnya dengan perbedaan OPD tidak harus menjadi masalah terkait pelayanan dan pelaksanaan program PKP di daerah karena tinggal masing-masing OPD menguatkan lagi koordinasinya,” tegas Ali.

Lebih lanjut mengenai kolaborasi antara BSPS dan program PSU, Dendy menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah pusat berusaha menyediakan berbagai program untuk bisa diintegrasikan dalam rangka penanganan permukiman kumuh, namun mempertimbangkan keterbatasan pemerintah pusat dalam mengetahui kondisi lapangan, maka proses integrasi di daerah diharapkan dapat didorong oleh pemerintah daerah itu sendiri. “Intinya kami di sini berusaha memberikan ruangnya dengan dukungan berbagai sektor juga. Integrasi di daerah hendaknya dilakukan oleh kab/kota”, ujarnya. Dalam mendorong integrasi tersebut, pemerintah juga mendorong adanya kegiatan penanganan permukiman kumuh yang sudah berupa satu paket terpadu, yaitu melalui adanya DAK Terintegrasi. DAK Terintegrasi ini yang menjadi *piloting* untuk penanganan permukiman kumuh secara bersama-sama, dimana di dalamnya terdapat komponen PB-BSPS, dan juga pembangunan PSU yang dilakukan oleh Cipta Karya.

Dalam menghadapi isu kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur juga memberikan pengalamannya. Menurutnya, banyak program pusat yang bisa diarahkan untuk penanganan permukiman kumuh di daerah. “Program

seperti KOTAKU, BSPS, dan PSU itu semuanya bisa diintegrasikan. Bahkan di Jawa Barat dan Jawa Timur, kami juga bekerjasama dengan Kodam untuk penanganan rumah tidak layak huni”, ujar Edo dari Provinsi Jawa Barat. Ke depan, Ia menambahkan bahwa dukungan pemerintah pusat tetap dibutuhkan, namun diharapkan dapat lebih tajam dimana ada suatu program yang sudah mencakup seluruh unsur pembentuk kumuh.

Selain persoalan kolaborasi, persoalan lahan juga menjadi isu yang mengemuka pada saat pelaksanaan diskusi. Hal ini dikemukakan oleh perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali. “Bagaimana dukungan pemerintah pusat khususnya pelaksanaan penataan kampung yang berada di lahan-lahan milik pemerintah pusat atau BUMN, contoh milik PJKA, kolong tol, Pertamina, Kementerian dan lain-lain?”, tanya Ibu Hera, dari Bappeda DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Bapak Dendy juga belum dapat memberikan tanggapan pasti karena sejauh ini pun banyak proyek pemerintah pusat yang terkendala di persoalan lahan, “Status lahan yang sangat pelik, contohnya permukiman kumuh di Bengkulu yang sampai sekarang status lahan milik Pelindo masih menjadi persoalan besar sampai sekarang masih terjadi. Lalu banyak permukiman kumuh yang berada di lahan BUMN seperti di Sabang dan kawasan lainnya, bahkan saat ini kami membangun di KSPN Labuan Bajo lahan yang kami gunakan adalah milik Kementerian Perhubungan jadi ada zona dermaga yang akan kita bangun, ini pun belum jelas bagaimana nanti serah terima asetnya. Kami rasa nanti perlu juga peran dan solusi dari Kementerian ATR/BPN apakah nanti akan dilegalisasikan dan akan diberikan kepada pemerintah daerah atau seperti apa. Karena berdasarkan pengalaman kami di lapangan persoalan ini masih terkendala dengan masalah lahan ini”, jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Ibu Ruminah dari Kementerian ATR/BPN juga menyampaikan bahwa persoalan mengenai lahan-lahan milik pemerintah atau BUMN bisa dimanfaatkan asalkan mendapat izin dari Kementerian Keuangan selaku pemegang izin pemanfaatan BMN. Selain itu, memang dinilai perlunya ada panduan dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang memiliki inisiatif penanganan permukiman kumuh di berbagai tipe lahan.

Terakhir, data kumuh juga menjadi isu lain dikarenakan pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk melakukan *update* terus menerus terhadap SK Kumuh beberapa kali dalam setiap tahun. Hal itu dinilai membuat pemerintah provinsi tidak pernah memiliki *baseline* yang pasti mengenai penanganan kumuh yang harus dituntaskan. “Sedangkan pemerintah daerah berpikir jika kumuh hilang maka uang hilang. Daripada uang hilang, lebih baik kami membuat lagi SK Kumuh baru”, kata Bapak Udi dari perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal berbeda terkait data juga disampaikan oleh Bapak Edo dari Bappeda Jawa Barat yang menyatakan kebingungannya terhadap data kumuh, “Data kumuh yang disampaikan di SK itu lebih cenderung kepada luas administratif, padahal kalau di lapangan luas kumuh itu tergantung DED. Ini menyulitkan proses integrasi dan juga *update* penanganan kumuh itu sendiri”, ujarnya.

Dalam merespon pertanyaan tersebut, Bapak Dendy menjawab bahwa pada dasarnya *review* terhadap SK Kumuh dilakukan dalam rangka pemantauan pengurangan kawasan kumuh, “Jadi kata kunci yang harus kita *highlight* adalah SK baru yang muncul dalam rangka pengurangan kawasan kumuh, jika ada SK baru yang muncul dan hektarnya bertambah ini yang menjadi pertanyaan di kami”, ujarnya. Ia juga tidak menampik adanya fenomena bahwa daerah berlomba-lomba untuk mendapatkan program KOTAKU. Ia bercerita bahwa sepanjang tahun 2015-2019, dari semula ditetapkan 38.431 Ha kawasan kumuh di Indonesia dalam RPJMN, nyatanya banyak daerah yang terus menerus meng-update SK nya sehingga kumuh mencapai 90.000 Ha. “Hal ini yang mengejutkan karena begitu massive-nya program Kotaku jadi yang tidak kumuh pun berlomba-lomba untuk mendapatkan program ini”, kata Dendy. Merespon pertanyaan pemerintah daerah, Bapak Ali Irmada dari Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa perencanaan diharapkan bisa lebih fokus terhadap baseline yang sudah ditetapkan, namun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan kawasan kumuh baru seiring dengan dinamika atau pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sehingga kawasan kumuh baru terus muncul. Oleh karena itu, Ali menegaskan bahwa selain melakukan upaya penanganan, pemerintah daerah juga harus berupaya untuk melakukan pencegahan kumuh. “Saya lebih mendorong tidak hanya penuntasan terhadap kumuhnya, tapi juga kepada pencegahan kumuhnya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pencegahan kumuh juga ada dalam nomenklatur yang sudah bisa disusun oleh Pemda dan itu mungkin bisa dilakukan agar tidak ada penambahan lokasi kumuh yang baru”, tegasnya.

Dalam akhir sesi diskusi aspek peningkatan kualitas kumuh, Oswar Mungksa menegaskan kembali bahwa data merupakan hal penting untuk integrasi di lapangan, namun tetap perlu diikuti oleh survey primer dan peta spasial yang memadai. Kedua, rencana penanganan kumuh yang telah disusun oleh pemerintah daerah harus diikuti oleh rencana aksi yang sudah disusun dalam semangat kolaborasi, tidak lagi sektoral melainkan sudah membentuk paket-paket terpadu yang utuh. Ketiga, pentingnya aspek pencegahan permukiman kumuh dibandingkan hanya fokus pada upaya penanganan, karena penduduk perkotaan akan terus bertumbuh dan harus ada upaya untuk mengakomodasi pertumbuhan tersebut. Terakhir, peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan perumahan merupakan hal yang sangat krusial terutama dalam menyelesaikan persoalan kolaborasi antar sektor. Untuk itu, Oswar menekankan pentingnya peran Pokja PKP di daerah.

5.2.3 Aspek Pendanaan dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan

Dalam membuka diskusi segmen kedua mengenai aspek pendanaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan, Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa banyaknya masyarakat yang belum dapat membeli dan memiliki rumah dikarenakan akses KPR yang sulit dan seringkali ditolak. Salah satu faktor penyebab utamanya yaitu pendapatan masyarakat yang belum berpenghasilan tetap “di Bengkulu cukup luas lahan dan perumahan cukup banyak, sebenarnya *developer* juga memiliki lahan dan rumah yang *ready stock* tapi karena banyak masyarakat yang mengusulkan penghasilannya tidak tetap jadinya ditolak sehingga bank belum yakin untuk memberikan kredit perumahan, terlebih rata-rata masyarakat Bengkulu penghasilannya tidak tetap”, ujar Bapak Afredes dari Bappeda Provinsi Bengkulu.

Menanggapi isu tersebut Bapak Agus Sulaeman, Kasubdit Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR menjelaskan bahwa masalah tersebut idealnya dapat diatasi dengan program *housing micro finance* ataupun KPR mikro swadaya yang juga disertai dengan pendampingan dari pemerintah daerah kepada masyarakat penerima manfaat, “melalui program KPR mikro swadaya rumah dapat dibangun atau diperbaiki sendiri tanpa bantuan *developer*. Selain itu harus adanya pendampingan dari satu lembaga dinas atau apapun untuk menyiapkan SDM dan RAB serta mengontrol kualitas bangunannya”, ujar Agus.

Pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Muhammad Aksa yaitu adanya keterbatasan nomenklatur program untuk pembiayaan rumah MBR di UU 23/2014 dikarenakan kewenangannya berada di pusat sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan program tersebut, “pembiayaan perumahan untuk MBR itu kewenangan pusat jadi kami di pemerintah daerah untuk berinovasi mendorong pembangunan rumah itu cukup sulit, kita cuma program bencana alam makanya kami cukup terbatas dengan UU 23/2014 jadi pemerintah daerah terutama provinsi butuh kebijakan yang bisa mendukung program bencana alam atau relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi”, jelasnya. Aksa juga berharap bahwa ke depannya akan ada penyelarasan antara UU 1/2011 dan UU 23/2014 2014 terkait program pembangunan dan perbaikan rumah bagi MBR.

Menanggapi hal ini Bapak Ali Irmada, Kasi Wilayah 1 Subdit Perumahan dan Kawasan Permukiman mengakui bahwa isu harmonisasi UU 1/2011 dan UU 23/2014 terkait program pembangunan rumah bagi MBR menjadi isu yang panjang dan

sering kali dibahas. Ia juga menjelaskan bahwa permasalahan ini hanya terkait antara koordinasi dan pembagian kewenangan pusat dan daerah, “dari sisi sinkronisasinya, memang secara regulasi ini diatur menjadi kewenangan pusat otomatis nanti daerah tinggal berkoordinasi dengan pusat apa yang akan dibangun dan apa yang perlu didukung oleh daerah, misalnya daerah mendukung PSU atau daerah bisa mendukung kemudahan perizinannya dengan perumahan MBR ini atau penyediaan lahannya”, ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa semua UU sektoral akan mengikuti UU 23/2014 semenjak diterbitkannya UU tersebut.

Selain itu adanya pertanyaan tambahan dari perwakilan Pokja PPAS Nasional yaitu Ibu Tiara Anggita menanyakan apakah terdapat payung regulasi untuk mengembangkan sistem subsidi perumahan dari APBD ke FLPP untuk pengembangan *housing micro finance* karena saat ini dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya hanya terbatas pada sosialisasi mekanisme FLPP dan pembiayaan perumahan baru. Menanggapi hal tersebut Bapak Ali Irmada mengatakan bahwa pihaknya akan mengecek kembali pada Permendagri 90/2019 junto Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020. Ia juga mengatakan bahwa jika hal tersebut perlu dilakukan untuk dimutakhirkan dengan dasar yang kuat tidak menutup kemungkinan Kementerian Dalam Negeri dapat menambahkan nomenklatur program/kegiatan baru terkait pembiayaan perumahan agar dapat dilaksanakan di daerah.

Dalam menghadapi permasalahan pembiayaan perumahan, Provinsi Jawa Barat membagikan pengalamannya tentang rencana perluasan akses dan penambahan kuota dana FLPP. Hal ini disampaikan oleh Heni perwakilan dari Dinas Permukiman Jawa Barat. Ia mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat melakukan kerjasama dengan PPDPP untuk pembiayaan perumahan agar mempercepat target pencapaian rumah layak huni. Program ini juga ditujukan untuk para penghuni apartemen transit yang mana diharapkan nantinya dapat memiliki rumah dengan bantuan subsidi perumahan. Hal ini sejalan dengan konsep *housing career* yang mana lulusan dari apartemen transit dapat memiliki rumah sendiri dengan bantuan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan program subsidi FLPP. Bentuk kerjasama dengan PPDPP dilakukan melalui penyertaan dana provinsi dimana adanya sumbangan dari PPDPP dan Provinsi Jawa Barat yang akan dikelola oleh suatu lembaga keuangan bank, “awalnya PPDPP mengajak kami Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan memberikan *booster* pembiayaan perumahan agar mempercepat pencapaian target rumah layak huni. Kemudian kita juga mengawinkan bantuan ini untuk kegiatan lainnya misalnya pengelolaan rusun dan para penghuni apartemen transit. Program ini mendukung *housing career* juga mereka yang tidak punya rumah kemudian dapat menempati apartemen transit Jawa Barat lalu kita arahkan mereka untuk mendapatkan bantuan tersebut karena kurang lebih kelompok sasarannya sama”, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa saat ini bantuan FLPP masih diperuntukan untuk kalangan masyarakat MBR formal ataupun masyarakat yang tergolong MBR. Ia mengaku bahwa

saat ini masih sedang dilakukannya pengkajian terkait formula pengelolaan dan perbankan untuk sumber pendanaan tetap dan tidak tetap.

Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat, Agus menyampaikan bahwa program pemerintah untuk KPR FLPP akan didukung dana dari pos investasi pemerintah dari APBD Jawa Barat yang mana tidak hanya menyasar pada sektor formal saja tapi non formal bisa mengakses program tersebut walaupun persinya hanya di bawah 10%. Adapun skema dalam kerjasama ini yaitu dana investasi tersebut akan disimpan di bank di Bank BPD Jawa Barat. Selain itu Agus juga mengatakan bahwa dalam menjalankan subsidi perumahan diperlukan lembaga keuangan bank yang mempunyai pengalaman dalam pemberdayaan contohnya yaitu Bank BTPN dan Bank BRI, "Pengalaman saya kerjasama ke Bank BTPN dan ada bisa juga Bank BRI karena bisnisnya ke situ yaitu penyaluran pembiayaan yang sifatnya kecil-kecil kepada masyarakat, cuman ditambahin satu komponen yaitu sektor perumahan". Agus mengatakan bahwa untuk program KPR mikro saat ini sedang melakukan penjajakan dengan bank BTPN yang rencananya tahun depan akan menyalurkan bantuan sebanyak 5.000 unit rumah. Hal ini juga menjawab pertanyaan dari perwakilan Gorontalo yang menanyakan program pembangunan rumah BP2BT apakah akan lebih fokus kepada rumah tapak yang dibangun oleh *developer* atau rumah swadaya. Agus menjelaskan keduanya dapat difasilitasi tergantung pada intermediasi lembaga penyalurnya dan pastinya diperlukan lembaga keuangan yang sudah terbiasa memberikan bantuan pinjaman bersifat pemberdayaan masyarakat.

Selain Jawa Barat, Provinsi Sumatera Selatan juga telah melakukan program pembiayaan perumahan untuk para komunitas baik formal maupun informal. Program ini dimaksudkan untuk mendorong para anggota komunitas informal seperti pemulung, *cleaning service*, *Grab*, dan lain-lain tetap dapat difasilitasi melalui pembangunan rumah sampai skala besar dengan harga rumah di bawah 100 juta. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan pihak *developer*, Koperasi Indoman, dan pihak bank dalam penyediaan perumahan Rumah Layak Huni dengan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Hal ini diharapkan dapat menjadi suatu *best practices* dan alternatif solusi terkait pembiayaan perumahan untuk daerah-daerah lainnya.

Dalam menutup sesi ini Encep menyampaikan bahwa skema pendanaan untuk informal dapat dilakukan menggunakan skema *housing micro finance* serta diperlukan lembaga keuangan bank yang tepat dan memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat. Kedua kunci sukses dalam sesi ini adalah *political will* dan komitmen yang kuat pemerintah daerah melaksanakan program sehingga melahirkan dorongan untuk dapat terus berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan dan melaksanakan model atau skema pendanaan dan pembiayaan perumahan demi mencapai target rumah layak huni.

5.2.4. Aspek Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni

Dalam membuka sesi ini perwakilan Sumatera Utara Bapak Marianto menyampaikan bahwa tidak terdapatnya menu untuk program pembangunan baru rumah komunitas, khususnya untuk penanganan kumuh. Di dalam Permendagri 90/2019 program hanya mengarah kepada relokasi bencana dan relokasi program pemerintah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suci perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, Ia mengungkapkan bahwa saat ini mereka terbatas untuk melakukan program pembangunan baru karena tidak ada payung regulasinya “kita hanya bisa berharap kepada teman-teman pusat, kalau kita di daerah terbatas hanya kepada relokasi program pemerintah dan relokasi korban bencana itu yang bisa kita lakukan untuk pembangunan baru”, ujar Suci.

Menanggapi isu tersebut Bu Mita, Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan Kementerian PUPR menjelaskan bahwa berdasarkan arahan pimpinan program pembangunan baru untuk penanganan rumah komunitas saat ini akan lebih difokuskan kepada peningkatan kualitas, “Di awal kita sudah mencoba untuk menyiapkan program baru melalui BSPS PB di lahan-lahan masyarakat komunitas tadi. Tapi ini ada arahan yang berbeda sehingga kami belum bisa mengembangkan yang pembangunan baru untuk penanganan rumah komunitas karena keterbatasan kami di pemerintah memilah-milah mana yang menjadi program di pusat. Jadi program untuk komunitas tetap ada tapi penanganannya dengan peningkatan kualitas yang pendekatannya melalui pengembang termasuk membangun PSU-nya”, ujarnya. Terkait payung regulasi pembangunan baru dan rumah komunitas, Pak Ali Irmada mengatakan bahwa memang adanya pembatasan pembagian kewenangan dalam UU 23/2014, Ia juga menjelaskan bahwa hal tersebut tidak membatasi pemberian layanan kepada daerah yang mana dapat dilakukan dengan sinkronisasi dan kolaborasi program melalui Muserembang atau Rakortek, “Misalnya provinsi melakukan bantuan yang sebenarnya merupakan kewenangan kabupaten/kota itu bisa melalui bantuan keuangan atau bantuan sosial, padahal itu bukan suatu kewenangan dari masing-masing tingkatan. Untuk mendukung pelaksanaan program perlu ditingkatkan lagi kolaborasi dan koordinasinya”, ungkapnya.

Selain itu Marianto juga menyampaikan terkait program rumah khusus nelayan yang tidak termuat di peraturan. Marianto mengungkapkan bahwa yang dimaksud golongan khusus yang mendapatkan bantuan hanya masyarakat yang masuk golongan 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal. Red). Sedangkan menurutnya nelayan di sana termasuk kategori yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Terkait program rumah khusus, Mita menjelaskan bahwa sasarannya bukan pada profesi atau jenis

pekerjaannya melainkan berdasarkan kawasan “Sasarannya bukan pada profesi tapi ke lokasi studinya yaitu perbatasan, pulau-pulau terluar, dan untuk penanganan bencana”, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa akan dilakukan revisi Permen terkait target bantuan untuk sasaran penerima manfaat pada definisi rumah khusus dalam UU 1/2011.

Selanjutnya sesi diskusi dilanjutkan dengan pertanyaan dari perwakilan Provinsi Jawa Timur Bapak Suci Purnomo yang menyampaikan permasalahan terkait penyusunan dokumen pembangunan perumahan RP3KP. Suci menyampaikan bahwa saat ini belum jelasnya pembagian tugas dan wewenang dalam penyusunan RP3KP yang mana dalam Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa tidak ada amanah provinsi menyusun RP3KP dan RKP untuk pembangunan perumahan lintas kab/kota, “kalau amanat UU 1/2011 kita diminta menyusun dokumen RP3KP yang lintas kabupaten/kota yang di provinsi. Hal ini menjadi pertanyaan bagi kita bahwa rencana pembangunan yang lintas kabupaten/kota itu yang seperti apa? Padahal kalau yang di dalam PP-nya sendiri 14/2016 yang diminta menyusun dokumen RP3KP adalah kabupaten/kota dan juga menyusun dokumen kawasan permukiman itu juga kab/kota, tidak ada amanah provinsi menyusun RP3KP dan RKP”, ujarnya. Ia juga mengatakan pihaknya kita telah menyusun draft RP3KP, tetapi dikarenakan masih adanya aturan yang tidak sinkron antara UU dan PPnya yang menyebabkan mereka kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan biro hukum dikarenakan tidak adanya dasar hukumnya.

Menjawab pertanyaan Bapak Suci, Ibu Mita menegaskan bahwa provinsi tetap menyusun RP3KP karena hal ini merupakan amanat UU 1/2011. Selain itu Ia juga menjelaskan bahwa pembagian tugas provinsi lebih kepada lebih kepada TURBINWAS (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan. Red) yaitu sifatnya memberikan arahan terhadap rencana kepada kabupaten/kota. Mita menambahkan bahwa dalam penyusunan dokumen, provinsi akan menjadi rujukan untuk kabupaten/kota, “di dalam muatannya sendiri untuk RP3KP provinsi lebih diarahkan ke TURBINWAS kepada kabupaten/kota. Provinsi juga melaksanakan kewenangan dan tetap ada program yang sifatnya fisik sesuai dengan UU 23/2014, kami sudah koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan hal ini” tegasnya. Mita juga menjelaskan contoh dari perencanaan lintas kabupaten/kota yaitu infrastruktur fisik seperti SPAM dan IPAL regional. Sedangkan pelaksanaan program pembangunan fisiknya dilakukan sesuai dengan kewenangan.

Pada sesi ini terdapat dua provinsi yang telah melakukan inovasi dalam membuat program pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni yaitu provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Melalui perwakilan DKI Jakarta yaitu Bapak Eko Suroyo, Sekdis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyampaikan program penyediaan rumah dan pembangunan baru yang menggunakan konsep Rusunawa sebagai tempat transit melalui konsep *housing career* dan juga program DP O

persen. Harapannya agar warga DKI Jakarta nantinya dapat memiliki rumah. Program DP 0 persen menjadi sebuah solusi dimana mereka yang belum memiliki rumah nantinya akan menghuni Rusunawa transit kemudian diberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi. Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan para penghuni Rusunawa transit dapat membeli rumah melalui program DP 0 rupiah.

Selanjutnya pengalaman juga dibagikan oleh Bapak Andi perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah, Ia bercerita bahwa dalam menjalankan program penyediaan rumah melalui pembangunan baru mereka menggunakan payung regulasi dari program kemiskinan yang menggunakan target sasaran golongan masyarakat skala bawah atau masyarakat miskin berdasarkan data DTKS atau PDT yang dirilis oleh Kementerian Sosial. Bantuan ini diberi nama Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Sehat Tahan Gempa yang menggunakan Ruspin atau Rumah Sistem Panel Instan. Bantuan ini bernilai 35 juta berupa material dengan upah yang ditanggung oleh swadaya masyarakat. Selain itu adanya rencana memasukan program penggunaan Ruspin ke dalam e-katalog lokal serta pembentukan klinik cetak Ruspin. Terakhir Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun suatu sistem data untuk memudahkan validasi terhadap masyarakat penerima manfaat program RTLH. Sistem ini dapat diakses secara langsung oleh desa-desa yang ada di Jawa Tengah. Dalam hal validasi, perangkat desa yang akan membuat usulan masyarakat penerima bantuan berdasarkan sistem tersebut.

Menutup sesi terakhir, Encep menyimpulkan beberapa catatan penting yang ia sebut spirit 4K. Pertama yaitu konkuren, Ia menegaskan bahwa urusan PKP harus dibagi habis tugasnya. Kedua yaitu kolaborasi, dibutuhkan kerjasama semua *stakeholder* untuk pelaksanaannya termasuk masyarakat. Ketiga yaitu komprehensif, bahwa penanganan lingkungan tidak bisa berfokus hanya kepada rumah tapi harus memperhatikan unsur lainnya termasuk infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Keempat yaitu komunitas, akan terjadinya akselerasi jika program PKP dilakukan berbasis komunitas. Terakhir Encep juga menekankan bahwa spirit 4K tersebut harus dibungkus dengan kerangka komitmen.



5.3 Rangkuman Pembahasan FGD Bidang Perumahan

Berdasarkan sesi FGD yang dilaksanakan, terdapat banyak isu dari berbagai aspek di level pemerintah daerah yang berhasil dihimpun. Dalam rangka memastikan tindak lanjut dari seluruh isu tersebut, disampaikan rangkuman isu dan tanggapan sebagai berikut:

TABEL RANGKUMAN DISKUSI SESI TIGA DESK PERUMAHAN

Aspek Penyediaan Lahan	
Isu	Tanggapan
Hak atas tanah bagi warga permukiman kumuh di wilayah pesisir, khususnya di area pasang surut yang notabene merupakan masyarakat adat yang sudah secara turun temurun tinggal di badan air.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Pengelolaan tanah di kawasan pesisir/ sempadan pantai sudah diatur oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 dimana salah satunya mengatur tentang masyarakat adat yang memiliki budaya tinggal di pesisir. Berdasarkan Permen tersebut, masyarakat adat dapat dianggap sah tinggal di badan air hanya jika memenuhi syarat tertentu, yaitu jika memang budayanya secara turun temurun tinggal di badan air serta tiang pancang bangunan dipastikan berada di dasar air atau menyentuh tanah di dasar air. Ini dimungkinkan diberikan hak berjangka, yaitu berupa hak pakai ⦿ Akan tetapi meskipun memungkinkan secara regulasi, namun tetap perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kerawanan permukiman tersebut terhadap bahaya bencana.
Pemanfaatan tanah adat di wilayah Sulawesi Tenggara untuk keperluan relokasi masyarakat.	Pemanfaatan tanah adat untuk relokasi permukiman diperbolehkan asalkan adanya persetujuan dari masyarakat selaku pemilik lahan untuk menghibahkan lahan tersebut kepada pemerintah bagi keperluan relokasi atau pembangunan permukiman baru.
Sulitnya pelaksanaan program <i>land banking</i> dan konsolidasi lahan dikarenakan terbatas regulasi yang hanya untuk kegiatan penanganan bencana dan relokasi program pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Konsolidasi tanah di lahan milik masyarakat dapat dilakukan selama masyarakat menyetujuinya. Selain itu dibutuhkannya advokasi, <i>political will</i>, dan <i>good will</i> dari kepala daerah mencapai kesepakatan dikarenakan hal tersebut belum menjadi prioritas dan penganggarannya masih sangat minim. ⦿ Sesuai Permendagri 90/2019, <i>land banking</i> masih terbatas pada keperluan relokasi bencana atau program pemerintah. Keperluan untuk relokasi permukiman kumuh yang menjadi program pemerintah provinsi/kab-kota termasuk di dalamnya.

Pembagian kewenangan yang tidak jelas perihal penanganan warga bantaran sungai yang berada di bawah pengelolaan nasional (BBWS pusat).

Pelaksanaan program relokasi permukiman di tepian sungai dilakukan berdasarkan inisiatif. Jika provinsi yang memiliki inisiatif programnya, maka hal tersebut masuk dalam program provinsi walaupun area permukiman berada di wilayah sungai yang menjadi kewenangan nasional.

Aspek Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Isu	Tanggapan
<p>Penanganan permukiman kumuh ditangani oleh dinas yang berbeda-beda, terutama terkait program PSU yang sering <i>overlap</i> antara program Dinas PKP dan Dinas Cipta Karya. Hal ini dikarenakan minimnya kolaborasi antar OPD dan Pokja PKP yang belum berperan secara signifikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Penanganan kumuh adalah persoalan bersama dan kolaborasi bersama, berapapun luasnya itu adalah persoalan bersama baik pusat, provinsi, dan kab/kota. ⦿ Perbedaan OPD tidak harus menjadi masalah terkait pelayanan dan pelaksanaan program PKP di daerah karena tinggal masing-masing OPD menguatkan lagi koordinasinya. ⦿ Meningkatkan kolaborasi pemerintah daerah termasuk peran Pokja PKP di daerah dikarenakan pemerintah daerah merupakan ujung tombak kolaborasi pembangunan perumahan.
<p>Kolaborasi di pemerintah pusat dalam penanganan permukiman kumuh sendiri masih sangat minim. Setiap pelaksanaan Konreg adanya keharusan integrasi lokasi antar program BSPS dari Ditjen Perumahan dan PSU dari Cipta Karya. Akan tetapi apa yang disampaikan di Konreg Kementerian PUPR tidak pernah terselesaikan di lapangannya karena masing-masing Ditjen juga memiliki balai yang berbeda di daerah serta konsep yang berbeda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Pada tingkat pemerintah pusat, kolaborasi antar sektor untuk penanganan kumuh sedang terus ditingkatkan dan diharapkan hal tersebut juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa melihat batasan kewenangan. ⦿ Dibutuhkannya dukungan dari pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan integrasi program dikarenakan adanya keterbatasan pemerintah pusat dalam mengetahui kondisi lapangan.
<p>Dukungan pemerintah pusat untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di lahan-lahan milik pemerintah pusat, seperti PJKA, kolong tol, Pertamina, kementerian, dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Persoalan mengenai lahan-lahan milik pemerintah atau BUMN bisa dimanfaatkan asalkan mendapat izin dari Kementerian Keuangan selaku pemegang izin pemanfaatan BMN. ⦿ Perlu adanya panduan dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang memiliki inisiatif penanganan permukiman kumuh di berbagai tipe lahan.

Update data kumuh dalam SK setiap tahunnya. Hal itu dinilai membuat pemerintah provinsi tidak pernah memiliki *baseline* yang pasti mengenai penanganan kumuh yang harus dituntaskan.

- ⦿ Pada dasarnya *review* terhadap SK Kumuh dilakukan dalam rangka pemantauan pengurangan kawasan kumuh. Jika ada SK baru yang muncul dan hektarnya bertambah, hal ini akan menjadi pertanyaan bagi Kementerian PUPR dan perlu ditelusuri lebih lanjut dikarenakan kondisi saat ini banyak sekali daerah berlomba-lomba untuk mendapatkan program KOTAKU.
- ⦿ Perencanaan diharapkan bisa lebih fokus terhadap *baseline* yang sudah ditetapkan, namun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan kawasan kumuh baru seiring dengan dinamika atau pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sehingga kawasan kumuh baru terus muncul. Maka dari itu selain melakukan upaya penanganan, pemerintah daerah juga harus berupaya untuk melakukan pencegahan kumuh.

Aspek Pendanaan dan Pengembangan Sistem Pembiayaan

Isu	Tanggapan
<p>Belum adanya skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat informal. Selain itu banyak masyarakat yang sudah mengusulkan tetapi ditolak oleh bank dikarenakan penghasilan masyarakat yang tidak mencukupi ataupun tidak tetap.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Masalah tersebut idealnya dapat diatasi dengan program <i>housing micro finance</i> ataupun KPR micro swadaya yang juga disertai dengan pendampingan dari pemerintah daerah kepada masyarakat penerima manfaat ⦿ Selain itu harus adanya pendampingan dari satu lembaga dinas untuk menyiapkan SDM dan RAB serta mengontrol kualitas bangunannya
<p>Terbatasnya nomenklatur program untuk pembiayaan rumah MBR di UU 23/2014 dikarenakan kewenangannya berada di pusat sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan program tersebut.</p>	<p>Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi program terkait pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah misalnya daerah mendukung PSU, kemudahan perizinan untuk pembangunan perumahan MBR, ataupun penyediaan lahan.</p>

Belum terdapatnya payung regulasi terkait sistem subsidi perumahan dari APBD ke FLPP untuk pengembangan *housing micro finance* karena saat ini dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya hanya terbatas pada sosialisasi mekanisme FLPP dan pembiayaan perumahan baru.

- ⦿ Perlu dilakukannya pengecekan ulang Permendagri 90/2019 junto Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 terkait program FLPP untuk pengembangan *housing micro finance*. Jika hal tersebut dibutuhkan dan memang memiliki dasar yang kuat tidak akan menutup kemungkinan Kementerian Dalam Negeri dapat menambahkan nomenklatur program/kegiatan baru terkait pembiayaan perumahan agar dapat dilaksanakan di daerah.
- ⦿ Pemerintah daerah dapat meniru pola Jawa Barat dalam memperluas akses FLPP melalui APBD, dengan memanfaatkan pos anggaran subsidi di dalam APBD.

Penerima bantuan untuk program KPR FLPP di Provinsi Jawa Barat yang masih belum dipastikan penerima manfaatnya apakah hanya ditujukan kepada MBR formal ataupun termasuk MBR informal.

- ⦿ Program KPR FLPP dapat diakses oleh MBR formal maupun informal walaupun sektor informal memiliki porsi yang kecil yaitu di bawah 10%
- ⦿ Dalam menjalankan subsidi perumahan diperlukan lembaga keuangan bank yang mempunyai pengalaman dalam pemberdayaan contohnya yaitu Bank BTPN dan Bank BRI dan ditambahkan dengan satu komponen baru yaitu sektor perumahan.

Aspek Pendanaan dan Pengembangan Sistem Pembiayaan

Isu	Tanggapan
Tidak terdapatnya menu untuk program pembangunan baru rumah komunitas, khususnya untuk penanganan kumuh. Di dalam Permendagri 90/2019 program hanya mengarah kepada relokasi bencana dan relokasi program pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> ⦿ Berdasarkan arahan pimpinan program pembangunan baru untuk penanganan rumah komunitas saat ini akan lebih difokuskan kepada peningkatan kualitas. ⦿ Adanya pembatasan pembagian kewenangan dalam UU 23/2014 termasuk belum adanya payung regulasi untuk program pembangunan baru rumah komunitas. Akan tetapi diharapkan hal tersebut tidak membatasi pemberian layanan kepada daerah yang mana dapat dilakukan dengan sinkronisasi dan kolaborasi program melalui Muserembang atau Rakortek.

Program rumah khusus untuk nelayan yang tidak termuat di peraturan. Golongan khusus yang mendapatkan bantuan hanya masyarakat yang masuk golongan 3T.

- ⦿ Klasifikasi penerima bantuan bukan berdasarkan profesi tetapi lebih ke lokasi studinya yaitu perbatasan, pulau-pulau terluar, dan untuk penanganan bencana.
- ⦿ Akan dilakukan revisi Permen terkait target bantuan untuk sasaran penerima manfaat pada definisi rumah khusus dalam UU 1/2011.

Belum jelasnya pembagian tugas dan wewenang dalam penyusunan RP3KP yang mana dalam Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa tidak ada amanah provinsi menyusun RP3KP dan RKP untuk pembangunan perumahan lintas kab/kota.

- ⦿ Provinsi tetap menyusun RP3KP karena hal ini merupakan amanat UU 1/2011.
- ⦿ Pembagian tugas provinsi lebih kepada TURBINWAS yaitu sifatnya memberikan arahan terhadap rencana kepada kabupaten/kota dan dokumen provinsi akan menjadi rujukan untuk kabupaten/kota.
- ⦿ Provinsi juga melaksanakan kewenangan dan tetap ada program yang sifatnya fisik sesuai dengan UU 23/2014 .
- ⦿ Salah satu contoh dari perencanaan lintas kabupaten/kota yaitu pembangunan SPAM dan IPAL regional, sedangkan pelaksanaan program pembangunan fisiknya dilakukan sesuai dengan kewenangan.

Aspek Keterpaduan Regulasi Sektoral dan Pemerintah Daerah

Isu	Tanggapan
Konfirmasi payung regulasi pengadaan tanah di wilayah pesisir, khususnya di area pasang surut.	Pengelolaan tanah di pesisir/ sempadan pantai dan pulau-pulau kecil sudah diatur dalam Permen ATR/BPN No. 17/2016.
Belum adanya payung regulasi pelaksanaan program <i>land banking</i> dan konsolidasi lahan.	Perlu adanya penelusuran dan pendalaman kembali pada Permendagri 90/2019 dan UU 23/2014 mengenai regulasi pelaksanaan program <i>land banking</i> di luar peruntukan relokasi bencana.

-
- ⦿ Perbedaan OPD untuk bidang perumahan dan permukiman di Sumatera Utara, hal ini menyebabkan sulitnya sinkronisasi program/kegiatan dan sering terjadinya program yang overlap.
 - ⦿ Minimnya peran Pokja PKP daerah.

- ⦿ Perbedaan OPD seharusnya bukan menjadi kendala dalam pelayanan dan pelaksanaan program PKP
- ⦿ Perlu ditingkatkan kembali kolaborasi dan koordinasi antar OPD serta sinkronisasi program/kegiatan. Termasuk perlu penguatan kembali peran Pokja PKP daerah dan kejelasan pembagian kewenangan dan TUPOKSI antar OPD.

Belum terdapatnya payung regulasi terkait pengembangan system pembiayaan perumahan, terutama mengenai sistem subsidi perumahan dari APBD ke FLPP serta pengembangan housing *micro finance* karena saat ini dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya hanya terbatas pada sosialisasi mekanisme FLPP dan pembiayaan perumahan baru.

Perlu dilakukannya pengecekan ulang Permendagri 90/2019 junto Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 terkait program FLPP untuk pengembangan *housing micro finance*. Jika hal tersebut dibutuhkan dan memang memiliki dasar yang kuat tidak akan menutup kemungkinan Kementerian Dalam Negeri dapat menambahkan nomenklatur program/kegiatan baru terkait pembiayaan perumahan agar dapat dilaksanakan di daerah.

Belum terdapatnya menu untuk program pembangunan baru rumah komunitas, khususnya untuk penanganan kumuh. Di dalam Permendagri 90/2019 program hanya mengarah kepada relokasi bencana dan relokasi program pemerintah.

- ⦿ Adanya pembatasan pembagian kewenangan dalam UU 23/2014 termasuk belum adanya payung regulasi untuk program pembangunan baru rumah komunitas. Akan tetapi diharapkan hal tersebut tidak membatasi pemberian layanan kepada daerah yang mana dapat dilakukan dengan sinkronisasi dan kolaborasi program melalui Muserembang atau Rakortek.
 - ⦿ Bisa mengikuti pola Jawa Tengah yang memasukan program pembangunan baru rumah layak huni di bawah program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya “menyiasati” keterbatasan kewenangan dalam UU 23/2014.
 - ⦿ Dalam UU 23/2014 MBR menjadi kewenangan pusat akan tetapi daerah dapat memberikan dukungan dan peluang untuk melakukan kegiatan/program seperti pengadaan tanah melalui BLU, pengadaan PSU, dll.
 - ⦿ Kuncinya yaitu perlu ditingkatkan kembali kolaborasi dan koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota.
-



5.4 Konfirmasi Distribusi Target Provinsi

Tirta Sutedjo

Kepala Subdirektorat Air Minum
Kementerian PPN/Bappenas

Sesuai yang telah diamanatkan pada Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Tahun 2020-2024, telah ditetapkan target akses air minum dan sanitasi diantaranya:

- ① Target Akses Air Minum dalam RPJMN 2020-2024, meliputi: 100% hunian dengan akses air minum layak, 30% hunian dengan akses jaringan perpipaan dan 15% hunian dengan akses air minum aman;
- ② Target Akses Sanitasi dalam RPJMN 2020-2024, meliputi: (i) Akses air limbah domestik: 90% hunian dengan akses sanitasi layak (termasuk 15% hunian dengan akses sanitasi aman) dan 0% Buang Air Besar Sembarangan

di Tempat Terbuka; (ii) Akses persampahan: 80% hunian dengan akses penanganan sampah dan 20% hunian dengan akses pengurangan sampah terkelola dengan baik (di wilayah perkotaan).

Dalam upaya memenuhi target akses air minum dan sanitasi layak serta aman, Tirta menyampaikan diperlukan sinkronisasi antara target yang telah ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi maupun RPJMD Kabupaten/Kota. Pada Bulan Februari 2020, Pokja Provinsi telah mendapatkan pelatihan metode dan simulasi perhitungan *baseline* dan distribusi target di bidang PPAS dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota. Melalui pelatihan tersebut, Pokja Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan perhitungan *baseline* dan distribusi target di bidang PPAS dengan metode yang digunakan oleh Pokja PPAS Nasional sehingga target yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota sejalan dengan target yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024.

Distribusi target provinsi untuk akses air minum dan sanitasi memiliki manfaat sebagai berikut: (1) penyusunan rencana dan program yang lebih tepat guna dan tepat sasaran; (2) pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan SDGs yang lebih bersinergis; (3) pengukuran kinerja capaian program di tingkat pusat dan daerah yang sama. Dalam proses perhitungan distribusi target provinsi untuk akses air minum dan sanitasi pun memiliki tantangan yang perlu diperhatikan diantaranya: (1) penyamaan pemahaman mengenai data dan indikator baik antar K/L dan antar Pusat-Daerah; (2) pengembangan data dan indikator berdasarkan konsep dan definisi operasional yang relevan dengan berbagai tujuan SDGs.

Tidak hanya itu, Tirta juga melanjutkan sebagai bagian tindak lanjut setelah perhitungan *baseline* dan distribusi target, Pemerintah Provinsi kabupaten/kota dapat melakukan pengawalan implementasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, mengevaluasi kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan, menentukan dukungan yang diperlukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan advokasi dan peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota, mendorong replikasi praktik baik program perumahan dan permukiman antar Kabupaten/Kota, mendorong kerjasama antar Kabupaten/Kota dan menyusun strategi pencapaian target provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disampaikan Pokja Provinsi kepada Pokja PPAS Nasional, Sebanyak 17 Provinsi sudah melakukan distribusi target dengan beberapa *exercise* provinsi yang sudah sesuai dengan target Pemerintah Pusat namun ada juga *exercise* provinsi yang masih rendah disandingkan dengan target Bappenas, serta masih ada yang belum terdapat datanya atau perlu dilengkapi lagi datanya. Sehingga, hal ini dapat menyulitkan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti penyempurnaan *exercise* di Provinsi.

Tabel Diskusi dan Tanya Jawab Topik Konfirmasi Distribusi Target Provinsi

Rena – Perwakilan PUPR,
Provinsi Bangka Belitung

- ⦿ Provinsi Bangka Belitung pada Bulan Maret-April lalu telah mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengisian capaian air minum dan sanitasi. Terdapat kendala yaitu adanya perbedaan data capaian Kabupaten/Kota dengan target yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi (menyesuaikan Susenas). Selain itu, adanya perubahan indikator SDGs sehingga harus dilakukan penyesuaian dan pemahaman oleh Kabupaten/Kota mengenai perubahan tersebut.
- ⦿ Kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota adalah data sanitasi yang digunakan berasal dari Dinas Kesehatan dan data air minum berasal dari PDAM yang sudah di audit, sehingga didapatkan hasil exercise yang jauh dari target nasional.

Yustina - Perwakilan
Direktur Kesehatan
Lingkungan, Kementerian
Kesehatan

- ⦿ Dinas Kesehatan memiliki e-monitoring STBM dengan data yang masih menggunakan klasifikasi lama. Untuk klasifikasi akses sanitasi terdiri dari jamban sehat permanen, jamban sehat semi-permanen, jamban bersama, dan BABS. Pada Bulan November 2020, Kementerian Kesehatan sudah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan terkait pemutakhiran e-monitoring STBM untuk tahun 2021 dimana klasifikasi sanitasi akan menyesuaikan defeni SDGs yaitu akses aman, layak, layak bersama, BABS di tempat terbuka dan BABS tertutup. Sehingga, kedepannya untuk Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota yang ingin menggunakan data e-monitoring STBM tidak jauh perbedaannya dengan target RPJMN 2020-2024 ataupun SDGs.

Marsaulina P. - Perwakilan
Direktur Sanitasi, Ditjen
Cipta Karya, Kementerian
PUPR

- ⦿ Metaplan yang telah dilakukan mengenai isu dan tantangan dalam pendistribusian target di Pemerintah Daerah merupakan hal yang memang sering terjadi saat Kementerian PUPR melakukan pendampingan untuk pengelolaan sanitasi di daerah. Tantangan utama adalah komitmen kepala daerah, dalam UU 23 tahun 2014 tertulis bahwa Kementerian PUPR di bidang sanitasi merupakan urusan wajib dalam pelayanan dasar, sehingga hal ini merupakan prioritas daerah dalam pelaksanaannya.
- ⦿ Harapan untuk Pemerintah Daerah dapat meningkatkan awareness pada bidang sanitasi (air limbah dan sampah). Di dalam SPM, tertulis bahwa setiap WNI harus memiliki akses pengolahan air limbah domestik. Maka dari itu, penyediaan pelayanan dasar bidang sanitasi merupakan tanggung jawab daerah sedangkan Pemerintah Pusat bertugas sebagai pendorong, pembuat regulasi, kebijakan dan strategi, serta memberikan fasilitas seperti pendampingan.
- ⦿ Indikator sanitasi perlu ditingkatkan dari akses layak menuju akses aman. Hal ini mendorong perlunya dibentuk kelembagaan/institusi/pengelola di daerah yang kuat dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap sektor air limbah domestik dan persampahan.

Azies - Perwakilan Direktur
SUPD II, Ditjen Bina
pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

- ⦿ Target pembangunan nasional tidak akan tercapai apabila tidak adanya kontribusi dari APBN dan APBD. Yang menjadi concern adalah APBD, di dalam UU 23 tahun 2014 sudah jelas tertulis bahwa prioritas belanja dikhususkan untuk pelayanan dasar. Pemerintah Pusat sudah menerbitkan regulasi-regulasi sebagai pendukung target RPJMN 2020-2024, dan SDGs. Selain itu, sudah dilakukan exercise pencapaian akses air minum dan sanitasi. Implementasi di daerah memerlukan komitmen dari Pemerintah Daerah, tidak hanya Kepala Daerah namun juga peran dari Legislatif Daerah. Hal ini dilakukan untuk menyepakati target nasional oleh badan legislatif dan eksekutif.
 - ⦿ Trend alokasi di daerah cenderung kepada bidang-bidang lain khususnya jalan sekitar 60%, sementara untuk bidang air minum dan sanitasi dialokasikan sangat minim, hal ini menunjukkan tidak ada keselarasan yang sudah diamanatkan RPJMN 2020-2024 dengan implementasi di daerah. Sudah ada regulasi terkait momenklatur shopping list sehingga Pemerintah Kab/Kota dapat menyesuaikan anggaran belanja dengan target air minum dan sanitasi.
-

Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Bahan
Berbahaya Bercaun,
Kementerian Lingkungan
Hidup

- ⦿ Tantangan yang sudah dituliskan oleh Pemerintah Daerah di metaplan mengenai data merupakan hal yang menarik dikarenakan permasalahan yang elementary. Berdasarkan isu tersebut, perlu dibangun terobosan-terobosan seperti mendorong interaksi eksekutif dan legislatif, desiminasi , pendampingan dan mengadakan reward untuk Pemerintah Daerah agar pelayanan dasar di bidang sanitasi menjadi prioritas, namun instrumen harus dibuat terlebih dahulu. Dorongan-dorongan ini dapat menambah spirit daerah.

Tirta Sutedjo – Kasubdit
Air Minum, Direktorat
Perumahan dan
Permukiman, Kementerian
PPN/Bappenas

- ⦿ Tugas dari Pemerintah Pusat adalah menyusun perencanaan dan kebijakan makro nasional. Data yang digunakan adalah data dari BPS, Susenas dimana secara lembaga memang ditugaskan untuk menyediakan data untuk perencanaan.
 - ⦿ BPS bersifat nasional, responden yang didapat dari Susenas terbatas, tidak menyeluruh. Kapasitasnya berbeda dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan survey yang bisa menyeluruh. Harapannya Pemerintah daerah juga dapat melakukan penajaman terkait data-data tersebut dengan melakukan survey, namun dengan acuan, pedoman dan metode yang sama.
 - ⦿ Terdapat alokasi sebanyak 25% untuk infrastruktur di daerah, alokasi tersebut dapat digunakan untuk belanja modal di bidang air minum dan sanitasi.
-

5.6. Konfirmasi Distribusi Target Provinsi

Wahanudin

Kepala Subdirektorat Sanitasi
Kementerian PPN/Bappenas

Target nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 tidak hanya terbatas pada akses sanitasi layak dan aman, tetapi juga harus memperhatikan sanitasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Wahanudin menyampaikan bahwa pencapaian target nasional harus didukung oleh Pemerintah Pusat melalui penyusunan skenario atau strategi pendampingan daerah. Jika Pemerintah Pusat tidak segera melakukan pendampingan ketika daerah mengalami kendala dalam pergerakan, maka target nasional akan sulit dicapai.

Strategi pemenuhan target sanitasi dituangkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Selama pelaksanaan pendampingan implementasi SSK, diketahui masih ada 19 Kabupaten/Kota yang belum memiliki dokumen SSK. Sebanyak 489 Kabupaten/kota yang telah menyusun dan melakukan pemutakhiran dokumen SSK, dan terdapat 47 Kabupaten/kota yang telah melakukan implementasi dokumen SSK. Selain itu, terdapat 10 provinsi yang telah memiliki dokumen RSP (Roadmap Sanitasi Provinsi) yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan status dokumen dan EHRA, Kabupaten/Kota dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: (i) SSK dan EHRA Kabupaten/Kota tidak ada atau tidak valid (belum memiliki atau dokumen SSK dan EHRA sudah berumur 5 tahun), (ii) Kabupaten/Kota yang memiliki EHRA masih Valid tetapi SSK tidak valid, umur EHRA masih kurang dari 5 tahun namun SSK sudah lebih dari 5 tahun, (iii) Kabupaten/Kota yang memiliki EHRA dan SSK masih valid, serta (iv) Kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan implementasi SSK.

Dalam bidang air minum, strategi daerah dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Hingga saat ini, rata-rata ketersediaan dokumen RISPAM nasional sudah mencapai 70%. Wahanudin menyampaikan bahwa aspek yang perlu dimutakhirkan dalam RISPAM Provinsi antara lain kondisi saat ini (seperti capaian, kendala, tantangan, kondisi infrastruktur, kapasitas Kabupaten/Kota), target dan sasaran yang akan dicapai, kebutuhan dan potensi air baku Kabupaten/Kota, arah kebijakan dan strategi, kerangka waktu, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta strategi pendanaan. Untuk bidang air minum juga akan dilakukan fasilitasi dalam penyusunan atau pemutakhiran dokumen RISPAM.

Rencana Aksi Daerah merupakan instrumen Pemerintah Daerah untuk mencapai target dan mandat pembangunan air minum dan sanitasi. Rencana aksi menjabarkan kebutuhan operasionalisasi strategi daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan. Selain itu, Rencana Aksi Daerah juga merupakan pelaksanaan kewajiban daerah dalam menyediakan air minum dan sanitasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam implementasi pembangunan air minum dan sanitasi, provinsi dapat berperan dalam koordinasi, advokasi, advisori, fasilitasi, supervisi dan sinkronisasi.

Wahanudin juga menyampaikan hasil identifikasi bottleneck dalam pembangunan sanitasi dari lokakarya Bottleneck Analysis Tools (BAT) yang telah dilakukan pada 11 dan 14 Desember 2020. Beberapa bottleneck pembangunan sanitasi antara lain sebagai berikut: pembangunan sanitasi belum komprehensif dan multi-sektoral, kurangnya jumlah dan kompetensi SDM terkait pembangunan dan pelayanan

sanitasi, belum ada skema baku insentif dan disinsentif bagi Pemerintah Daerah/swasta/masyarakat, readiness criteria belum dapat dipenuhi oleh semua daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi belum optimal, belum ada “political will” yang kuat dari para pemangku kepentingan yang berpengaruh, indikator yang digunakan bersama belum tersosialisasi dengan baik kepada semua pihak, aspek kepuasan pelanggan belum menjadi acuan dalam penyediaan layanan sanitasi, serta masih kurangnya keterlibatan peran swasta/masyarakat dalam pembangunan sanitasi.

Ketua Pokja AMPL NTB, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat berbagi mengenai langkah-langkah inovatif yang dilakukan dalam pemenuhan akses air minum dan sanitasi. Pemerintah Provinsi NTB telah membuat roadmap untuk gerakan BASNO (Buang Air Sembarangan Nol) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pada mulanya diharapkan Provinsi NTB mencapai target ODF di tahun 2018. Namun hanya Kabupaten Sumbawa Barat yang mencapai ODF, sehingga Pemerintah Provinsi melakukan review roadmap untuk penyesuaian dengan target RPJMD 2019-2023. Penyusunan roadmap dilakukan oleh Pokja AMPL Provinsi dengan dukungan dari UNICEF dan Mitra Samya. Roadmap BASNO mencantumkan capaian akses sanitasi pada tahun 2019 dan target tahunan hingga tahun 2023. Untuk mendukung pelaksanaan roadmap, Provinsi NTB menyediakan tenaga pendamping daerah/Pokja AMPL menggunakan APBN untuk 10 kabupaten/kota dan 1 tingkat provinsi. Tenaga pendamping ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi permasalahan lintas sektor. Tenaga pendamping telah mendapatkan peningkatan kapasitas dengan dukungan dari UNICEF dan USDP.

Kendala yang umum dihadapi dalam bidang air minum dan sanitasi adalah kondisi anggaran yang terbatas sedangkan kebutuhan dana untuk pembangunan sangat tinggi. Salah satu inisiatif dalam alternatif pendanaan air minum dan sanitasi adalah kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan Baznas untuk menindaklanjuti Fatwa MUI No. 1 tahun 2015 tentang pemanfaatan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf) di bidang air minum dan sanitasi.

Tabel Diskusi dan Tanya Konfirmasi Distribusi Target Provinsi

Wahanudin – Kasubdit Sanitasi, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas	<ul style="list-style-type: none">SSK merupakan dokumen kesepakatan untuk sektor sanitasi. Hal ini perlu dilakukan advokasi secara terus menerus karena SSK disusun untuk melibatkan semua K/L yang terkait. Oleh karena itu, lembaga Pokja Provinsi sangat diperlukan
Marsaulina P. – Perwakilan Direktur Sanitasi, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none">Insentif untuk Kabupaten/Kota yang sudah menyelesaikan pendampingan dalam implementasi SSK dapat dipertimbangkan jika SSK terbukti sudah diselesaikan dengan baik dan benar.Untuk kedepannya diharapkan seluruh perencanaan dari Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten/Kota terkait pembangunan infrastruktur di bidang air minum dan sanitasi didasarkan pada SSK, baik <i>roadmap</i> maupun kegiatan prioritas tertera pada SSK. Oleh karena itu, kesepakatan setiap stakeholder dalam pembangunan pelayanan dasar sanitasi yang berpedoman oleh SSK sangat diperlukan.
Yustina Perwakilan Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">Kementrian Kesehatan sedang fokus pada survey mengenai kualitas air minum rumah tangga, pengumpulan data dilakukan pada akhir tahun ini karena terkendala pandemi. Data yang didapatkan diharapkan menjadi baseline untuk digunakan dalam perencanaan peningkatan kualitas air minum. Pada tahun 2021, akan dilanjutkan dengan survey land.Berbagai upaya sudah dilakukan seperti revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan yang sedang digunakan dimana dalam implementasi sulit untuk mencapai target, terutama dalam penyelenggaraan air minum. Selain itu, teknologi tepat guna juga merupakan hal yang penting terhadap penyelenggaraan kualitas air minum.

Tirta Sutedjo – Kasubdit Air Minum, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas

- ⦿ Di Provinsi dan Kab/Kota memiliki perencanaan terkait pengembangan air minum. Saat ini yang hampir semua sudah Provinsi memiliki RISPAM, namun secara kualitas memang masih ada yang belum sesuai harapan. Diharapkan RISPAM Provinsi, dapat menggambarkan kebutuhan dan potensi air baku, air minum dan dapat memetakan Kabupaten/kota dalam mencapai target akses air minum, mengidentifikasi daerah yang sulit mendapatkan air baku, dan menentukan teknologi pendekatan. Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dengan PPW dalam penyusunan RISPAM Provinsi.

Yustina – Perwakilan Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

- ⦿ Untuk tahun 2021, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan panduan untuk pendampingan ERHA dalam jarak jauh. Selain itu, sistem aplikasi EHRA akan dikembangkan agar mempermudah Pemerintah daerah berdiskusi dan input data EHRA.
- ⦿ Kementerian Kesehatan akan mendukung Pemerintah Provinsi melalui dana dekonsentrasi, sehingga diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Teddy – Perwakilan Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen. Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup

- ⦿ Pengelolaan sampah di daerah perlu dilakukan desiminasi kebijakan dan regulasi terkait persampahan, baik dalam pengurangan maupun penanganan. Kemudian, menentukan target setiap tahun. Hal ini juga dilakukan/disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui pendampingan yang struktural dan strategis, serta perlu dilakukannya pemantauan untuk penilaian dalam implementasi pengelolaan persampahan di daerah.

Wahanudin – Kasubdit Sanitasi, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas

- ⦿ Berkaitan dengan peleburan satu Pokja dimana terdiri dari Pokja PKP, Pokja Sanitasi, Pokja AMPL, Pokja PPAS perlu disikapi dengan bijak dan perlu dilihat kembali. Hal ini bersifat adhoc, yang artinya akan dikembalikan kepada wewenang Pemernitah Daerah
-

BAB 6

6.1 Exercise Perencanaan Program Kegiatan Tahun 2022 dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Tahun 2021

Sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional yang terangkum dalam RPJMN 2020-2024 diperlukan internalisasi target nasional kepada pemerintah di daerah untuk kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai program/kegiatan. Di sesi ke-4 ini peserta daerah melakukan simulasi menggunakan instrumen kuesioner terkait pembahasan rencana tindak lanjut kegiatan di Tahun 2021, serta penancangan program/kegiatan sektoral di Tahun 2022. Pokok pembahasan juga meliputi jenis dukungan dari pemerintah pusat yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dalam rangka implementasi program/kegiatan bidang perumahan, permukiman, air minum,

dan sanitasi. Tujuan dari sesi ini yaitu untuk:

- ⦿ Memetakan rencana program/kegiatan provinsi pada tahun 2022 berdasarkan pembelajaran/inovasi yang telah didiskusikan pada sesi sebelumnya (sesi 3)
- ⦿ Memetakan dukungan yang dibutuhkan oleh Provinsi dalam implementasi program/kegiatan
- ⦿ Menyepakati rencana kerja provinsi tahun 2021 khususnya dalam mengawal program/kegiatan tahun 2022 .

Sesi ini diikuti oleh seluruh peserta dari pemerintah daerah dan menghasilkan 30 ragam jawaban responden daerah dari 21 provinsi terlibat dalam pengisian kusioner. Profil dan provinsi responden dapat dilihat pada tabel berikut.

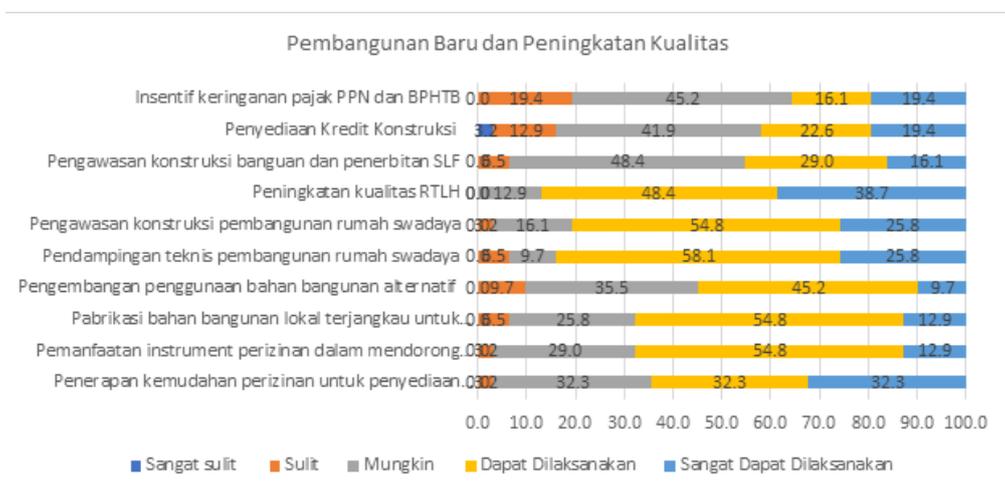
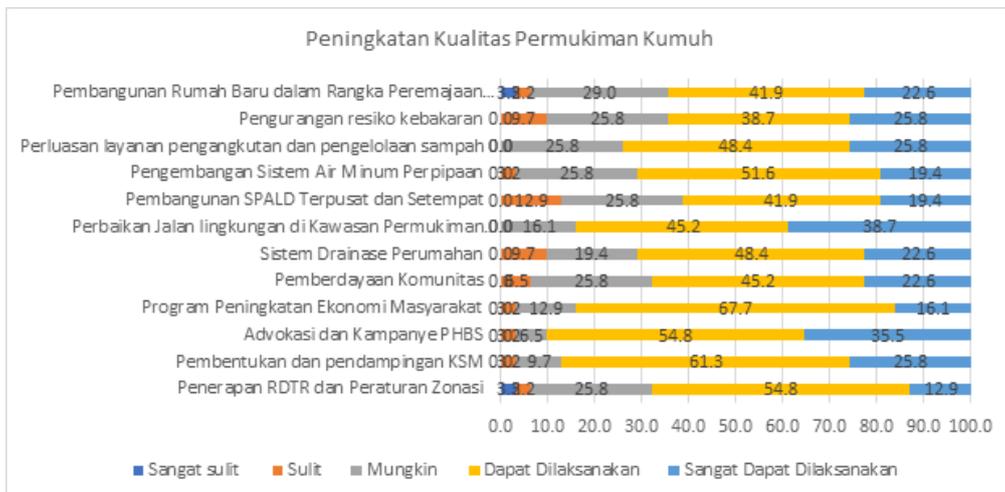
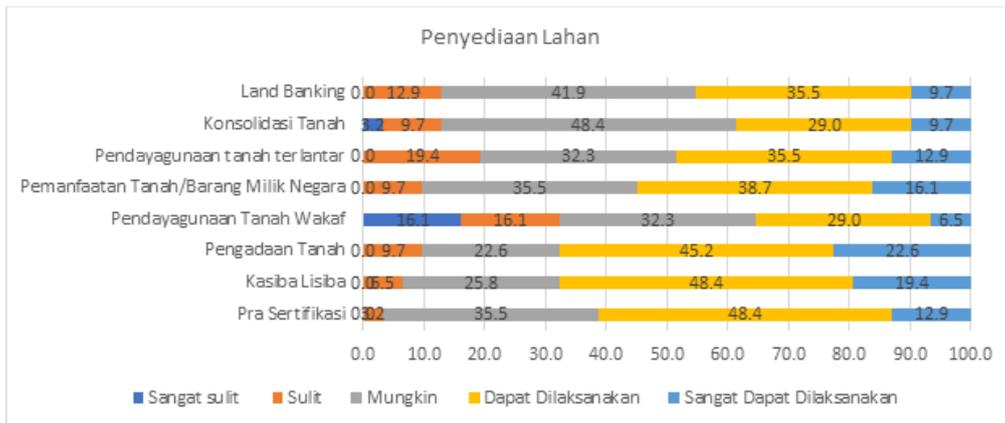
⦿ Aceh	⦿ Kalimantan Utara	⦿ Sulawesi Selatan
⦿ Bali	⦿ Kalimantan Tengah	⦿ Sumatera Barat
⦿ DIY	⦿ Papua	⦿ Sumatera Selatan
⦿ DKI	⦿ Banten	⦿ Sumatera Utara
⦿ Jawa Barat	⦿ Gorontalo	⦿ Riau
⦿ Jawa Timur	⦿ Lampung	⦿ Sulawesi Tengah
⦿ Kalimantan Barat	⦿ Maluku	⦿ Sulawesi Tenggara

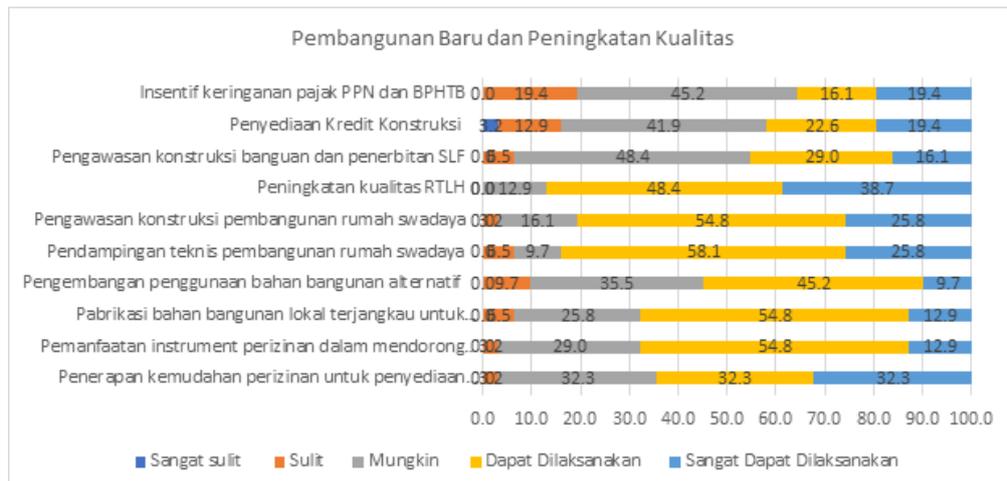
OPD/Lembaga	Jumlah
Bappeda/Balitbang	6
Dinas PUPR/PKP	16
Setda	1
Dinas PMD	1
TAPP/Kotaku	6

Pengukuran terhadap potensi penerapan program/kegiatan oleh pemerintah daerah telah dilakukan sebelum berlangsungnya Kegiatan Rakornas Pokja PPAS melalui kusioner *pre-assessment*. Peserta daerah pun telah melewati beberapa sesi sebelumnya mengenai pembahasan potensi, tantangan, regulasi, dukungan yang

dibutuhkan serta beberapa inovasi dan pembelajaran yang telah dilakukan oleh provinsi lain. Diharapkan provinsi yang selama ini masih belum optimal dalam implementasi pembangunan di bidang perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi dapat mulai menyusun perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang sesuai dengan target pembangunan. Melalui simulasi di sesi 4 ini, potensi program/kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian target di provinsi masing-masing dapat ditinjau kembali.

Berikut ini adalah hasil pengukuran/assessment yang dilakukan pada sesi 4:





Dalam mengawal strategi dan program/kegiatan sebagai upaya pencapaian target daerah, Pemerintah Provinsi melalui Pokja diharapkan dapat menyusun rencana kerja dan secara aktif melakukan koordinasi. Beberapa kegiatan rutin yang dapat dilakukan oleh pokja provinsi pada tahun 2021 antara lain:

1. Lingkup koordinasi, diawali dengan pembentukan dan pengesahan Pokja jika belum terbentuk, yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi dalam bentuk:
 - ⊙ Rapat rutin pokja membahas rencana kerja dan penganggaran program/kegiatan perumahan tahun n dan n+1, beserta laporan progres pelaksanaan pembangunan bidang PPAS.
 - ⊙ Melakukan Kick-Off Meeting tingkat Provinsi untuk membahas strategi dan program/ kegiatan dalam pencapaian target, internalisasi program/kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah, serta sinkronisasi program/kegiatan provinsi dengan kabupaten/kota.
2. Melakukan advokasi program/kegiatan kepada pemangku kepentingan dilingkungan internal, meliputi advokasi pemangku kepentingan di internal badan pemerintahan (kepala dinas, kepala daerah dan anggota legislatif daerah), serta sosialisasi kegiatan bidang PPAS kepada pemangku eksternal pemerintahan (badan usaha swasta, LSM, masyarakat).
3. Sinkronisasi dan internalisasi program/kegiatan melalui lokakarya sinkronisasi sumber pendanaan/pembiayaan, serta sinkronisasi dan internalisasi usulan program/kegiatan dalam RKPD.
4. Fasilitasi dalam bentuk fasilitasi penyusunan RPJMD, pendampingan daerah dalam implementasi program/kegiatan bidang PPAS, dan fasilitasi daerah dalam advokasi dan promosi kegiatan/program PPAS.
5. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan, baik melalui pemanfaatan portal Nawasis, kunjungan lapangan ke kabupaten/kota, maupun evaluasi program/kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota.
6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui pelatihan tematik.

Selain itu Pokja PPAS/PKP Provinsi juga dapat mengikuti beberapa kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pokja PPAS Nasional, diantara:

- ⦿ *Kick-Off Meeting* Pokja PPAS Nasional;
- ⦿ Rapat Koordinasi Nasional/Rakornas Pokja PPAS Nasional;
- ⦿ Kegiatan Pembelajaran Horisontal;
- ⦿ Lokakarya Sinkronisasi Sumber Pendanaan PPAS;
- ⦿ *Coaching clinic*: Penyusunan RPJMD bagi Provinsi yang mengadakan pilkada, Penyusunan strategi dan program/kegiatan dalam pencapaian target PPAS.

BAB 7



7.1 Exercise Perencanaan Program Kegiatan Tahun 2022 dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Tahun 2021

Pencapaian target bidang Perumahan dan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi sesuai dengan RPJMN 2020-2024 membutuhkan kolaborasi dan komunikasi dalam prosesnya. Sesi ke-5 pengembangan strategi advokasi dan komunikasi dalam pencapaian target dan mendukung kegiatan Tahun 2021 merupakan salah satu dari rangkaian pelatihan dalam bentuk Training Online Seri-2 Strategi Komunikasi dan Advokasi. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menyusun perencanaan strategi advokasi dan promosi; meningkatkan keterampilan public speaking untuk advokasi dan promosi kepada pemangku kepentingan; meningkatkan

keterampilan mengembangkan media yang efektif dan tepat sasaran; meningkatkan keterampilan mengelola suatu event virtual/online; serta menarik pembelajaran dan apresiasi kepada Pokja Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada sesi ini membagi menjadi tiga segmen, yaitu 1) Prinsip Dasar Komunikasi ; 2) Pemetaan dan Planning Strategi Advokasi dan Promosi berdasarkan Business Process Sektor (Studi Kasus: Bidang Sanitasi); dan 3) Contoh Sukses Advokasi dan Promosi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Semarang, Surakarta).

Segmen pembahasan pertama ialah menjelaskan apa saja prinsip dasar komunikasi. Wiwit Herismembuka segmen dengan menjelaskan pengertian komunikasi, komunikasi merupakan proses dari seorang communicator menyampaikan pesan atau informasi menggunakan media atau kanal tertentu untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ini merupakan sebuah pertanda bahwa komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi yang ideal. Terdapat lima poin untuk menjalankan komunikasi yang ideal, yaitu 1) mengetahui siapa target audiens (Targeted Audiences/Stakeholders), dengan mengenali peran, pengaruh, dampak dari program; 2) memahami perilaku targeted audiences/stakeholders agar dapat memberikan motivasi dan pemahaman untuk dapat melakukan tindakan; 3) menentukan informasi atau pesan yang tepat yang bertujuan untuk mempengaruhi segment manfaat sesuai dengan kebutuhan; 4) memilih kanal atau saluran media yang tepat; 5) melakukan umpan balik atau feedback untuk evaluasi efektivitas saluran komunikasi, berdasarkan adanya persamaan persepsi output dan adanya perubahan perilaku.



Pembahasan segmen pertama terkait penjelasan strategi komunikasi sebagai prinsip dasar komunikasi mendukung pembahasan pada segmen kedua yaitu tentang Pemetaan dan Planning Strategi Advokasi dan Promosi berdasarkan Business Process Sektor dengan studi kasus pada bidang Sanitasi. Kunci melakukan advokasi dan komunikasi yaitu pemutakhiran strategi advokasi dan komunikasi agar dapat tepat menyampaikan esensi mengikuti target yang telah diperbaharui. Hony Irawan menjelaskan terdapat tujuh poin untuk melakukan advokasi dan komunikasi kolaborasi dari berbagai isu dan sektor untuk mencapai target, yaitu 1) untuk dilaksanakan oleh siapa strategi yang disusun; 2) aspek atau sektor; 3) identifikasi isu-isu strategis umum; 4) identifikasi target dan apa yang diharapkan dari setiap target; 5) pengemahan pesan umum dan pesan spesifik untuk tiap target; 6) strategi bauran saluran komunikasi untuk setiap target; dan 7) kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan komunikasi dan advokasi.

Berkaitan dengan tujuh poin strategi advokasi dan komunikasi kolaborasi dari berbagai isu dan sektor untuk mencapai target, langkah-langkah penyusunan strategi komunikasi juga dijelaskan agar tidak melakukan penyusunan strategi advokasi dan komunikasi dari titik nol. Langkah pertama yaitu melakukan desk study dan wawancara melalui studi dan kebijakan yang telah ada serta menggali lebih dalam. Langkah yang kedua yaitu melakukan analisis gap dan SWOT, dimana pada studi kasus bidang sanitasi hasilnya sudah memiliki lembaga adhoc untuk berkolaborasi sehingga yang perlu dilakukan ialah adanya dirigen di tingkat nasional dan daerah untuk menentukan ke arah target dengan mengoptimalkan peluang yang ada. Langkah ketiga yaitu identifikasi isu strategis dan pelaksana, yaitu perlunya dukungan berbagai pihak dalam optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan yang ada, menciptakan lebih banyak



peluang pendanaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan komitmen kepala daerah terhadap layanan sanitasi berkelanjutan dan perubahan perilaku masyarakat untuk akses sanitasi aman.

Langkah selanjutnya dalam penyusunan strategi komunikasi yaitu berkaitan dengan intervensi strategis dari advokasi dalam Sanitasi Aman, yaitu memperbaiki perencanaan; memperkuat tata kelola; memaksimalkan pendanaan; dan meningkatkan bisnis. Peran komunikasi yaitu adanya intervensi perubahan perilaku dari empat hal tersebut, hasilnya masyarakat yang merupakan individu atau keluarga dengan sanitasi belum aman perlu dibantu agar mau dan mampu dalam penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sanitasi aman.

Disisi lain untuk mendukung penyusunan pemetaan dan planning strategi advokasi dan komunikasi berdasarkan business process sektor, target utama dapat berkomunikasi dengan berbagai stakeholders yaitu pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, social media influencers, kelompok komunitas, serta pemasok penyediaan layanan, pengembang perumahan dan pengusaha swasta. Pesan yang disampaikan dalam masing-masing stakeholders juga disesuaikan kemampuannya dengan tujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program. Pesan-pesan yang disampaikan melalui komunikasi dengan kerja sama berbagai stakeholders dapat terlaksananya sanitasi aman.

Setelah dua pembahasan utama di atas, segmen ketiga yaitu contoh sukses proses advokasi dan promosi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Studi kasus praktik advokasi dan promosi sukses yaitu proses yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan kawasan kumuh dengan konsep urban renewal di Kawasan Semanggi. Kunci sukses dapat terlaksananya program penataan tersebut adalah kerja sama kolaborasi dari Walikota Surakarta, Pokja PKP Kota Surakarta, Tim Kotaku dan seluruh OPD yang ada.

Secara garis besar, Koordinator Tim Kotaku Kota Surakarta menjelaskan masing-masing peran utama kunci sukses terlaksananya komunikasi dan advokasi yang sukses. Peran Walikota Surakarta yang hadir sebagai pemimpin daerah secara aktif berkomunikasi dan advokasi turun langsung ke lapangan tergerak karena pengalaman pribadi yang pernah mengalami ketidakpastian dalam hunian. Peran Pokja PKP Kota Surakarta mendorong advokasi dan komunikasi dalam penanganan permukiman kumuh Kota Surakarta, menyepakati satu data satu peta, serta menciptakan advokasi dalam mengembangkan kolaborasi sumber daya maupun pendanaan di masing-masing OPD. Peran Tim Kotaku yaitu melakukan fasilitasi, mediasi dan advokasi bersama Pokja PKP dan Walikota Surakarta, salah satunya yaitu berkomunikasi dengan Tim Legislatif sehingga menghasilkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

terhadap permukiman Kumuh. Selain itu, Walikota Surakarta, Pokja PKP dan Walikota Surakarta juga turun langsung ke lapangan untuk bertemu masyarakat sebagai salah satu strategi komunikasi dan advokasi sehingga masyarakat bersedia dipindahkan sementara untuk dilakukan penataan. Masyarakat juga diberikan komitmen oleh Walikota Surakarta terhadap kepastian bermukim untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang menduduki tanah-tanah ilegal, yaitu dipindahkan ke unit rumah yang memiliki sertifikat.

BAB 8



8.1 Pengembangan Material, Kanal dan Media Advokasi, Peran Media Sosial dan Influencer

Pencapaian target bidang perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi melibatkan berbagai stakeholder termasuk masyarakat pada umumnya. Hal ini bukan hal mudah terutama dengan berbagai penyesuaian konsep dan definisi sesuai dengan mandat SDGs, sehingga dibutuhkan peran advokasi yang mampu memengaruhi beberapa pihak maupun publik terlibat dan berperan serta dalam berbagai upaya pencapaian target.

Pada sesi ini membagi menjadi tiga bahasan, yaitu 1) konsep terkait media sosial dan pemanfaatannya untuk advokasi isu-isu PPAS; 2) cara memilih kanal atau media komunikasi yang efektif dalam advokasi isu PPAS; 3) menganalisis media sosial tentang PPAS.

Poin pembahasan pertama menjelaskan bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai wadah membagikan interestnya kepada pihak lain dan saat ini media sosial sebagai media advokasi terbaik. Menarik perhatian publik berdasarkan informasi di media sosial perlu memperhatikan obyek, tujuan, serta feedback yang diharapkan dari penyebaran informasi. Isu-isu PPAS sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan hal tersebut merupakan keuntungan untuk menarik interest masyarakat. Terdapat tiga poin kunci menarik daya pikat publik, yaitu 1) memberikan konten yang ringan dipahami oleh semua pihak, namun memiliki pesan yang kuat; 2) menampilkan isu strategis melalui fenomena lingkungan sekitar agar lebih dekat dengan masyarakat, bahkan jika perlu memunculkan isu fenomenal; 3) menampilkan informasi atau isu tersebut melalui caption, gambar, dan video yang menarik.

Berkaitan dengan menampilkan informasi pada media sosial, maka pada poin pembahasan kedua membahas terkait pemilihan kanal atau media atau media komunikasi yang efektif dalam advokasi isu PPAS. Berdasarkan trend penggunaan media sosial lima tertinggi adalah Youtube, Whatsapp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Terjadi peningkatan pengguna berbagai media sosial di Indonesia dari 27 persen di 2018 menjadi 56 persen di 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa advokasi melalui media sosial saat ini akan lebih efektif dari sisi jangkauan maupun efeknya. Saat memilih kanal atau media komunikasi perlu memperhatikan sasaran obyeknya dan segmentasi jangkauan. Mayoritas publik lebih tertarik kepada visualisasi daripada tulisan. Jika caption hanya memberikan daya pikat 2 kali lipat, maka melalui gambar dapat meningkatkan daya pikat 5 pikat dan yang terbesar adalah video dengan daya pikat 25 kali lipat.

Tahapan selanjutnya setelah penentuan media komunikasi adalah mencari sumber masalah yang dekat dengan masyarakat. Isu tersebut akan memunculkan gelombang pendapat yang selanjutnya digunakan untuk poin-poin advokasi untuk memengaruhi sikap/tindakan yang seharusnya dapat diusahakan oleh masyarakat. Tidak harus seorang public figure untuk menjadi seorang influencer maupun advokasi. Keberhasilan dalam menarik interest masyarakat adalah dengan memosisikan diri sebagai masyarakat dan merasakan problematika di masyarakat. Isu atau informasi yang dipublikasikan tidak harus hal positif karena seringkali daya pikat publik muncul akibat adanya sensasional. Bermula dengan masalah dan memberi celah untuk publik berpendapat akan meningkatkan interest publik.

Setelah dua pembahasan utama diatas, Ismail Fahmi yang dikenal dengan tools Drone Emprit menampilkan analisis isu atau informasi terkait PPAS di media sosial serta tanggapan dari publik. Hasilnya untuk topik perumahan dan permukiman memperlihatkan masih rendahnya pembahasan public, baik dari tulisan maupun visualisasi isu terkait perumahan cukup rendah dibandingkan dengan Malaysia. Melalui tools ini terjaring beberapa top influencer yang dapat dimanfaatkan dalam advokasi. Akun dengan reach tinggi mayoritas merupakan media online dan hadir dari instansi tertentu bukan dari gelombang pendapat masyarakat.

Di sisi lain untuk air minum dan sanitasi gelombang pendapat masyarakat hadir dengan mengangkat isu perbaikan kualitas air minum dan fassilitas sanitasi. Isu tersebut dapat dimanfaatkan dalam advokasi. Narasi visual untuk isu air minum dan sanitasi banyak hadir dari lembaga humanity. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk berkolaborasi. Berdasarkan top influencer, cukup beragam background-nya begitupula dengan akun dengan reach tinggi.

Secara garis besar, Berdasarkan analisis emosi yang diungkapkan publik terhadap isu PPAS adalah emosi keterkejutan, ketakutan, danantisipasi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menjaring opini publik lebih luas lagi dengan menghadirkan visualisasi ataupun tulisan-tulisan berkaitan dengan isu tersebut, sehingga diharapkan akan muncul gelombang pendapat publik lebih luas. Sedangkan jika dibandingkan antara perumahan, permukiman dan air minum serta sanitasi, sektor perumahan paling banyak diperbincangkanpadda media sosial. Namun, pemerintah belum cukup memanfaatkan media sosial secara optimal untuk sosialisasi meupun berkomunikasi dengan publik. Selama ini yang banyak hadir dalam media sosial sekedar himabuan maupun informasi-informasi kebijakan berupa tulisan, dimana cenderung tidak memberikan daya pikat yang rendah. Diperlukan adanya perubahan sudut pandang dari pemerintah pusat maupun daerah jika ingin advokasi kepada masyarakat efektif dan tersebar luas, yaitu dengan menjalankan pembahasan pada sesi ini.

BAB 9



9.1 Exercise Penyusunan Strategi Advokasi dan Promosi serta Plenary Hasil Penyusunan Strategi

Wiwiet selaku narasumber dalam sesi ini menjelaskan bahwa dari hasil pengalaman setelah beberapa kali melaksanakan acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pokja PKP, ada beberapa isu penting yang menjadi kendala atau tantangan yang menghambat proses perencanaan dan pembangunan PKP yaitu: a) rendahnya komitmen Pemerintah Daerah; b) Pokja PKP yang belum aktif; c) Lemahnya basis data PKP. Di setiap isu permasalahan ini wiwiet percaya bahwa selalu ada peluang dan solusi, salah satunya adalah dengan menguatkan strategi advokasi dan komunikasi.



Lebih lanjut Wiwiet menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan demi tercapainya target dan tujuan dalam penyediaan rumah layak dan aman yang terjangkau, yaitu: a) meningkatkan komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan perumahan berskala besar (Urban Renewal); b) meningkatkan koordinasi dan sinergi kerjasama lintas sektoral terkait perumahan (Berfungsinya Pokja); c) mengangkat isu perumahan menjadi isu strategis untuk mendorong akses masyarakat terhadap penyediaan PKP yang layak, aman dan terjangkau .

Pengembangan strategi komunikasi dan advokasi juga dapat dilakukan melalui media-media yang sekarang ini sudah tersedia dia secara online (jaringan internet), contohnya adalah Website Nawasis dan Majalah Percik. Contoh lain dari strategi penguatan komunikasi dan advokasi lainnya adalah dapat menggunakan konsep kompetisi berupa lomba foto dengan tema PKP yang tentunya dapat menarik masyarakat untuk lebih mengenal lingkungan PKP di sekitarnya. Video/Film juga menjadi salah satu media yang sangat tepat dalam strategi menguatkan komunikasi dan advokasi.

Tentunya seorang fasilitator atau komunikator harus mempunyai telinga dan mata yg lebih “lebar” dibanding yg lainnya. Ada 3 rekomendasi strategi yang dapat dilakukan oleh seorang fasilitator atau komunikator untuk memastikan tersampainya pesan kepada audience, yaitu: a) lokakarya/pelatihan strategi dan implementasi advokasi dan komunikasi (integrated activity); b) pengembangan dan produksi materi sesuai masing-masing kelompok sasaran; c) pemantauan dan evaluasi, pre test/post test materi dan pelaporan aspek advokasi dan komunikasi. Masih banyak tantangan yang harus dilakukan sebagai seorang fasilitator kedepannya, salah satunya yaitu melakukan advokasi ke kepala daerah dan tingkatan pusat sehingga pesan yang disampaikan sama dan merata. Seorang influencer mempunyai peran yang sangat penting karena lebih dikenal oleh banyak orang sehingga mempunyai lebih banyak peluang dalam menguatkan advokasi dan berpeluang besar untuk mempengaruhi kebijakan yang akan ditentukan.

BAB 10



10.1 Rencana Tindak Lanjut dan Penutup

Tri Dewi Virgiyanti

Direktur Perumahan dan Permukiman
Kementerian PPN/BAPPENAS

Di sesi terakhir atau penutup ini Virgie menyampaikan bahwa ada 4 kata kunci yang menjadi hal penting dalam mencapai keterpaduan perencanaan dan pembangunan perumahan, air minum dan sanitasi, yaitu: a) komitmen untuk mencapai RPJMN 2020-2024 akan terjadi jika ada kolaborasi; b) kolaborasi antar stakeholder mensyaratkan kerendahan hati dari masing-masing pihak; c) sistem pendataan terpadu yang kredibel sebagai basis perencanaan program pembangunan; d) rencana aksi dengan target yang jelas dalam implementasi perencanaan program beserta pendanaannya.

Banyak hal baik yang sudah dilakukan di daerah berupa inovasi-inovasi program yang tentunya bisa menjadi motivasi untuk yang lainnya. Berbagai program tersebut seperti “Rumah Berbasis Komunitas” di Sumatera Selatan dan “Monitoring dan Evaluasi PPAS salah satunya melalui event “Saoraja Award” di Sulawesi Selatan yang memberikan banyak pelajaran bagi daerah-daerah lainnya. Pemda dapat mengambil peran untuk “menjahit” berbagai potensi program, pembiayaan, pemangku kepentingan, untuk memecahkan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Prestasi-perstasi ini tentunya harus mendapatkan penghargaan sehingga daerah-daerah lain bisa terpacu untuk melakukan terobosan-terobosan yang dapat membangun.

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan demi pencapaian target Daerah dalam mendukung RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu yang pertama adalah penyediaan tanah dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, maka dari itu diperlukan integrasi data sebagai basis penetapan program, termasuk pemetaan aspek sosial. Kemudian demi

mencapai hal tersebut Pemerintah pusat dan Daerah harus berkolaborasi dan mengharmoniskan kewenangan yang dimilikinya dalam penyediaan tanah. Land banking juga menjadi pilihan solusi, namun perlu dilakukan upaya lebih agar menjadi prioritas di daerah.

Program DAK terintegrasi dapat menjadi model program terpadu lintas sektor antara perumahan, air minum dan sanitasi. Strategi yang kedua yaitu melalui pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan. Pemerintah Daerah dapat menyediakan program pembiayaan perumahan untuk melengkapi program dari pemerintah pusat, baik untuk meningkatkan kapasitas program maupun untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani. Dan strategi yang ketiga adalah dengan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah. Apabila berkaca dari kisah sukses di beberapa daerah (Kampung Akuarium Jakarta, Komunitas Tukang Cukur Garut, Komunitas Guru Kendal), program perumahan berbasis komunitas sangat potensial untuk dikembangkan secara luas diberbagai daerah lainnya sebagai solusi bagi pemenuhan backlog dan penyediaan perumahan layak huni.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan
Daftar Hadir
Undangan
Foto Contoh Sertifikat
Foto Sertifikat
Link Download Materi



FOTO KEGIATAN



FOTO KEGIATAN



FOTO KEGIATAN



LOMBA FOTO

Sebelum kegiatan rakornas dilakukan pra event dengan mengadakan lomba foto bagi masyarakat dengan tema Rumah Layak Aman dan Terjangkau.



Pemenang Lomba Foto #RumahLayakAmanTerjangkau

Juara I



Agung Ananto Nugroho
Semarang



Pemenang Lomba Foto #RumahLayakAmanTerjangkau

Juara II



Jian Abiyu/Puji Anto
Wonosobo



Pemenang Lomba Foto #RumahLayakAmanTerjangkau

Juara III



Elang Kharisma
Yogyakarta



Pemenang Lomba Foto #RumahLayakAmanTerjangkau

Juara Favorit



Reja Hidayat/Fahreza Hidayat
Jakarta

E-FLYER

Pada rakornas hari ke 3 dilakukan kegiatan pelatihan komunikasi seri 2, yang dihadiri juga dari peserta diluar undangan rakornas (peserta umum).

TRAINING ONLINE Seri 2

STRATEGI KOMUNIKASI DAN ADVOKASI

Tips Strategi Advokasi Kebijakan, Mengembangkan Media Promosi dan Memanfaatkan Sosial Media untuk Mendorong Capaian Target di Sektor Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi.

Kamis, 17 Desember 2020 | pkl. 08.30 WIB - selesai

- Registrasi untuk Pelatihan Melalui Zoom
<https://bit.ly/pelatihan-ppas2>
*Peserta terbatas untuk 100 pendaftar pertama
- # TONTON KEMBALI TRAINING ONLINE Seri 1 :
Public Speaking & Pengelolaan Event Sektor PKP
<https://bit.ly/pelatihan-ppas1>

Disiarkan Live Streaming:
You Tube Pokja PPAS

Diselenggarakan Oleh:
POKJA PPAS

Narasumber

- **IKKE NURJANAH**
Public Figure & Influencer
- **ISMAIL FAHMI, P.hD**
Direktur Media Kernels Indonesia
- **HONY IRAWAN**
Pegiat Komunikasi & Advokasi

Moderator

- **WIWIT HERIS**
Advokasi & Komunikasi Expert

www.nawasis.org [rumahairminumsanitasi](https://www.instagram.com/rumahairminumsanitasi) [KotaTanpaKumuh](https://www.facebook.com/KotaTanpaKumuh)

SERTIFIKAT PESERTA

Pada rakornas hari ke 3 dilakukan kegiatan pelatihan komunikasi seri 2, peserta mendapat sertifikat setelah mengisi form

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

Iroh Rohayati Fatah

Atas Partisipasinya Sebagai Peserta Pelatihan Strategi Komunikasi dan Advokasi dengan tema:

"Tips Strategi Advokasi Kebijakan, Mengembangkan Media Promosi dan Memanfaatkan Sosial Media untuk Mendorong Capaian Target di Sektor Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi"

Yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2020 melalui aplikasi Zoom dan Youtube Channel POKJA PPAS.

Jakarta, 17 Desember 2020
Ketua Pokja PPAS Nasional


Tri Dewi Virgianti, S.P., MEM.
Direktur Perumahan dan Permukiman
Kedeputian Sarana dan Prasarana
Kementerian PPN/BAPPENAS

LINK DOWNLOAD MATERI

Materi dapat di download melalui website resmi Pokja PPAS Nasional:
<http://nawasis.org/portal/digilib/cat/materi-presentasi/12>



LEMBAR INFORMASI PRAKTIK BAIK

Lembar Informasi Rumah Sehat Komunal Kabupaten Pohuwato



Status Kepemilikan

- Status tanah dan rumah sertifikat atas nama penghuni dengan perjanjian selama 20 tahun tidak bisa diperjual belikan.
- Pemilik diberikan keleluasaan untuk:
 - ✓ Mengagunkan rumah dan tanah sebagai jaminan kredit milik usaha;
 - ✓ Menambah/memperbaiki bangunan rumah.
 - ✓ Mengalihkan kepemilikan kepada ahli waris dengan perjanjian baru di depan notaris.



Perluasan dan Peningkatan Kualitas

- Melanjutkan pembangunan yang belum selesai;
- Memperbaiki kualitas dimana dana desa yang dianggarkan bisa untuk 5 rumah per desa. Penyesuaian pendekatan ini diatur dalam petunjuk teknis APBDesa.
- Pemerintah daerah berencana melengkapi setiap kawasan dengan sarana permukiman seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah dan sarana lain yang dibutuhkan.
- Pemberdayaan ekonomi para penghuni.



Kontribusi Terhadap Kesejahteraan



2 Kaluar dari status desa tertinggal



Desa Maju

Kontak:

Nur Anugerah Wenas
Kebid fisik, infrastruktur dan lingkungan
(085263837000)

Ade Priyatna Hunowu
Kasudib infrastruktur dasar
(082297433232 / enamisyan@gmail.com)

Email : baperlitbang.pohuwato@gmail.com



Referensi

Youtube Pokja PPAS
"Kolaborasi Pendanaan dan Optimalisasi Dana Desa dalam Penyediaan Rumah Sehat Komunal"

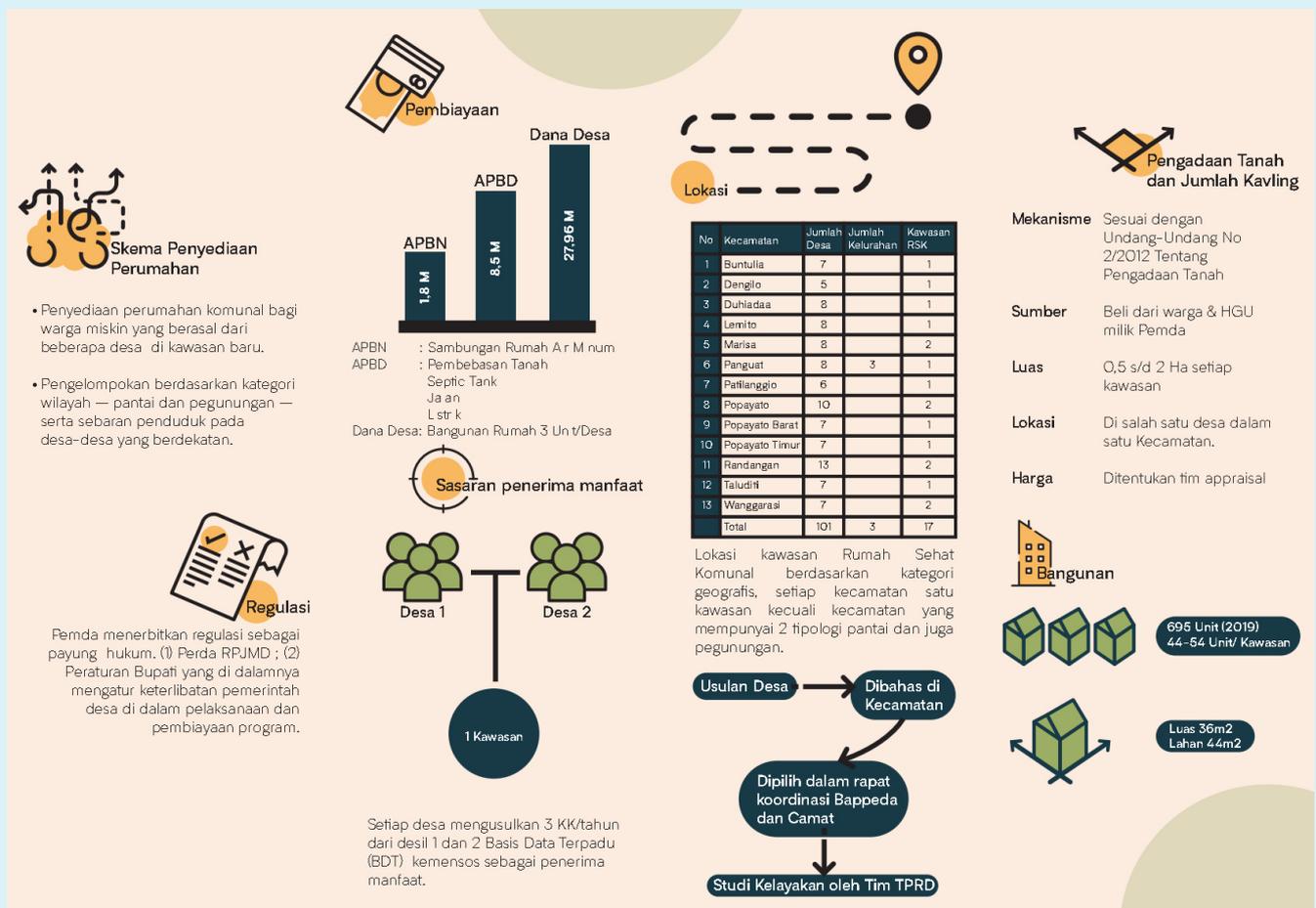
Artikel www.nawasis.org
Jalan Menuju Kesejahteraan Melalui Rumah Sehat Komunal Gerakan Perubahan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

Pokja PPAS Nasional (Sektor Perumahan)
Jl. Ki Mangunsarkoro No.41,
Menteng, Jakarta-Pusat 10310
Website : www.nawasis.org
Youtube : Pokja PPAS
Facebook : KotaTanpaKumuh
Instagram : rumahairminusanitasi

Masalah yang ingin dipecahkan

Intervensi perumahan dan permukiman untuk MBR yang sudah dilakukan selama 3 tahun dinilai belum bisa mengangkat kinerja daerah dan tidak signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Terdapat 7 seri Lembar Informasi Paktik Baik diantaranya: (1) Lembar Informasi Rumah Komunal Kabupaten Pohuwato; (2) Lembar Informasi Kolaborasi ABCG Kabupaten Kendal; (3) Lembar Informasi Apartemen Transit Jawa Barat; (4) Lembar Informasi Perumahan Komunitas Seniman Rambut Kabupaten Garut; (5) Perumahan Skala Besar Palembang; (6) Peremajaan Kawasan Semanggi Kota Surakarta; (7) Lembar Informasi Kampung Pisang Makassar.



SURAT UNDANGAN PESERTA



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31934819, 3149635; Faksimili (021) 37934819
www.bappenas.go.id

Nomor : 15211 /Dt.6.5/12/2020 Jakarta, 07 Desember 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas KAK
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Nasional Strategi Pencapaian Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka akselerasi pencapaian target RPJMN 2020-2024 Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi, **sangat diperlukan** perumusan strategi dan kegiatan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk menghadiri **Rapat Koordinasi Nasional Strategi Pencapaian Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi** yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa-Kamis, 15-17 Desember 2020
Tempat : Hotel Novotel Tangerang, Tangcity Superblock, Jl. Jenderal Sudirman No.1, RT.001/RW.005, Babakan, Tangerang, Tangerang City, Banten 15117
Waktu : Agenda terlampir

Terkait penyelenggaraan acara tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panitia menyediakan akomodasi dan konsumsi selama penyelenggaraan acara bagi **1 (satu) orang peserta** per instansi yang diundang. Biaya transportasi dan uang harian peserta ditanggung oleh masing-masing instansi pengutus
2. Mempertimbangkan kenaikan kasus Covid-19, peserta wajib membawa hasil **swab antigen/pcr** yang masih berlaku (maksimal 3 hari) pada saat registrasi dan menyampaikan foto copy file tersebut kepada panitia saat registrasi
3. Peserta menggunakan masker/**faceshield** dan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 selama acara berlangsung
4. Peserta diharapkan mengisi **link** konfirmasi kehadiran pada <https://bit.ly/konfirmasirakornas-pkp> dan **self assessment** risiko Covid-19, sebagaimana terlampir paling lambat **Selasa, 8 Desember 2020** melalui email: ccmu.indonesia@gmail.com.

Mengingat pentingnya agenda pembahasan kegiatan, besar harapan kami agar Saudara dapat menghadiri atau menugaskan pejabat yang kompeten pada acara tersebut. Untuk konfirmasi dan informasi seputar acara lebih lanjut dapat menghubungi staff kami **Sdri. Nuhfa (HP: 0859-2015-0204)** dan **Sdri. Zia (HP: 0813-1241-0050)**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

Lampiran Surat : Undangan Rapat Koordinasi Nasional Strategi Pencapaian Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi
Nomor : 15211 /Dt.6.5/12/2020
Tanggal : 07 Desember 2020

Kepada Yth.

- 1) **Kementerian Dalam Negeri**
 - a. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Diijen Bina Pembangunan Daerah
 - b. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Diijen Bina Keuangan Daerah
 - c. Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Diijen Keuangan Daerah
- 2) **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
 - a. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Diijen Perumahan
 - b. Direktur Rumah Susun, Diijen Perumahan
 - c. Direktur Rumah Khusus, Diijen Perumahan
 - d. Direktur Rumah Swadaya, Diijen Perumahan
 - e. Direktur Rumah Umum dan Komersial, Diijen Perumahan
 - f. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Diijen Cipta Karya
 - g. Direktur Bina Penataan Bangunan, Diijen Cipta Karya
 - h. Direktur Sanitasi Diijen Cipta Karya
 - i. Direktur Air Minum, Diijen Cipta Karya
 - j. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Diijen Pembiayaan Infrastruktur
 - k. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Diijen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 - l. Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Diijen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3) **Kementerian Kesehatan**
 - a. Direktur Kesehatan Lingkungan, Diijen Kesehatan Masyarakat
- 4) **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
 - a. Direktur Pengelolaan Sampah, Diijen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
- 5) **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional:**
 - a. Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Direktorat Jenderal Penataan Agraria
 - b. Direktur Penatagunaan Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria
 - c. Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Direktorat Jenderal Penataan Agraria

SURAT UNDANGAN NARASUMBER



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31934819, 3149635; Faksimili (021) 37934819
www.bappenas.go.id

Nomor : 15211 /Dt.6.5/12/2020 Jakarta, 07 Desember 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas KAK
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Nasional Strategi Pencapaian Target
Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka akselerasi pencapaian target RPJMN 2020-2024 Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi, **sangat diperlukan** perumusan strategi dan kegiatan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk menghadiri **Rapat Koordinasi Nasional Strategi Pencapaian Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi** yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa-Kamis, 15-17 Desember 2020
Tempat : Hotel Novotel Tangerang, Tangcity Superblock, Jl.
Jenderal Sudirman No.1, RT.001/RW.005, Babakan,
Tangerang, Tangerang City, Banten 15117
Waktu : Agenda terlampir

Terkait penyelenggaraan acara tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panitia menyediakan akomodasi dan konsumsi selama penyelenggaraan acara bagi **1 (satu) orang peserta** per instansi yang diundang. Biaya transportasi dan uang harian peserta ditanggung oleh masing-masing instansi pengutus
2. Mempertimbangkan kenaikan kasus Covid-19, peserta wajib membawa hasil **swab antigen/pcr** yang masih berlaku (maksimal 3 hari) pada saat registrasi dan menyampaikan foto copy file tersebut kepada panitia saat registrasi
3. Peserta menggunakan **masker/faceshield** dan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 selama acara berlangsung
4. Peserta diharapkan mengisi **link** konfirmasi kehadiran pada <https://bit.ly/konfirmasirakornas-pkp>, dan **self assessment** risiko Covid-19, sebagaimana terlampir paling lambat **Selasa, 8 Desember 2020** melalui email: ccmu.indonesia@gmail.com.

Mengingat pentingnya agenda pembahasan kegiatan, besar harapan kami agar Saudara dapat menghadiri atau menugaskan pejabat yang kompeten pada acara tersebut. Untuk konfirmasi dan informasi seputar acara lebih lanjut dapat menghubungi staff kami **Sdri. Nuhfa (HP: 0859-2015-0204 dan Sdri. Zia (HP: 0813-1241-0050)**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.
Bapak Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas

PROTOKOL KESEHATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Berdasarkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
HK.01.07/MENKES/382/2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI
TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)

Prinsip Umum Perlindungan Kesehatan Individu

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker/face shield yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis;
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alcohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya; dan
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

No	Kegiatan	Protokol Kesehatan
1	Registrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Konfirmasi kehadiran peserta melalui CP Panitia disertakan dengan lembar konfirmasi2. Mengisi form instrumen self-assessment risiko COVID-19 dan file dikirimkan melalui email: ccmu.indonesia@gmail.com. Jika hasilnya terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti kegiatan secara langsung di lokasi;3. Datang pukul 08.00 WIB untuk mengikuti tes swab antigen4. Dipastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter;5. Mengikuti protokol kesehatan di lokasi hotel penyelenggaraan kegiatan.
2	Saat Acara	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh pengisi acara yang terlibat dalam kegiatan harus dalam kondisi sehat. Pengukuran suhu tubuh dilakukan di pintu masuk oleh pihak hotel. Apabila ditemukan suhu > 37,3° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan tempat pelaksanaan kegiatan;2. Dipastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter;3. Dianjurkan untuk membawa peralatan pribadi seperti botol minum dan alat tulis pribadi.
3	Istirahat	<ol style="list-style-type: none">1. Dianjurkan untuk membawa peralatan pribadi seperti alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpti), alat sholat, dan sebagainya;2. Dipastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter;3. Istirahat makan dan sholat dilakukan secara bergelombang atau melalui rekayasa administrasi/teknis lainnya dengan melihat kapasitas ruang makan dan ruang ibadah.

ABSENSI PESERTA RAKORNAS

H-1

NO.	Nama	Instansi	E-Mail
1	Catur Adi Nugroho	Simavi	catur.nugroho@simavi.nl
2	Ira Choeriah SSi. MT	Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. Jawa Barat	irachoeriah@gmail.com
3	Muhammad Suro	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	sarprasbappeda@yahoo.com
4	Eralita, SKM., MPH	Dinas Kesehatan Provinsi Kalteg	unjungeralita@yahoo.com
5	SUSI DIAHLITA SARI	SNVT Penyediaan Perumahan Prov Sumsel	susi.diahlita@gmail.com
6	M.Ikhsan Maulana ST	Bina penataan bangunan	
7	Wahyu Triyono	Bappeda DIY	wahyu.3.yono@gmail.com
8	Made Yasa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	madeyasa97093@gmail.com
9	Nurzuleicha, S.Sos	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	-
10	Sunarto Hadi, SE	Bappeda Kabupaten Melawi	uwais3otranus@gmail.com
11	Eduard F. Tefa	Bappeda Jabar	eduard_tefa@yahoo.com
12	Liklikwatil Melchias Julius	Dinas PUPR Provinsi NTT	melchiasjl@gmail.com
13	SYAFRUDDIN	SNVT Perumahan Sulawesi Barat	didincivil@gmail.com
14	Maulvi Riftianto, ST	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu	luvi2211@gmail.com
15	Hafid Firmansyah	Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat	hafid.hf40@gmail.com
16	ZULFA ERMIZA	USAID IUWASH PLUS	zulfa_ermiza@dai.com
17	Rd Yudi Raksasamudra,ST, M.AP	Disperkim Jabar	yudiraksa123@gmail.com

18	Budi Santosa	Kementerian Dalam Negeri	santosabudi968@gmail.com
19	efendy	SNVT Penyediaan Perumahan Babel	tappbabel@gmail.com
20	Hari Prasetyo	Program Kotaku, Dit. PKP DJCK	prasetyo.jbr2003@gmail.com
21	Baiq Musfiatin	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	baiq.musfiatin@gmail.com
22	Tri Budiharto, ST., M.Sc., M.Eng	SNVT Penyediaan Perumahan Sulsel	budiplaners@gmail.com
23	andi munanjar	TACT-LG nuwsp Regional 5	andimunanjara1@gmail.com
24	Joeni Retnowati	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Prov. Sulawesi Tengah	joeniretnowati72@gmail.com
25	Raden Noorman Windarto	Kementerian Dalam Negeri	noormanwindarto@gmail.com
26	Nurwira Rahayu	Bappelitbangda Prov Sulsel	nurwirarahayu@yahoo.co.id
27	Robertha Erry	KOTAKU	robertha.erry@gmail.com
28	UMAR Umayah Heluth, S.Pi, M.Si	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU	umarheluth1505@gmail.com
29	Rinaldi Agung TS	PPSP DIY	rinaldiagungts@gmail.com
30	Luh Putu Nia Arisantini S	Bappeda Provinsi Bali	prasaranapu.bappedabali@yahoo.com
31	Yohanna Endang S	Bappedalitbang Provinsi Kalteng	yohanna_endang@yahoo.co.id
32	Ria	PUPR	riarisma55@gmail.com
33	Dede Sumarna	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	d.sumarna1979@gmail.com
34	Tofikurochman Achmad	KIAT Project	Tofikurochman.Achmad@KIAT.or.id
35	Jeffri	Dit.SSP, DJP, Kementerian PUPR	lingkungan.hunian@gmail.com
36	Ir.Muhammad Bachri,MT	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah	muhbachriyusuf@gmail.com
37	INDAH LESTARI	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	alrhazi07@gmail.com
38	Andie Putra Pratama, S.STP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan	andiepratama70@gmail.com

39	PANTJA WIDHIA JUSTIANUS TOLLA, ST, MT	DINAS CIPTA KARYA,BINA KONSTRUKSI & TATA RUANG PROV. SULAWESI TENGGARA	widitolla@yahoo. co.id
40	Dedi Hidayat	Bappeda Kalimantan Selatan	ilh.bappedakalsel@ gmail.com
41	WIWIT WIDONO, ST, MT	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Riang dan Pertanahan	wt.kepri@gmail.com
42	Melvin Hutabarat, S.Sos, M.IP	BAPPEDA Provinsi Jambi	
43	Resmi Sri Nulus	OSP-5 Provinsi Bali (KOTAKU)	resminulus@gmail. com
44	Ekapria Dharana	Bappeda Provinsi Bali	ekapria@yahoo.com
45	Usnia, A.Md.Keb, SKM	Dinas Kesehatan Prov. Sultra	ppa_dinkessultra@ yahoo.com
46	Udi harbian, ST	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	udi.harbian@gmail. com
47	Mohammad Jihad Dienullah	KMP-KOTAKU	abunajlanz@gmail. com
48	Ir. T. Mirzuan, MT	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	mteuku@ymail.com
49	SITI HAFSAH SIREGAR, SH.MM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. SUMBAR	
50	M. Sudarman	Bappeda Sumatera Selatan	adamdewa77@ gmail.com
51	Nora Damayanty, ST, MT	BAPPEDA Aceh	norathaha@gmail. com
52	Satrio Yudhawan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	yudhawansatrio@ gmail.com
53	Amalia Warganegara	Bappeda Provinsi Banten	bappeda.prpw@ gmail.com
54	Roossy Budiawan, SKM, MPA	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	rossi.budi@gmail. com
55	Afriyani AmraN, S.T., M.T.	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	ppdisperkim@gmail. com
56	Briand Indrawan, ST.,MT.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	pokjapkp.kalteng@ gmail.com
57	Ridwan Anom, ST, MURbRgnlPlan	Bappeda Prov. Sulawesi Utara	renwil.sulut@gmail. com
58	Nurul Puspita	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	nurulpuspita.pi2t@ gmail.com
59	Masyitha Putri Febriani	DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah	keterpaduaninfra. jatengprov@gmail. com

60	Irawan Dwi Yuliantoro, ST., MT	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kep. Babel	irawanyuliantoro@gmail.com
61	Dede Sumarna	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	d.sumarna1979@gmail.com
62	Sufian Bin Syamsir, ST	SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	sufianteknik11.ts@gmail.com
63	suyono	KOTAKU	yonocahayailmu@yahoo.co.id
64	Damar Widiatmoko	Program Kota Tanpa Kumuh - Dit PKP DJCK Kemen PUPR	widiatmoko.damar@gmail.com
65	Muhammad Bakri	Program KOTAKU Provinsi Maluku	mbakri793@gmail.com
66	Mohamad Iqbal Hasan	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo	iqi.2929@gmail.com
67	Ani Fauziah, ST	Dinas PUPR Provinsi Jambi	
68	alfonsa esther	dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman prov.kalbar	perkimprov@gmail.com
69	Herni Sundari	Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat	hernisundari76@gmail.com
70	Rizki Mulyadi, S.Sos, M.I.Kom	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau	okie.shingoe@gmail.com
71	Petrus Tuny	OSP 11 Maluku	etusanakmaluku@gmail.com
72	Herman mahat, SKM, MM	Dinas kesehatan provinsi Riau	hermanmht7@gmail.com
73	Dra Syafrida	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara	syafridarida011@gmail.com
74	MOHAMAD ZAINUL ARIPIN	KOTAKU OSP-03 JATIM	
75	Devy Eka Aprilianingtyas, ST	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	sungram169@gmail.com
76	Rudi Santosa	Program KOTAKU Jawa Tengah	rudikawung09@gmail.com
77	Mgs. Hidayaturrehman Mulyawan	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	dayat07051996@yahoo.co.id
78	Mgs. Hidayaturrehman Mulyawan	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	dayat07051996@yahoo.co.id
79	Erwinsyah SH MH	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara	erwinsyahhrp063@gmail.com
80	Ir. Aries N. Ardianto, MM.	Dinas PRKP Provinsi Gorontalo	ardiantoaries@yahoo.com

81	Aqmala Fatma Kurniasih, ST	Ditjen Perumahan Kementerian PUPR	aqmala07@gmail.com
82	Perdana Jati Leksono,S.T.,M.Eng	Bappeda Prov Kaltim	perdana.jl@gmail.com
83	Kasri, SKM, M.Kes	Dinas Kesehatan Prov.Sul.Sel.	kasri_kesling@yahoo.co.id
84	Sri Hardhini	Subdit Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dit. SUPD II	punyadhinie@gmail.com
85	SYAYUTI	BAPPEDALITBANG PROVINSI KALTENG	syayuti1977@gmail.com
86	Akbar Ali	USAID IUWASH PLUS	ali_akbar@dai.com
87	Bayu Rakhmana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jabar	bayurakhmana259@gmail.com
88	ely setyawati, skm, mkm	Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan	
89	YELZA YOGIELTHA P	SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV KALTARA	yelzayelja@gmail.com
90	Lutfi, ST.MT	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Laserjet234@gmail.com
91	H. SAHNAN	DPMPD DUKCAPIL PROVINSI NTB	sahnannan67@gmail.com
92	Zaitul Rahma Lestari, S.T	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara	zaitulrahma17@gmail.com
93	Zaitul Rahma Lestari, S.T	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara	zaitulrahma17@gmail.com
94	Maria Nurtania KN	Bappeda Prov. Kalbar	marianoortania@gmail.com
95	I ketut merta	Pmd dukcapil prov. Bali	ketutmerta69@gmail.com
96	Dr. Eko Suroyo, M.Si.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	suroyoeko@gmail.com
97	achmad syaiful, ST, M. Eng	disperkim prov Sumatera Selatan	achmadsyaiful20@yahoo.com
98	Ifad Mourbas	KIAT	ifad.mourbas@kiat.or.id
99	Risyana Sukarma	Bank Dunia Jakarta	rsukarma@worldbank.org
100	anita mustika	dinas pkpck provinsi lampung	anitamustika13@gmail.com
101	Halberto sidiq	psspp	sidiq.halberto@gmail.com

102	Yuli Prasetyanti	Bappeda Jateng	yuli.risnendi@gmail.com
103	Fathur R Gultom	KOTAKU	f47ur@ymail.com
104	ZUHRIAH AR LERY	BAPPEDA SULAWESI BARAT	zuhriaharlery@gmail.com
105	Miduk Hutabarat	SNVT Pelaksanaan Perumahan	midoek2000@yahoo.com
106	Suci Purnomo	DPRKPCK PROV JATIM	psoetji@yahoo.co.id
107	Iwan Kurniawan, ST., MM	Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri	iwan2405@gmail.com
108	agung fitrianto	NMC NSUP	agung.watsan@gmail.com
109	Reiza	DPRKP DKI Jakarta	permukiman.dprkp@gmail.com
110	Nitta Rosalin, SE., MA.	Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri	nittaperkim@gmail.com
111	Azary Ruth	Ditjen Bina Bangda Kemendagri	azarymarpaung@gmail.com
112	Azary Ruth	Ditjen Bina Bangda Kemendagri	azarymarpaung@gmail.com
113	Devi Malinda	Bappeda Sumbar	bid.eko.pw@gmail.com
114	Retno Kartika Sari	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan	rtnokrtksr@gmail.com
115	Agung Jadi Prakoso	Dit. PKP, DJCK, Kementerian PUPR	agungprakoso@pu.go.id
116	Vony F. Pratiwi	Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri	vonypratiwi@yahoo.com
117	Firman Heydir, ST, M.Eng	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kepri	disperkim.prov@gmail.com
118	Popy Indrawati	World Bank	p_indrawati@yahoo.com
119	Alizar Anwar	World Bank	aanwar@worldbank.org
120	DRS. DJOKO ARYANTO, MM	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah & Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	aryanto101@gmail.com
121	Sofyan, S.Sos	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kepri	disperkim.prov@gmail.com
122	Sofyan, S.Sos	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kepri	disperkim.prov@gmail.com
123	Abdul Rahim, S.STP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Sulteng	abdulrahimdp83@gmail.com

124	FX. Joko Ari Cahyono	Dinas PUPESDM DIY	joko_ari@yahoo.com
125	Dedi budianto	Worldbank	d.budianto17@gmail.com
126	ENCEP R MARSADI	POKJA PKP JABAR	ermarsadi@gmail.com
127	Winardi	KOTAKU Jawa Timur	winardituren74@gmail.com
128	Riche Noviasari	Dit. AM, DJCK, Kemen PUPR	rentekpamdjck@gmail.com
129	Faid	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	faiz_tea@rocketmail.com
130	Meike Kencanawulan Martawidjaja, ST, MDM	Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	rentekpamdjck@gmail.com
131	Ira Lubis	Kementerian PPN/Bappenas	lubis.ira@gmail.com
132	sutji mintarti	Direktorat Rumah Swadaya- DJP PUPR	sutji.mintarti@gmail.com
133	Dwityo AKoro S	Ditjen Perumahan, Kem PUPR	dwityo@gmai.com
134	MAULANA SAKTI, S.T	BAPPEDA PROV. SULAWESI TENGGARA	infrapw.bappedasultra@gmail.com
135	Sitti roosilawati	Snvt penyediaan perumahan provinsi jawa barat	roosilawati@yahoo.com
136	Egidius Peka Dahe	Balai penyedian perumahan wilayah Nuda Tenggara II Provinsi NTT	egidiuspekadahe@gmail.com
137	Dhany Tantowi Tinambunan	Biro Pembangunan	dhanytantowi@gmail.com
138	Abdul Rahim, SSTP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	abdulrahimdp83@gmail.com
139	AFREDES NURMA YANTI	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	
140	Ni Luh Ketut Sri Wulandari	Disperkim Provinsi NTB	sri.wulandari96@gmail.com
141	SRI SUHARTININGSIH	KOTAKU OSP 4 JATIM	fic.osp04jatim@gmail.com
142	AA Gde Sutrisna WP	SNVT PnP Bali	a.sutrisna@yahoo.com
143	Indah Karina Yulina	Ditjen Bina Bangda	ikyushop@gmail.com
144	Milda Nasution, S.Sos	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	mildans07@gmail.com

145	Hanres ButarButar, S.IP	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	
146	Nurul Ainy Gumilar	Direktorat PPIP, DJPI, Kementerian PUPR	nurul.ag@bppsam.com
147	Ali Husin	DLHP Provinsi Sumsel	alihusin27@gmail.com
148	HM. Limbong	World Bank	hm.limbong@gmail.com
149	Syamsuddin Genda	Program KOTAKU	sam.genda77@gmail.com
150	Jeine Kandou, ST, MT	Dinas PUPRD Prov. Sulut	jeinekandou@gmail.com
151	Arjanto, ST, MT.	Bappeda Sulbar	arjanto.k@gmail.com
152	Rahman Hapidin, SKM	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	rahman.kesling@gmail.com
153	Arif RACHman	ROMS 13 PAMSIMAS KALIMANTAN SELATAN	arifsman30@yahoo.com
154	zuhriah AR Lery	Bappeda Sulawesi Barat	zuhriaharlery@gmail.com
155	Andi Astuti	Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan	saspras.bappedannk@gmail.com
156	Muhammad Ilham	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	deckham.deslu@gmail.com
157	Fajar Benjamin	djpi pupr	fajarelib@gmail.com
158	Yohanes Tuwan	Dinas PUPR NTT	yohanistuwan@gmail.com
159	Ricky Rekintan Sumsago	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	prince.sumsago@gmail.com
160	Yohanes Tuwan	DinasPUPR NTT	yohanistuwan@gmail.com
161	tantia hastharini	bappeda prov jateng	tantiahastharini@yahoo.com
162	Nini Anita	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan	ninianita67@yahoo.com
163	ami artika	Balitbang Prov. Kalimantan Utara	artikaami@gmail.com
164	Andi Rully Naharudin,ST	Bappeda-Litbang Kab. Nunukan	andirullynaharudin@gmail.com

165	Debby Triasmoro	Dinas PUSDATARU Jateng	debby_triasmoro@yahoo.co.id
166	Maria Nurtania KN	Bappeda Prov Kalbar	marianoortania@gmail.com
167	Fela Atiqah Shufa	Dinas PUP ESDM DIY	felaatiqashufa@gmail.com
168	ZULFA ERMIZA	USAID IUWASH PLUS	zulfa_ermiza@dai.com
169	wahyu hidayat	baopeda ntb	wahyu_bozo@yahoo.com
170	Rahman Hapidin, SKM	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	rahman.kesling@gmail.com
171	Hafid Firmansyah	Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat	hafid.hf40@gmail.com
172	SYAYUTI	BAPPEDALITBANG PROVINSI KALTENG	syayuti1977@gmail.com
173	Joeni Retnowari	Dinas Cipta Karya dan Sumbet Daya Air Prov. Sulawesi Tengah	joeniretnowati72@gmail.com
174	ASDAR	BAPPELITBANGDA PROVINSI SULSEL	
175	Saniya Niska	SNV	sniska@snv.org
176	Robertha Erry	Kotaku	robertha.erry@gmail.com
177	MOH.TAUFAN BACHTIAR,ST.MT	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan Prov.Sultra	mtaufanbachtiar@gmail.com
178	BARRY	Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Bengkayang	marcelino_barry25@yahoo.com
179	Tri Budiharto, ST., M.Sc., M.Eng	SNVT Penyediaan Perumahan Sulsel	budiplaners@gmail.com
180	Anwar Sidik	Dinas Kesehatan Prov. banten	anwarsidik7814@gmail.com
181	HARIYANTO	PROGRAM KOTAKU	fic.osp11papua@gmail.com
182	Miduk Hutabarat	SNVT Pelaksana Perumahan	midoek2000@yahoo.com
183	Ipong Hartanto	Biro Infrastruktur dan SDA Setda Prov. Jateng	infrasprkp2019@gmail.com
184	Wahanudin	Dit. Perkim	wahanudin@gmail.com
185	PANTJA WIDHIA JUSTIANUS TOLLA, ST, MT	DINAS CIPTA KARYA,BINA KONSTRUKSI & TATA RUANG PROV. SULAWESI TENGGARA	widitolla@yahoo.co.id

186	HM. Limbong	World Bank	hm.limbong@gmail.com
187	Prasetyo Wirawan, S.T.	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	bigpewe23@gmail.com
188	Aga Pasda Fitra	DPUP ESDM DIY	agapasda@gmail.com
189	Ester Yuliana Kajenta,ST	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	pokjapkp.kalteng@gmail.com
190	Nur Aisyah Nasution	Bappenas	assyifa_aisyah@yahoo.com
191	Srie Mulyasari	CCMU-Bappenas	srie.mulyasari@gmail.com
192	Bayu Erlangga	Sekr PMU PPSP - DIT Perkim	bayuerlangga93@gmail.com
193	Ir. Budi Setiawan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	busetia29@yahoo.co.id
194	Nurul Wajah Mujahid	BAPPENAS	nurulwajah@gmail.com
195	Tofikurochman Achmad	KIAT Project	Tofikurochman.Achmad@KIAT.or.id
196	Ponti Astika	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya	pontiaстикakantor@gmail.com
197	Ifad Mourbas	KIAT	ifad.mourbas@kiat.or.id
198	Evan Agustin	Bappeda Provinsi DKI Jakarta	evan.agustin17@gmail.com
199	Junita Bahari Nonci	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov Banten	nitanonci2@gmail.com
200	Sunarto Hadi, SE	Bappeda Kabupaten Melawi	uwais3otranus@gmail.com
201	Thahirah Muhsin	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sultra	Muhsin.thahirah@gmail.com
202	Iyan aufa mughofar	PUPR PROVINSI JAWA BARAT	lyanaufa.m@gmail.com
203	A. M. Ferrysyah, ST	Disperkim Prov. Kalsel	very_keloso@yahoo.com
204	Norhani, S.Sos.M.Ap	Setda Provinsi Kalteng	haninengah@yahoo.co.id
205	Nadia Sitompul	Dit Perkim Bappenas	nadia.sitompul@support.bappenas.go.id

206	Latifah	Bappeda Provinsi Jambi	latifahchandra5@gmail.com
207	Yunita Maharani	Kementerian PUPR- Dit.AM	yunitamaharani71@gmail.com
208	Edi Juardi, S.Pt.	Bappedalitbangrov Kalteng	eduard.bappeda@gmail.com
209	Anisa Nurwidia A	BAPPEDA DIY	anisa.nurwidia@gmail.com
210	Nadia Sitompul	Dit Perkim Bappenas	nadia.sitompul@support.bappenas.go.id
211	Gery Margana	Dit. Perkim Bappenas	gery.perkim@gmail.com

ABSENSI PESERTA RAKORNAS

H-2

NO.	Nama	Instansi	E-Mail
1	Dr. Eko Suroyo, M.Si.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	08128026894
2	AFREDES NURMA YANTI	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	085268076169
3	Zulfa Ermiza	USAID IUWASH PLUS	085355980099
4	Muhammad Suro	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	085228212644
5	Sufian Bin Syamsir, ST	SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	082158290907
6	ami artika	balitbang provinsi kalimantan utara	081352678181
7	Rizki Mulyadi, S.Sos, M.I.Kom	Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau	081267813461
8	Liklikwatil Melchias Julius	Dinas PUPR Provinsi NTT	082144856654
9	Zulfa Ermiza	USAID IUWASH PLUS	085355980099
10	Arif Sugeng H	Dinas PERAKIM JATENG	085225066484
11	Merta ketut	Pmddukcapil	081999040337

12	Hafid Firmansyah	Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat	081321019862
13	Melvin Hutabarat, S.Sos, M.IP	Bappeda Provinsi Jambi	081373555255
14	Agung Prakoso	Dit. PKP, DJCK, PUPR	08562930664
15	Udi Harbian, ST	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri	08117701110
16	Gandhi	Disperkim Sumsel	085279669146
17	M. Sudarman	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	08980821604
18	Mohamad Iqbal Hasan	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Prov Gorontalo	+628298233311
19	Firman Heydir Effendie, ST. M.Eng	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	081364604026
20	Rahman Hapidin, SKM	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	085793201659
21	Moh.Taufan Bachtiar,ST. MT	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	081341650099
22	salmarianto	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumut	081396278654
23	alfonsa esther	DPRKP Prov.Kalbar	081345790746
24	Luh Putu Nia Arisantini S	Bappeda Provinsi Bali	087860982357
25	Baruni	DPRKP DKI Jakarta	08123389354
26	Siti Aminah, SHI	Bappeda Prov. Jabar	08122133322
27	Saraswati Renaningsih	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	08127774008
28	Arvana Bachmid, ST	Bappeda Provinsi Gorontalo	085340466600
29	Hisbah Varina	Bappeda Provinsi Bengkulu	08127354401
30	Alizar Anwar	World Bank	0811884147
31	Dona Astriana	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov Kepri	081261006981
32	Wahanudin	Bappenas	081319617180
33	TRIMO PAMUDJI AL DJONO	The World Bank	08111877495
34	Arvana Bachmid, ST	Bappeda Provinsi Gorontalo	085340466600
35	Risyana Sukarma	Bank Dunia Jakarta	0816876319
36	Udi Harbian, ST	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri	08117701110
37	Suparmanto	ISWM	081351599909
38	Dedi budianto	Worldbank	08138499917
39	Dedi budianto	Worldbank	08138499917

40	Putri Sortaria	Unicef	081285683656
41	HM. Limbong	World Bank	08161829705
42	Nurul Ainy Gumilar	Dit. PPIP, DJPI, Kementerian PUPR	082125288083
43	Ratih Dewayanti	KOTAKU World Bank	082115759155
44	wahyu hidayat	bappeda ntb	085333496658
45	Lutfi, ST.MT	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	081269041425
46	Weldy Anugra Riawan, ST, M.PWK	Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri	082171690575
47	Eduard F. Tefa	Bappeda Jabar	081394196363
48	SITI HAFSAH SIREGAR, SH.MM	DINAS PMD PROV. SUMBAR	082385673651
49	Asrizal, ST., M.Si	Dinas Perkim Aceh	082366919988
50	Nurwira Rahayu	Bappelitbangda Sulsel	085299937783
51	ERNA SUTRESNA, ST,MT	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	082129084868
52	Wahyu Mulyana	STC WB	081513802922
53	Nurul Puspita	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	087839485151
54	M. Idham	bappeda sulteng	082358756703
55	Gery Margana	Dit. Perkim Bappenas	081224726026
56	Gita Ayu Syafarina	Bappeda Prov. Kalsel	081258398547
57	Efendy	SNVT PP Babel	081368845427
58	Rudi Santosa	Kotaku	081575142425
59	Yohanes Tuwan	Dinas PUPR Provinsi NTT	08123769129
60	Andina Novita	KLHK-Dit PS	08128236829
61	Mella Irawati	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	08164851718
62	Andi Asriadi Amir	OSP 9 SUL SEL-KOTAKU	081241118996
63	I Made Mudiarta SKM	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	081558035989
64	Dwi Anesta Fika Asrul, S.IP	Bappelitbangda Prov. Sulsel	082217409153
65	Akbar Ali	USAID IUWASH PLUS	081388596137
66	Clara Monissa	BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah	085232420224
67	Erny Sonya Pontoh	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral DIY	085298028787
68	Dr. Muhammad Ali, ST. MT.	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	0816666921
69	Tofikurochman Achmad	KIAT Project	082299334487

70	Tantri Swasining	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jateng	085865057165
71	indah lestari	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	081340855836
72	Maria Nurtania KN	BappedaProv Kalbar	081257032188
73	Popy Indrawati	World Bank	0818778092
74	Lina Damayanti	USAID IUWASH PLUS	08129095222
75	M. Subhan Daties	Bappeda Provinsi Maluku	081247044066
76	PONTI ASTIKA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYAA KAB. KAPUAS HULU	085822779409
77	Yuliana Rivai	Dinas PUPR Provinsi Gorontalo	081143400179
78	Bane Doli Simanjuntak	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	081263664116
79	Venu Rendra Krisna	Dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepri	081268558879
80	Bane Doli Simanjuntak	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	081263664116
81	Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, MKM	Kemenkes	081385757514
82	AGUS SUPRIYANTO	ROMS 4 PAMSIMAS RIAU	081275681005
83	Eralita, SKM., MPH	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	081328287210
84	Anwar Sidik	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	081321035024
85	Sari Baiti Syamsul, ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Kepri	081372727778
86	Reiza	DPRKP DKI Jakarta	3847062
87	PANTJA WIDHIA JUSTIANUS TOLLA, ST, MT	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI & TATA RUANG PROV. SULAWESI TENGGARA	082240378883
88	Ades Simbolon	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	085357309431
89	Ronaldy Lovina	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	085264081291
90	Kalsum Mosii	Dinas PUPR Gorontalo	0812448442
91	Basyier Gemaning Insan	Bappeda jateng	08175454280
92	Tri Budiharto, ST., M.Sc., M.Eng	SNVT Penyediaan Perumahan Sulsel	085242396935
93	Robertha Erry	Kotaku	08158930131
94	Zaitul Rahma Lestari, S.T	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara	081298351055

95	Muhammad ilham	Dinas Perkim Aceh	+628126990750
96	FX. Joko Ari Cahyono	Dinas PUPESDM DIY	085290004988
97	Ridwan Anom, ST, MUrbRgnlPlan	Bappeda Prov. Sulut	082146340300
98	Ruminah	Kementerian ATR/BPN	081386678664
99	Damar Widiatmoko	Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	081325769092
100	Kurniawati Sugiyo	Kementerian ATR/BPN	08128955483
101	Erwin Ferdinansyah, ST, MT	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	0811683366
102	Mario Christy Frans, ST, MT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku	081310828382
103	JOHAN ADI SURYONO	Bappeda Prov Jateng	085736615641
104	Sunarto Hadi, SE	Bappeda Kab. Melawi	081283490353
105	Sri Probo Sudarmo	Bank Dunia	0811861587
106	hera lidiawati	Bappeda DKI Jakarta	08121331976
107	agus sulaeman	DJPI	081315780033
108	Noor Rachmi Mahbubi, ST	Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	081255445908
109	Ridwan Anom, ST, M.Urb. Rgnl.Plan	BAPPEDA Prov. Sulut	082146340300
110	Baiq Musfiatin	Disperkim Provinsi NTB	089610777777
111	AA Gde Sutrisna WP	SNVT PnP Bali	081558115933
112	Afriyani Amran, S.T., M.T.	Dinas PERumahan dan Permukiman	082117276410
113	Aditya Wijaya, MT	Dinas puprpkpp prov riau	081212703099
114	WIWIT WIDONO, ST, MT	Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan	081372920417
115	mitha hasti suryani	Kementerian PUPR	081905013778
116	abdul aziz	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	08112632405
117	Bayu Erlangga	Dit Perkim Bappenas	083878178553
118	Ester Yuliana Kajenta, ST	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov, Kalteng	082148046446
119	Djoko Aryanto	Biro PIWP2 Setda DIY	08118110817
120	Nora Damayanty ,ST, MT	Bappeda Aceh	081269083007
121	I Nyoman Suartana	SNV Netherlands Development Organisation	+6285237983100
122	Dormaringan Hs Napitu	SPEAK Indonesia	08121082760
123	Ahmad Khoeri	USAID IUWASH PLUS JAWA TENGAH	081225455052
124	M. Sudarman	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	08980821604
125	Irpoweliani Plaimo	BPPW NTT	08113833571

126	RUSMANI SAID	KMW NSUP-KOTAKU RIAU	085361039334
127	herni sundari	dinas perumahan dan permukiman jawa barat	082123411949
128	RUSMANI SAID	KMW NSUP-KOAKU	085361039334
129	M. Saiful Islam, ST.,M.T	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov Sumsel	081274420777
130	SUSI DIAHLITA SARI	SNVT Penyediaan Perumahan Prov Sumsel	085366100707
131	Joeni Retnowati	Dinas Cipta Karya dan Sumbet Daya Air Prov. Sulawesi Tengah	085342783988
132	satrio yudhawan	dinas pertanahan dan tata ruang DIY	08995310333
133	Nini Anita	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan	085273956647
134	Catur Adi Nugroho	Simavi	081325083980
135	NORHANI	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	081380163977
136	Ineza	PUPR Riau	08129894008
137	Tengku Fadhly Chairuddin SE	Dinas PMDDUKCAPIL Prov. Riau	081365740029
138	LYDIA HINTA	BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO	082292480545
139	Ahmad Gigih R	Bappenas	081281295576
140	Marcell Sinay	Wahana Visi Indonesia	082144374287
141	surya darma	bappeda provinsi aceh	081269929992
142	Herman mahat SKM MM	Dinas kesehatan provinsi Riau	08117533553
143	Azary Ruth P	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	085749138573
144	Cheko Prasetya, ST	Dinas PUPR-PERKIM PROVINSI KALIMANTAN UTARA	082154508697
145	Dra Syafrida	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara	081260448456
146	MAULANA SAKTI	BAPPEDA PROV. SULAWESI TENGGARA	0
147	Muhammad Arifudin	ISWM	087871500509
148	anita mustika	dinas pkpck provinsi lampung	08127954343
149	susanti	Bappeda prov kep babel	087767273755
150	Sri Hardhini	Subdit Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Bangda	08122430124
151	Pius Seto	Bank Dunia	081287816365
152	Edi Juardi, S.Pt.	Bappedalitbangprov Kalteng	08125002878
153	Aqmala Fatma Kurniasih	Direktirat RUK, Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR	082112460017
154	Gilang Rachmatullah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Jabar	087743969175

155	Mardiyanta	ISWM Bappenas	081317172928
156	Agreta Indah	Ditjen Bangda Kemendagri	081802076114
157	lily sandi	Bappedalitbang Prov Riau	0811765553
158	Latifah	Bappeda Provinsi Jambi	082183888514
159	Frind Imanuel	KOTAKU OSP 6 Kalteng	082255991269
160	Siti roosilawati	Snvt penyediaan perumahan provinsi jawa barat	08111575566
161	Widia Yulianti	Direktorat Rumah Umum dan Komersial, PUPR	082288330437
162	Muhammad Nurjaya	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sultra	0811403915
163	diella dwi sartika	bappeda provinsi lampung	081322045925
164	diella dwi sartika	bappeda provinsi lampung	081322045925
165	Fela Atiqa Shufa Halim	DPUPESDM DIY	082233453987
166	Aldi	Water.org	081285959788
167	Egidius Peka Dahe	BP2PNT II/SNVT PP Prov.NTT	081337044665
168	YELZA YOGIELTHA P.	SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV KALTARA	082255269370
169	DENNY FARANDY	BIRO ISDA	082328449310
170	Muhammad Arifudin	ISWM	087871500509
171	Rahman Hapidin, SKM	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	085793201659
172	Jusfar	Balai PPW Kaltim	081324626636
173	I Made Yasa	Dinas PUPRKIM Provinsi Bali	081239767542
174	Eralita, SKM., MPH	Dinas Kesehatan Prov Kalteng	081328287210
175	wahyu sri handayani	dinkes prov banten	0811113632
176	Tantri Swasining	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov Jateng	085865057165
177	Heni Herawati	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	081809010028
178	Ricky Rekintan Sumsago	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	081369331903
179	Herman mahat SKM MM	Dinkes Riau	08117533553
180	Mohammad Aqshah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	087864850714
181	Ancilita Purnamaningsih	Kementerian PUPR	085794683941
182	Wahyu Triyono	Bappeda DIY	081328752533

ABSENSI PESERTA RAKORNAS

H-3

NO.	Nama	Instansi	E-Mail
1	Ricky Rekintan Sumsago	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	Prince.sumsago@gmail.com
2	indah lestari	Bappeda Provinsi	alrhazi07@gmail.com
3	Liklikwatil Melchias Julius	Dinas PUPR Provinsi NTT	melchiasjl@gmail.com
4	A. M. Ferryansyah, ST	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	verry_keloso@yahoo.com
5	Ratih Widyaningsih	DSL Foundation	ratihwid2020@gmail.com
6	Ni Luh Ketut Sri Wulandari	Disperkim Provinsi NTB	sri.wulandari96@gmail.com
7	Melvin Hutabarat, S.Sos, M.IP	Bappeda Provinsi Jambi	cloudsirfe@gmail.com
8	Ferry Asmoro	Program Kotaku OSP2	feyasmoro14@gmail.com
9	Masyitha Putri Febriani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	keterpaduaninfra.jatengprov@gmail.com
10	Robertha Erry	Program Kotaku	robertha.erry@gmail.com
11	IMAS SITI MASYITOH	OC5 KOTAKU	cb3.oc5jabar1@gmail.com
12	rosita sinuraya	dinas perumahan dan kawasan permukiman	rossinuraya@gmail.com
13	Iroh Rohayati Fatah	Program Kotaku	cuy_koe@yahoo.com
14	Djoko Aryanto	Biro PIWP2 DIY	aryanto101@gmail.com
15	Dede Sumarna	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	d.sumarna1979@gmail.com
16	AFREDES NURMA YANTI	BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	
17	M.Sudarman	BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan	adamdewa77@gmail.com

18	Muhammad Arifudin	ISWM Bappenas	irim1data@gmail.com
19	Theresia Deisy Wulansari	OSP 8 Program KOTAKU	threswulansari@gmail.com
20	Mohammad Jihad Dienullah	KMP KOTAKU	abunajlanz@gmail.com
21	achmad syaiful, ST, M.Eng	disperkim prov Sumsel	achmadsyaiful@yahoo.com
22	Akbar Ali	USAID IUWASH PLUS	akbar.ali2602@gmail.com
23	Arvana Bachmid, ST	Bappeda Provinsi Gorontalo	arvanabee@gmail.com
24	Khorik	Youth with Sanitation Concern	Khorik.istiana@gmail.com
25	ZULFA ERMIZA	USAID IUWASH PLUS	zulfa_ermiza@dai.com
26	I Made Yasa	Dinas PUPRKIM Provinsi Bali	madeyasa97093@gmail.com
27	Iwan Harwidian M	Balai PPW Kaltim	iwanharwidian88@gmail.com
28	Mohamad Iqbal Hasan	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	iqi.2929@gmail.com
29	Eduard F. T	Bappeda Prov. Jabar	eduard_tefa@yahoo.com
30	Cicik Rokhmawati	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Gresik	cicik.rokhmawati@gmail.com
31	ICHWAN HAMZAH, S.Sos	Balitbangda Maluku Utara	ichwanhamzah691@gmail.com
32	Damar Widiatmoko	Program Kotaku Nasional	widiatmoko.damar@gmail.com
33	SUSI DIAHLITA SARI	SNVT Penyediaan Perumahan	susi.diahlita@gmail.com
34	Nina Firstavina	KMP Program Kotaku	firstavina@gmail.com
35	Retno Kartika Sari	SNVT Penyediaan Perumahan	rtnokrtksr@gmail.com
36	Muhammad Suro	Bappeda provinsi Sumatera Selatan	sarprasbappeda@yahoo.com
37	Weldy Anugra Riawan, ST, M.PWK	Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri	
38	Faisal	Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi	faisalfasli7@gmail.com
39	Agustina Ruth Gunawan.,SKM	Dinkes Jabar	agustinaruth1994@gmail.com

40	Liklikwatil Melchias Julius	Dinas PUPR Provinsi NTT	melchiasjl@gmail.com
41	YULI MURYANTO	OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP 1) PROGRAM KOTAKU PROVINSI JAWA TENGAH	yulim8@gmail.com
42	Hafid Firmansyah	Biro Perekonomian Setda Jabar	hafid.hf40@gmail.com
43	Efendy	SNVT Penyediaan Perumahan	tappbabel@gmail.com
44	ifad Mourbas	KIAT	ifad.mourbas@kiat.or.id
45	Reni Rachma Hudi Widyasari	OSP 2 DIY Program Kotaku	publikasi.osp2diy@gmail.com
46	ira mayasita	Bappeda Kota Singkawang	iramayasita_zaki@yahoo.co.id
47	I ketut merts	Pmd dukcapil	ketutmerta@gmail.com
48	SOFYAN,S.Sos,MM	DINAS KAWASAN DAN PERMUKIMAN PROV.KEPRI	disperkim.prov@gmail.com
49	SITI HAFSAH SIREGAR, SH.MM	DINAS PMD PROV. SUMBAR	
50	herni sundari	dinas perumahan dan permukiman jawa barat	hernisundari76@gmail.com
51	Ronaldy Lovina, ST	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahann	ronaldy.lovina@Wgmail.com
52	Ir. Tyas Utami Amalia, MM	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	pepperkimbanten@gmail.com
53	Vhany Medina	KMP 1	vhanyfun@gmail.com
54	I KETUT ARYA DHARMA SUPUTTA	DISPMD DUKCAPIL PROVINSI BALI	
55	URAY ELLY YUNIDA	BPPW KALBAR	urayelly@gmail.com
56	Djaya Mulya, ST., M.P.W.P.	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	mulya.djaya@yahoo.co.id
57	Yohanes tuwan	Dinas PUPR Provinsi NTT	yohanistuwana@gmail.com
58	Nini Anita	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan	ninianita67@yahoo.com
59	CLARA MONISSA, ST., M.Si	BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	clara.monissa83@gmail.com
60	Sri Nulus	OSP-5 Prov Bali	resminulus@gmail.com
61	Samsul Ma'arif	kotaku osp3 jawa timur	samquadra@gmail.com

62	Avianti Zulaicha	Pamsimas III	avianti_z@yahoo.co.id
63	Andie Putra Pratama, S.STP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan	andiepratama70@gmail.com
64	Tri Budiharto, ST., M.Sc., M.Eng	SNVT Sulsel	budiplaners@gmail.com
65	Sunarto Hadi, SE	Bappeda	uwais3otranus@gmail.com
66	Irawan Dwi Yuliantoro	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	irawanyuliantoro@gmail.com
67	Noor Rachmi M., ST	Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	
68	Sjahrizal	Sekretariat PMU PPSP	sjahrizal78@gmail.com
69	Briand Indrawan, St.,MT.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	pokjapkp.kalteng@gmail.com
70	Maria Nurtania KN	Bappeda Prov. Kalbar	marianoortania@gmail.com
71	Uray Elly Yunida	BPPW Kalbar	urayelly@gmail.com
72	Ester Yuliana Kajenta, ST	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	pokjapkp.kalteng@gmail.com
73	I Made Mudiarta SKM	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	mademudiarta135@gmail.com
74	susanti	Bappeda	susantiarsyad@gmail.com
75	Petrus Tuny	OSP 11 Maluku Program Kotaku	etusanakmaluku@gmail.com
76	Ancilita Purnamaningsih	Kementerian PUPR	ancilita@yahoo.com
77	CORNELIUS TRI CAHYO SUKSMANTO	KOTAKU	c.tricahyo.s@gmail.com
78	Ridwan Anom	BAPPEDA	renwil.sulut@gmail.com
79	Isti Cahya	KSI SSK PIU Teknis	istimurwati@gmail.com
80	Indra Lestari	Kotaku	indra.lestari90@gmail.com
81	YELZA YOGIELTHA P.	SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROV KALTARA	yelzayelja@gmail.com
82	Siti roosolawati	Snvt penyediaan perumahan provinsi jawa barat	roosilawati@yahoo.com
83	Udi Harbian, ST	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri	udi.harbian@gmail.com
84	Johan Adi Suryono	Bappeda	johanadisuryono@yahoo.com

85	indah lestari	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	alrhazi07@gmail.com
86	Ishak Amin Rusly, ST., MT	Disperkimtan Sulsel	ishakaminrusli@gmail.com
87	Luh Putu Nia Arisantini S	Bappeda Provinsi Bali	prasaranapu.bappedabali@yahoo.com
88	Wahyu Septiana	Bappeda Provinsi Jawa Timur	ciptakarya.bppdprov@gmail.com
89	Irawan Hasan	Program KOTAKU OSP-9 Sulawesi Selatan	ihsip74@gmail.com
90	JAJA JAMALUDIN	OC 5 KOTAKU JAWA BARAT	jamaludinjaja15@gmail.com
91	Rizki Mulyadi, S.Sos, M.I.Kom	Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau	okie.shingoe@gmail.com
92	Tantia Hastharini	Bappeda Prov Jateng	tantiahastharini@yahoo.com
93	Eko Suroyo	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	suroyoeko@gmail.com
94	Mohammad Aqshah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	bidperumsulteng@gmail.com
95	Wayan Arie Widyastuti	Bppw	
96	Riyanto Basuki	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	basuki29@gmail.com
97	ami artika	Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara	artikaami@gmail.com
98	anita mustika	dinas PKPCK provinsi Lampung	anitamustika13@gmail.com
99	Hendri Matias S.Sois, M.Si	Program Kotaku	hendrimasscom@gmail.com
100	Basuki Rachmat	Bappeda Kab Mempawah	saviola_gunsar02@yahoo.com
101	Catur Adi Nugroho	Simavi	catur.nugroho@simavi.nl
102	AGUNG SANTOSO	PROGRAM KOTAKU	agoenk.rizzt@gmail.com
103	Nurachmi Ayu Susanti	OC-04 Kotaku Babel	amibae@gmail.com
104	DINI ROMDINI MANSUR	Kotaku OC 4 Bangka Belitung	dromdini@gmail.com
105	andi setiawan	Dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi jawa tengah	omegapertiwi@gmail.com

106	Miduk Hutabarat	SNVT Pelaksanaan Perumahan	midoek2000@yahoo.com
107	Jusfar	Balai PPW	joesfarrivai@gmail.com
108	Suparmanto	ISWM	Manto542@yahoo.com
109	Takdir Nurmadi	Konsultan Individu	takdirnur@gmail.com
110	Adam Ghiffari Muhammad	Al Azhar	Adamgm2018@gmail.com
111	Wendi Andra	Konsultan KOTAKU	wendiandra34@yahoo.com
112	IMAS ATI ROSAIDAH,SKM	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	imasatirosaidah@gmail.com
113	RUDI ROSYIDI	OC 3 KOTAKU RIAU	rudirosyidi@gmail.com
114	inayatullah	OC-7 Kalimantan Barat	nayora6969@gmail.com
115	diella dwi sartika	bappeda provinsi lampung	diella.dwi.sartika@gmail.com
116	Erwin Ferdinansyah, ST, MT	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	erwin_boediman@yahoo.com
117	Ma'mun Suryana	Program Kotaku OSP 6 Kalteng	mistersurya5@gmail.com
118	Rudi Santosa	Program KOTAKU	rudikawung09@gmail.com
119	RISNAWATI	PROGRAM KOTAKU	rhisna.83@gmail.com
120	Dedi Alparidi	Konsultan Pendamping Program KOTAKU	d.alfaridi@gmail.com
121	Andi Sitti Asti Suriaty	Dinas Lingkungan Hidup Prov. KALTIMJ	suriaty72@yahoo.com
122	ACENG KUSMAYADI	SETDA PROVINSI JAWA BARAT	
123	PANTJA WIDHIA JUSTIANUS TOLLA, ST, MT	DINAS CIPTA KARYA,BINA KONSTRUKSI & TATA RUANG PROV. SULTRA	widitolla@yahoo.co.id
124	MUSTAR	KOTAKU	laodemus@yahoo.com
125	Suffie Susilowati	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalteng	pksdattg.dpmdprovkalteng@gmail.com
126	Rahman Hapidin, SKM	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	rahman.kesling@gmail.com

127	Mardiyanto	ISWM Bappenas	adhix_59@yahoo.com
128	Ika Wulandari	LAN RI	ika.wldr@gmail.com
129	Bayu Erlangga	Set PMU PPSP	bayuerlangga93@gmail.com
130	AA Gde Sutrisna WP	SNVT Penyediaan Perumahan Bali	a.sutrisna@yahoo.com
131	Eralita, SKM., MPH	Dinas Kesehatan Prov Kalteng	unjungeralita@yahoo.com
132	R. Rendra Arief Budiono Poerbaya	Habitat For Humanity Indonesia	rendra.poerbaya@habitatindonesia.org
133	Rusmini	Kotaku Banjarmasin	irusminicd@gmail.com
134	Rr Nuri Hidayati M.	Konsultan individu	nurihidayati87@gmail.com
135	Ricky Rekintan Sumsago	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	prince.sumsago@gmail.com
136	Hero Christian Utama	PT. IMK Gold Mine, Kalteng	utamahero@gmail.com
137	Muhammad ilham	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman aceh	deckham.deslu@gmail.com
138	Euis Yuniastuti	Universitas Tridharma	euisyuniastuti@gmail.com
139	Kemal Rachmanda Putra M	Airlangga University	Kemalrpm@gmail.com
140	Anton dwi sentosa	Pt indo muro kaca	anton.02ads@gmail.com
141	Astrid Tehang	KOTAKU OSP 5 NTT	astridtehang@gmail.com
142	Laurentius Wiragni Sanjaya	KAI	wiragnicgi@gmail.com
143	MOHAMMAD RAFIQ	SMP NEGERI 4 DAMPAL SELATAN	mohrafiq84@gmail.com
144	Hadi Sulaiman, S.E.,CCP,CIRP, CPHCM	PT.Windu	hadisulaiman90@gmail.com

